

POLA PEMUKIMAN PEDESAAN DAERAH SULAWESI SELATAN



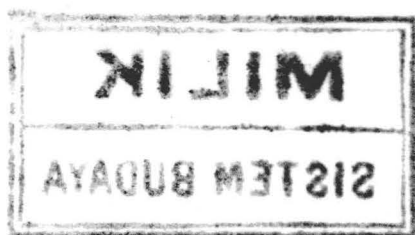
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

POLA PEMUKIMAN PEDESAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983.**



AM...
...
...
...

...
...
...

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Pola Pemukiman Pedesaan Daerah Sulawesi Selatan tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Abu Hamid, Lt. Tangdilintin, Israel Kurang, Drs. M. Johan Nyompa. dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Drs. P. Wayong, Drs. Djenen Msc.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Mei 1983

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun naskah Pola Pemukiman Pedesaan Daerah Sulawesi Selatan.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Mei 1983.

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123



D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	III
KATA SAMBUTAN	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR PETA	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. RUANG LINGKUP	10
B. KERANGKA ACUAN	11
C. LINGKUNGAN PEDESAAN SEBAGAI OBYEK KAJIAN	14
D. MASALAH	19
E. TUJUAN INVENTARISASI DAN DOKU- MENTASI	23
F. PROSEDUR INVENTARISASI DAN DO- KUMENTASI	24
G. PEMILIHAN DESA PENELITIAN	25
H. METODE PENELITIAN	26
BAB II. TANTANGAN LINGKUNGAN	28
A. LOKASI	28
1. Desa Wage	28
2. Desa Batupapan	32
3. Keadaan alam dan iklim Desa Wage dan Desa Batupapan	36
B. POTENSI ALAM	38
C. POTENSI KEPENDUDUKAN	42
1. Desa Wage	42
2. Desa Batupapan	49
3. Watak umum dan ciri-ciri mobilitas	57
BAB III. HASIL TINDAKAN PENDUDUK	63
A. BIDANG KEPENDUDUKAN	63
1. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas ...	67
2. Penyebaran pemukiman dan sarana fisik .	71
B. BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BU- DAYA	86
1. Mata pencaharian pokok	86
2. Kehidupan sosial budaya	92

BAB IV. P E N U T U P	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN-SARAN	99
DAFTAR BACAAN	101
DAFTAR KATA-KATA DAERAH	104

D A F T A R T A B E L

		Halaman
1. Tabel II – 1	Distribusi desa dan kampung dalam Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo (1979)	20
2. Tabel II – 2	Distribusi kecamatan, luas, dan ibu kotanya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (1979)	25
3. Tabel II – 3	Distribusi desa dan banyaknya Rukun Kampung dalam Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja (1979)	26
4. Tabel II – 4	Distribusi kecamatan, luas, dan ibukota kecamatan di Kabupaten Tana Toraja (1979)	28
5. Tabel III – 5	Keadaan alam dan iklim Desa Wage dan Desa Batupapan di Sulawesi Selatan (1979)	31
6. Tabel II – 6	Tataguna tanah di Desa Wage dan Desa Batupapan, Sulawesi Selatan (1979)	35
7. Tabel II – 7	Sumber daya alam Desa Wage dan Desa Batupapan, Sulawesi Selatan (1979)	37
8. Tabel II – 8	Jumlah dan kepadatan penduduk Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu (1979) ..	39
9. Tabel II – 9	Distribusi penduduk Desa Wage menurut jenis kelamin (1979)	39
10. Tabel II – 10	Komposisi penduduk Desa Wage menurut tingkat umur (1979)	41
11. Tabel II – 11	Perkembangan jumlah penduduk Desa Wage dari tahun 1975 s/d 1979	42
12. Tabel II – 12	Distribusi penduduk, Kampung/RK, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kecamatan Sabbangparu, Wajo (1979) Lampiran	106
13. Tabel II – 13	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kecamatan Sabbangparu, Wajo (1979). Lampiran	107
14. Tabel II – 14	Distribusi penduduk tiap kecamatan, jumlah desa/kampung, dan kepadatan penduduk Kabupaten Wajo (1979). Lampiran	108

15. Tabel I – 15	Distribusi, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk Desa Batupapan Kecamatan Makale, menurut Rukun Kam-pung (1979)	13
16. Tabel II – 16	Distribusi penduduk Desa Batupapan menurut jenis kelamin tiap Rukun Kam-pung (1979). Lampiran	110
17. Tabel II – 17	Jumlah penduduk Desa Batupapan me-nurut tingkat umur	45
18. Tabel II – 18	Perkembangan jumlah penduduk Desa Batupapan dari tahun 1975 s/d 1979 ...	47
19. Tabel II – 19	Distribusi umat beragama di Desa Batu-papan menurut RK (1979)	46
20. Tabel II – 20	Tingkat pendidikan penduduk Desa Ba-tupapan, Kecamatan Makale (1979) Lampiran	111
21. Tabel II – 21	Distribusi penduduk dan kepadatan pen-duduk Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja (1979)	48
22. Tabel II – 22	Distribusi penduduk menurut jenis ke-lamin tiap desa, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja (1980)	49
23. Tabel II – 23	Mutasi penduduk tiap desa dalam Ke-camatan Makale	50
24. Tabel II – 24	Distribusi penduduk dan kepadatan pen-duduk menurut kecamatan, Kabupaten Tana Toraja (1979) Lampiran	114
25. Tabel III – 1	Perkembangan penduduk Desa Wage dan Batu papan menurut jenis kelamin dari tahun 1975 sampai 1980	58
26. Tabel III – 2	Jenis-jenis mata pencaharian pokok dan sampingan penduduk di Desa Wage dan Batupapan (1979). Lampiran	115
27. Tabel III – 3	Bahan-bahan pembangunan perumahan di Desa Wage dan Batupapan (1979) ...	60
28. Tabel III – 4	Distribusi Kepala Keluarga (KK), RK, dan RT di Desa Wage (1979)	67
29. Tabel III – 5	Distribusi sarana fisik tiap kampung di Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu (1980)	72

30. Tabel III – 6 Distribusi Kepala Keluarga (KK) dan Rukun Tetangga (RT) menurut Rukun Kampung (RK) di Desa Batupapan

DAFTAR PETA

	Halaman
1. Peta 1 Pembagian desa-desa di Kecamatan Sabbangparu (1980)	21
2. Peta 2 Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan (1979)	23
3. Peta 3 Pembagian desa-desa dan jaringan jalan di Kecamatan Makale (1980)	27
4. Peta 4 Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan	29
5. Peta 5 Propinsi Sulawesi Selatan	33
6. Peta 6 Sumber daya alam Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu (1979)	39
7. Peta 7 Sumber daya alam Desa Batupapan (1980)	39
8. Peta 8 Penyebaran pemukiman di Desa Wage (1979)	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar III – 1	Pemukiman baru di antara RK lama 64
2. Gambar III – 2	Pemukiman baru berada dalam satu kompleks kerja dengan pemukiman lama 65
3. Gambar III – 3	Pola pemukiman Desa Wage 70
4. Gambar III – 4	Pola pemukiman Desa Batupapan ... 78
5. Gambar III – 5a	Bagan peredaran hari pasar di Tana Toraja 78
6. Gambar III – 5b	Bagan jarak antara ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten (Km) ... 80
7. Gambar III – 6	Pola persawahan (lombo') 85

B A B I

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini pemukiman menjadi topik pembicaraan yang penting dalam masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan transmigrasi, karena menyangkut masalah kependudukan, lapangan kerja, struktur perekonomian, dan pendidikan. Masalah kependudukan, bukan saja mengenai perataan penyebaran penduduk, melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang diharapkan bagi generasi mendatang.

Menurut perkiraan, 80% penduduk Indonesia hidup di pedesaan dan 20% lagi hidup di kota-kota. Apabila dilihat dari segi ketergantungan maka sekitar 40% terdiri atas usia produktif, sedang 60% lainnya terdiri atas anak-anak dan orang-orang tua yang membutuhkan bantuan dari tenaga kerja yang produktif. Jika komposisi penduduk itu dilihat dari penyebarannya, maka diperkirakan sekitar 70% penduduk berdiam di Jawa dan selebihnya berdiam di luar pulau Jawa. Selain itu diperkirakan pula bahwa hanya ada 40% tenaga kerja yang efektif, sedang selebihnya termasuk tenaga kerja samar-samar atau tidak efektif sama sekali, karena terbatasnya lapangan kerja. Tenaga kerja yang memasuki pasaran kerja tiap tahun tidak dapat tertampung di dalam lapangan-lapangan kerja yang baru dan tenaga kerja yang lama tidak mudah untuk berpindah ke lapangan kerja yang diinginkannya, bahkan tenaga kerja yang lama itu diantaranya merangkap lapangan kerja yang terbuka untuk menambah penghasilan atau memperbaiki posisi sosial-ekonominya. Berpindahnya tenaga kerja yang lama ke lain lapangan kerja, relatif sangat kecil, karena kekhususan

Migrasi penduduk merupakan salah satu wujud tindakan terhadap tantangan lingkungan. Mereka meninggalkan pemukimannya menuju suatu pemukiman baru. Jadi dari satu pemukiman ke pemukiman lain. Migrasi erat hubungannya dengan perubahan ekologi. Perubahan yang terjadi dalam proses ekologi merupakan hasil dari beberapa faktor dan sistem yang saling pengaruh mempengaruhi (Astrid S. Susanto : 1977 : 169). Selanjutnya beliau mengutip pendapat Alvin Boskoff, bahwa beberapa gejala dari ekologi adalah (a) berubahnya ukuran dan luas wilayah kota, (b) terjadinya perubahan dalam hubungan antar manusia di suatu daerah, (c) terjadinya perubahan fokus terhadap posisi geografis

individu maupun kelompok.

Dalam GBHN – 78 disebutkan bahwa "usaha pembangunan daerah dan perluasan kerja perlu di dorong melalui usaha penyebaran dan pembinaan pemukiman yang serasi dengan sumber alam dan lingkungan hidupnya menuju peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik di seluruh Indonesia". Selanjutnya disebutkan bahwa "*salah satu segi yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penggunaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini diperlukan sekali peningkatan inventarisasi dan evaluasi sumber-sumber alam dan lingkungan hidup*". Di bidang pembangunan daerah disebutkan pula dalam GBHN bahwa "*di dalam melaksanakan pembangunan, masing-masing daerah perlu lebih meningkatkan kemampuan penduduknya untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian berbagai sumber kekayaan alam, mengatasi berbagai masalah yang mendesak dan membina lingkungan pemukiman yang sehat*".

Pembinaan lingkungan pemukiman yang sehat dan bermutu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam Konperensi PBB mengenai pemukiman manusia (habitat) yang diselenggarakan di Vancouver dari tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 1976. Di Indonesia lebih banyak penduduk yang menghuni daerah pedesaan dengan jumlah desa sekitar 60.000 buah, dibanding dengan kota. Pemukiman yang akan diungkapkan di sini berlokasi di pedesaan, dimaksudkan untuk inventarisasi dan dokumentasi masalah yang berkaitan dengan sumber alam dan kehidupan sosial budaya penduduk di pedesaan. Disadari bahwa pekerjaan ini amat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan. Namun karena di dorong oleh kebutuhan yang mendesak akan informasi tentang wujud tindakan penduduk pedesaan terhadap tantangan lingkungannya, maka kegiatan ini harus dilaksanakan. Informasi tentang wujud tindakan penduduk itu diperlukan untuk menjawab pertanyaan apakah tindakan mereka sudah mendekati titik optimal bagi keseluruhan kehidupan mereka di lingkungan itu atau belum.

A. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini, di pilih Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan Desa Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Kedua desa ini tidak termasuk pusat pemerintahan kecamatan. Kecamatan Sabbangparu terdiri dari 4 desa,

yaitu Desa Wage, Desa Sompe, Desa Ugi', dan Desa Liu'. Desa yang menjadi ibu kota kecamatan adalah Desa Sompe. Kecamatan Makale terdiri atas 7 desa, yaitu desa Sarira, Desa Bungin, Desa Batupapan, Desa Bombongan, Desa Manggau, Desa Tiromanda, dan Desa Pa'buaran. Desa yang menjadi ibu kota kecamatan adalah Desa Bombongan.

Untuk satu pemerintahan setingkat lebih rendah dari desa di Desa Wage digunakan istilah Kampung, seperti Kampung Celeko (pusat pemerintahan Desa Wage), Kampung Sumpangbaka, Kampung Lampajo, Kampung Massappa, Kampung Bontete'ne, sedang di Desa Batupapan digunakan istilah Rukun Kampung (R.K), seperti R.K. Tarongko, R.K. Lapandang, R.K. Kasimpo, R.K. Kalolok (pusat pemerintahan Desa Batupapan), R.K. Rante, dan R.K. Mamabo.

Kebanyakan penduduk Desa Wage adalah suku bangsa Bugis, sehingga disebut *Desa Bugis*, sedang Desa Batupapan kebanyakan didiami oleh suku bangsa Toraja, maka disebut *Desa Toraja*. Jarak antara dua desa ini sekitar 171 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat sekitar 4 sampai 5 jam, dengan kecepatan rata-rata 45 km/jam, sedang jarak kota Sengkang sebagai ibu kota kabupaten Wajo dengan kota Makale, ibu kota Kabupaten Tana Toraja, sekitar 160 km. Jarak kota Sengkang dari kota Ujung Pandang sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, 192 km melalui kota Camba, sedang jarak kota Makale dari Ujung Pandang, 300 km melalui kota Pare-pare. Desa Wage dan Batupapan terletak di bagian utara kota Ujung Pandang. Desa Wage terletak di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan, sedang Desa Batupapan di tengah-tengah gunung, bagian utara jazirah Sulawesi Selatan.

Topografi masing-masing desa itu sama sekali berbeda. Desa Wage berada di tengah-tengah hamparan tanah datar yang terdiri atas tanah persawahan tadah hujan. Hanya terdapat dua buah bukit rendah yang memanjang ke arah barat-daya. Seding Desa Batupapan, berada di antara perbukitan dan gunung-gunung yang tinggi. Perbukitan yang tersebar di mana-mana dengan arah tidak teratur, ditumbuhi pepohonan beraneka ragam.

B. KERANGKA ACUAN PEMBAHASAN

Masalah pemukiman sesungguhnya adalah masalah lingkungan hidup, atau yang lebih dikenal masalah ekologi. Istilah "ekologi" berasal dari bahasa Yunani "oikos" yang berarti tempat tinggal

atau tempat kediaman. Perkembangan lebih lanjut, istilah ini mencakup pula pengertian penduduk atau isi daerah itu. Dengan demikian, ekologi mempelajari keseluruhan unsur suatu lingkungan, yang senantiasa terdiri atas unsur manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, organisme, dan berbagai unsur lingkungan fisik lainnya, serta hasil kerja manusia. Dewasa ini dikenal ekologi yang membahas alam (natural ecology), ekologi hewan (animal ecology), dan ekologi sosial (human ecology) yang baru kurang lebih 70 tahun yang lalu berkembang. Kemudian perkembangan terakhir dikenal adanya istilah baru, yaitu ekologi budaya (cultural ecology) yang dikembangkan oleh para Antropolog dan lain-lain ahli dari ilmu-ilmu sosial. Ekologi sosial dan ekologi budaya sangat pesat kemajuannya dan mendapat perhatian lebih besar dibanding dengan yang lainnya.

Adapun interaksi yang berlangsung dalam suatu lingkungan pemukiman, sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu (1) penduduk yang berdiam di suatu daerah, (2) perkembangan kebudayaan, (3) adat dan kepercayaan (non material culture), (4) sumber daya alam, dan (5) fungsi-fungsi individu dalam pembagian tugas kemasyarakatan.

Dalam hubungan dengan pemukiman terdapat empat konsep yang saling bergantung secara fungsional, yaitu penduduk, lingkungan fisik-biotik, organisasi sosial, dan teknologi. Penduduk menempati sebuah wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu. Lingkungan fisik-biotik adalah proses dan gejala-gejala fisik dan biotik yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan hidup penduduk, karena merupakan sumber daya yang dapat digunakan bagi kelestarian hidupnya. Organisasi sosial adalah suatu cara penduduk mengintegrasikan diri dan mengatur fungsi-fungsi sosialnya. Dalam unit-unit sosial, seperti keluarga, kekerabatan, dan asosiasi lainnya mereka saling memerlukan. Teknologi merupakan seperangkat kemampuan, idea dan peralatan yang digunakan oleh penduduk untuk memperoleh penghidupan dari lingkungannya.

Apabila ke empat konsep ini dihubungkan satu dengan lainnya, maka tampil sekurang-kurangnya enam macam sistem hubungan sebagai berikut.

(1) Hubungan antara penduduk dengan lingkungan. Lingkungan fisik-biotik (seperti iklim, sawah, minyak bumi, hutan dan hewan) memberi batas terhadap penduduk, sedang penduduk bertindak mengolah lingkungan yang merupakan sumber daya alam

baginya. Apakah potensi sumber daya alam cukup besar, maka akan bertumbuh suatu masyarakat yang mampu menghidupi dirinya sendiri jika penduduknya mampu mengolah sumber daya itu. Saling hubungan antara penduduk dengan lingkungan, tidaklah statis, melainkan dinamis.

(2) Hubungan penduduk dengan organisasi sosial. Penduduk berorganisasi bukan saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dan mengolah lingkungan, melainkan juga bertujuan untuk mempertahankan diri dari ancaman alam atau unsur-unsur dari luar demi kelestarian hidupnya.

(3) Hubungan penduduk dengan teknologi. Adanya kontak langsung dengan lingkungan karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan (seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan rumah) menyebabkan penduduk mengusahakan teknologi (keterampilan, idea, dan peralatan). Bagaimanapun sederhana atau kompleksnya teknologi itu, banyak ditentukan oleh tingkat perkembangan kebudayaannya. Masukan teknologi dari luar komunitas akan berguna, jika tingkat adaptasi penduduk sudah dinamis dan tinggi. Perubahan sistem teknologi penduduk tidaklah mudah, oleh karena amat erat berkaitan dengan unsur-unsur lingkungan dan tradisi. Bagaimanapun miskinnya suatu unsur-unsur lingkungan, teknologi yang tepat dan serasi.

(4) Hubungan organisasi sosial dengan teknologi. Bentuk teknologi yang digunakan oleh penduduk yang bermukim pada suatu daerah, berbeda dengan di daerah lain. Organisasi sosial memegang peranan dalam menerima, menyerap dan mengadaptasi suatu bentuk teknologi hasil inovasi. Organisasi sosial berfungsi membentuk kesamaan dan persamaan dalam memakai, bertindak dan dalam tingkat kesejahteraan. Keinginan untuk sama dan bersama, senantiasa merupakan watak dari komunitas. Teknologi amat banyak memberi sumbangan terhadap peningkatan produksi dan turut mengembangkan budaya kerja penduduk. Adanya teknologi baru, tidak berarti bahwa organisasi yang sudah ada harus mengalami perubahan, bahkan sering pula terjadi bahwa masuknya teknologi baru bersama-sama dengan organisasi sosialnya.

(5) Hubungan lingkungan dengan organisasi. Individu sebagai anggota kelompok masyarakat tidak dapat berhasil baik dalam usahanya kalau menghindarkan diri dari kondisi-kondisi lingkungannya. Bahkan individu yang terikat dalam kesatuan yang disebut suku bangsa sekalipun tidak dapat berhasil baik dalam usahanya

sebagai pengumpul makanan, petani, nelayan, petani garam, pe-
laut, pemelihara ulat sutera dan usaha-usaha yang berhubungan
dengan unsur-unsur lingkungan (seperti jasa angkutan), tanpa me-
nyesuaikan diri dengan lingkungannya.

(6) Hubungan lingkungan dengan teknologi. Penduduk yang
masih sederhana, hidup semata-mata dari pemberian alam, sedang
pada masyarakat yang lebih maju, penduduk mengolah sumber
daya alam dengan memanfaatkan teknologi tertentu. Baik tek-
nologi yang berasal dari dalam komunitas atau datang melalui
difusi, penduduk berhasil mengubah wajah penghidupannya
dengan keterampilan, idea dan peralatan dalam mengolah sumber
daya alam. Perubahan ini membawa perubahan dan perkembangan
kebudayaan melalui suatu proses yang panjang dari satu tingkat
ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hubungan ini, teknologi yang
sifatnya netral, sering digunakan oleh manusia mengelola ling-
kungannya secara semena-mena.

Keempat konsep tersebut di atas dan sistem hubungannya
digunakan oleh para ahli geografi-budaya untuk menyoroti pe-
mukiman penduduk atau sistem hubungan antara penduduk de-
ngan lingkungannya. Cara kerja ini pula yang akan ditempuh da-
lam penulisan ini, meskipun apa yang akan dilukiskan di sini masih
terbatas dan sederhana.

C. LINGKUNGAN PEDESAAN SEBAGAI OBYEK KAJIAN

Berangsur-angsur tumbuh kesadaran tentang pentingnya peng-
kajian lingkungan pedesaan, baik sebagai sumber produksi pangan,
dan daerah yang paling menderita karena bencana alam, maupun
sebagai sumber tenaga kerja yang memenuhi kota-kota. Pem-
bangunan masyarakat desa tidak saja harus dilihat dalam arti fisik,
akan tetapi lebih penting artinya pembangunan itu bila mampu
memberi pengaruh terhadap penduduk tentang arti pemeliharaan
lingkungan demi kelestarian dan keseimbangan ekologi. Oleh ka-
rena pembangunan itu sendiri mengambil wadah dalam lingkung-
an

Alam pedesaan yang relatif masih segar udaranya tidak luput
dari akibat pengrusakan lingkungan alamnya dalam bentuk yang
berbeda dengan di kota. Orang desa menebang hutan dan peng-
gundulan gunung, menyebabkan erosi dan menipisnya sumber-sumber
dan pemiskinan humus. Sering pula dalam bentuk tanah-tanah
longsor menimpa pemukiman-penduduk, akibatnya terjadi mala-

petaka dan kesengsaraan. Pembukaan tanah-tanah hutan tanpa rencana yang mantap, dimaksudkan untuk mencetak persawahan baru atau untuk dijadikan kebun cengkeh, merupakan tindakan penduduk yang sudah lazim. Demikian pula bila penduduk ingin membuka tanah pemukiman, disebabkan meningkatnya kebutuhan tempat kediaman sebagai akibat pertumbuhan penduduk, adakalanya tanpa memperhitungkan kerugian yang akan dialami oleh lingkungannya di kemudian hari.

Tindakan-tindakan yang kurang memperhitungkan keadaan lingkungan, juga dilakukan oleh pihak-pihak yang melaksanakan "modernisasi" dalam pembangunan masyarakat desa. Lewat alasan modernisasi, berbagai macam bentuk teknologi diterapkan dalam pembangunan, tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya, seperti pemakaian pestisida yang dapat menyebabkan polusi yang pada gilirannya akan membahayakan manusia.

Masalah penduduk di pedesaan seperti gejala tetap miskin, kekurangan gizi, tanah pertanian makin sempit bagi tiap kepala keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan kerja di luar pertanian, migrasi keluar dan urbanisasi berlangsung terus, semua itu adalah akibat tindakan-tindakan kurang sempurna pada waktu yang lalu. Kebiasaan anggota masyarakat menebang kayu untuk kayu bakar masih berlangsung, dibarengi lagi oleh kegairahan menanam tumbuhan pekarangan atau tanaman industri, tampaknya masih rendah.

Dilain pihak, berbagai macam barang dan peralatan mewah memasuki pedesaan. Anggota masyarakat berlomba memilikinya sehingga terjadi pergeseran pola konsumsi yang kadang kala cenderung menampilkan pola hidup mewah sebagian anggota masyarakat dan sebagian lagi tidak mampu memperoleh barang-barang tersebut. Akibatnya tampak jurang pemisah antara mereka yang kaya dan yang miskin. Masuknya berbagai macam barang, termasuk peralatan rumah tangga, menyebabkan industri rumah tangga seperti anyam-anyaman dan tenunan mengalami pergeseran. Wanita-wanita yang tadinya mengerjakan pekerjaan tersebut untuk membantu suaminya menambah penghasilan, sekarang sudah menghilang.

Modernisasi pertanian, seperti perbaikan cara kerja dengan menggunakan traktor-mini, pemakaian pupuk dan sebagainya, bahkan dapat meningkatkan pendapatan dan penghasilan untuk anggota masyarakat, karena tidak sebanding antara biaya produksi

dengan harga beras yang dikelola dengan cara modern tersebut, sehingga ada diantaranya yang tidak mau membayar harga pupuk atau mengembalikan kredit yang dipinjamnya untuk mengolah tanah. Membahas masalah pedesaan tidak dapat terlepas dari masalah petani dan tanah pertaniannya. Bagi petani, tanah adalah modal utama dan menentukan jalannya kesejahteraan hidup. Memiliki tanah bukan saja sebagai tujuan atau sebagai faktor produksi, akan tetapi lebih jauh daripada itu, yakni memiliki tanah berarti memiliki suatu status sosial dan memperoleh pandangan terhormat dari anggota masyarakat.

Demikian penilaian penduduk terhadap tanahnya akhir-akhir ini makin meningkat. Makin banyak orang memikirkan tanah, makin tinggi nilai tanah tersebut. Dewasa ini demikian halnya, mungkin disebabkan karena lajunya pembangunan di segala bidang, ditambah dengan makin pesatnya pertambahan penduduk, sedang luas dan jumlah bidang tanah tidak bertambah. Akibat langsung yang dirasakan sekarang ini sebagai kenyataan, ialah timbulnya berbagai macam masalah sosial, ekonomi, hukum, politik, demografi, dan budaya. Kalau demikian, secara rasional dapat dikatakan bahwa tanah dari segi tertentu adalah keramat (Schumacher; 1979 : 101).

Dalam masyarakat pedesaan, terdapat kecenderungan sekelompok kecil orang memiliki tanah luas, sedang yang lainnya makin sempit. Petani yang pekerjaan pokoknya adalah pertanian, karena berbagai hal mereka sering menjual tanahnya sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Yang paling banyak membeli adalah pegawai atau orang kota. Kebutuhan uang tunai bagi petani sewaktu-waktu mendesak bilamana mereka ingin mengadakan pesta perkawinan atau upacara pemakaman keluarganya, ataupun kebutuhan untuk menyetor ongkos naik haji. Di lain pihak, pegawai berangsur-angsur berada dalam standar hidup lebih baik daripada petani, terutama pegawai yang memegang posisi penting dengan segala fasilitas. Mereka membeli tanah sebagai simpanan untuk masa pensiun.

Pada umumnya, tanah pertanian baik sawah maupun tanah kering yang diperoleh dari warisan berada di bawah batas minimum. Selanjutnya terjadi pemecahan pemilikan tanah pertanian di pedesaan karena perbuatan hukum, yaitu (a) jual beli bebas, dan (b) pembagian warisan. Sesuai dengan adat-istiadat, khususnya orang Bugis dan Makasar, tanah harus diwariskan kepada anak

setelah berumah tangga, berarti pemecahan tanah pertanian akan berlangsung terus secara turun temurun. Jika para ahli waris itu tidak berusaha menambah jumlah bidang tanahnya, maka akan berakhir dengan sempitnya usaha pertanian. Usaha mencegah pemecahan tanah dengan pembagian warisan itu, tidak dapat dilakukan, oleh karena itu diadakan musyawarah di antara para ahli waris untuk menghindari sengketa.

Mungkin akibat tantangan tak kentara atau tidak langsung terhadap masyarakat desa, ialah munculnya gejala sosial dalam bentuk sengketa tanah yang dewasa ini terdapat di setiap daerah Tingkat II, dengan banyaknya sengketa itu memenuhi acara-acara di pengadilan. Hal ini adalah akibat keserakahan untuk memiliki kekayaan dalam bentuk tanah demi menempuh pola hidup yang mewah. Berbeda halnya dengan waktu-waktu sebelum modernisasi dan ekonomi uang memasuki pedesaan, kehidupan yang diwarnai oleh solidaritas dan harmonis tampak terjalin secara utuh. Sengketa tanah itu bersumber pada pembagian warisan, penggadaian tanah, dan jual beli tanah yang kadang-kadang tidak jelas statusnya.

Fungsi tanah (sawah), harus dilihat dari segi sosial ekonomi dan sebagai penjaga martabat seseorang, yaitu menghindari diri dari "siri". Jika ada keperluan mendadak yang tidak dapat dilakukan, maka tanah dilepaskan sebagai jaminan. Oleh karena itu orang Bugis dan orang Toraja senantiasa mencita-citakan memiliki tanah, meskipun dalam ukuran yang sempit. Memiliki tanah merupakan kebanggaan. Bagi orang Toraja, memiliki *tedong* (kerbau) merupakan kebanggaan tersendiri.

Masalah tanah dan sengketa tanah sengaja disoroti dalam uraian ini karena merupakan tindakan penduduk terhadap tantangan lingkungannya dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu hidupnya. Uraian tersebut di atas ini, belum secara menyeluruh membahas masalah lingkungan pedesaan. Ini arti bahwa masalah pedesaan perlu dikaji lebih jauh dan mendalam oleh berbagai bidang keahlian.

Laju pembangunan pedesaan dewasa ini lebih cepat daripada masa-masa sebelumnya. Usaha-usaha menembus rintangan dan isolasi desa yang terpencil dilakukan dengan pembuatan jalan desa dan jalan daerah. Usaha lain yang juga sudah berhasil adalah peningkatan modal usaha, pembangunan stasiun relay televisi, proyek lomba desa, pemugaran lingkungan, proyek kesinambungan

bagi peranan wanita, dan sebagainya. Pemasukan teknologi (ke-terampilan, idea dan peralatan) yang baru di pedesaan, merangsang kehidupan pedesaan dan sekaligus pula mengundang tantangan dan partisipasi. Hal itu bukan saja membuka isolasi batas-batas wilayah, melainkan memperluas cakrawala pengetahuan dalam kehidupan praktis.

Volume pembangunan meningkat dan meluas sampai menyentuh berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, perubahan dapat terjadi pada kebudayaan materiil dan ikatan keluarga. Ikatan keluarga sudah mulai longgar tetapi tradisi lingkungan keluarga masih tetap berpengaruh. Pendidikan keluarga seperti sedia kala tidak terlalu berperanan lagi, mungkin karena terlalu lajunya pendidikan formal, dibarengi kesibukan para anggota keluarga mengurus kesejahteraan, sehingga kurang waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Kebiasaan lama sudah mulai ditinggalkan, seperti upacara-upacara lingkaran hidup (*life cycle*). Benda-benda keramat sudah mulai dilihat secara kritis.

Tindakan penduduk dalam menjawab tantangan pembaharuan itu dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu, (a) mereka yang menjawab tantangan itu dengan gairah dan optimis, serta turut berpartisipasi. (b) mereka yang diam-diam saja, tanpa menunjukkan penolakan dan partisipasinya, dan (c) mereka yang tidak tahan atas pembaharuan itu, tanpa menyatakan penolakannya, tetapi menghindar dari tantangan itu dengan jalan meninggalkan pemukimannya atau migrasi ke luar ke daerah lain bahkan ke propinsi lain.

Kelompok pertama, adalah mereka yang sadar tentang perubahan itu dan biasanya terdiri atas orang-orang yang memiliki pendidikan atau mereka yang sudah melalui pendidikan formal. Selain itu, terdapat pula orang-orang pemangku adat yang diikuti sertakan dalam pembaharuan, karena adanya posisi dan peranan atau karena suatu kesempatan. Kelompok kedua, adalah mereka yang tidak perdulikan perubahan, apa saja yang datang diikutinya sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga tidak apatis dan tidak pula aktif berpartisipasi dalam pembaharuan. Orang-orang yang berada dalam kelompok ini, bisa saja orang berpendidikan dan bisa pula orang yang tidak mempunyai pendidikan. Sebagian di antaranya, terdiri atas orang yang dahulunya pemimpin atau orang berpengaruh di kalangannya, sekarang tidak diikuti lagi. Ada kala-nya orang seperti ini menolak keadaan yang tidak sesuai dengan

rasa budayanya menurut pola-pola lama, akan tetapi dapat pula mereka mendukung apabila mereka diberi peranan atau fasilitas, meskipun bertentangan dengan rasa hati nuraninya. Pada lazimnya kelompok ini melihat-lihat dulu perkembangan, untuk menghindari sanksi sosial baginya. Kelompok ketiga, adalah mereka yang menghindari, karena tidak tahan menderita di daerahnya sendiri, maka mereka mengambil keputusan untuk migrasi ke luar, dengan harapan di daerah lain memperoleh penghidupan yang lebih baik. Biar menderita di negeri rantau, asal tidak dilihat oleh teman dan tetangganya. Mereka bermigrasi, mungkin tidak disebabkan semata-mata oleh persaingan atau karena latar belakang ekonomis, tetapi sebagiannya karena tidak tahan atas banyaknya aturan dan perintah dari pemimpin desa, banyaknya kerja massal di desanya, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan mata pencahariannya sendiri, apalagi dengan penerapan teknologi pertanian yang tidak mampu dikembalikan biaya-biayanya.

Watak orang Bugis dan orang Toraja, bila memperoleh tantangan, baik yang bersifat lahir atau bathin, akan tampil tiga macam wujud tindakan, yaitu *ikut serta (mendukung), diam dan pergi, atau membangkang*. Andaikata bukan karena peranan agama dan kepercayaan yang mereka anut, kedua suku bangsa ini akan menolak segala macam pembaharuan yang merusak tradisinya, oleh karena menurut keyakinan mereka, adat-istiadatlah yang membentuk kita jadi manusia. Lebih tegas lagi orang Wajo mengatakan "*marade to wajoe, ade' nami napopuang*" (merdekalah orang Wajo, hanya adatnya saja yang dipertuan). Orang Bugis taat menganut Agama Islam dan antara adat dan Agama sudah terjalin amat erat dalam kehidupan sosial. Demikian pula orang Toraja, di samping mereka sebagian beragama Kristen, masih sebagian besar menganut kepercayaan Aluk Todolo yang amat ditaati dan mereka rela berkorban atas penyelenggaraan ritual-ritualnya.

D. MASALAH

Untuk melihat masalah yang menyangkut pemukiman penduduk di bawah ini dikemukakan beberapa kenyataan.

1. *Masuknya sistem pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial.* Pengatahuan masyarakat meningkat setelah diadakan gerakan Pemberantasan Buta Huruf, karena dengan demikian idea dan konsep baru dengan mudah diperkenalkan. Pembangunan S.D. Inpres pada tiap desa di-

tambah dengan rangsangan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan pengetahuan anggota masyarakat. Suatu gejala yang menonjol sekarang ini di bidang pendidikan, ialah ratusan anak-anak umur sekolah tidak tertampung masuk S.D. dan remaja dari desa berduyun-duyun memasuki perguruan tinggi.

Teknologi pertanian, seperti pemakaian pupuk, penyemprotan hama, pemakaian bibit unggul menggantikan bibit lokal, pemakaian mesin Huller untuk mengolah gabah jadi beras, pembuatan irigasi semi-teknis, pengelompokan petani pemakai air (P3A), penggunaan motor tempel pada perahu nelayan, penjualan hasil-hasil produksi padi kepada BUUD/KUD. dan pembimbingan/penyuluhan tentang cara-cara kerja yang baru, merupakan tantangan bagi penduduk pedesaan.

Pada mulanya, yaitu pada PELITA I, idea, konsep, dan cara-cara kerja baru itu belum mendapat sambutan, namun hal itu berangsur-angsur diikuti oleh anggota masyarakat setelah mereka melihat berangsur-angsur diikuti oleh anggota masyarakat setelah mereka melihat manfaatnya dan kegunaannya yang langsung memenuhi kebutuhan mereka. Tidak semua cara-cara kerja baru itu segera diikuti, karena tidak sesuai dengan kondisi setempat. Sering terjadi bahwa pelaksanaan menerapkan cara kerja yang sama pada masyarakat yang berbeda-beda. Hambatan itu bersumber pada kesalahan pelaksana menerapkan sistem teknologi tersebut, disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang kehidupan sosial budaya masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai pemakaian pupuk. Penggunaan pupuk bertujuan menaikkan produksi pertanian. Dalam kenyataan, memang produksi dapat bertambah, akan tetapi pendapatan bersih petani setelah dikalkulasi, ternyata hampir sama dengan pendapatan kalau tidak menggunakan pupuk dan cara-cara kerja baru, karena harga pupuk dan konsekwensi penggunaan cara-cara kerja baru itu memerlukan juga biaya yang semuanya harus dikeluarkan dari hasil produksi, sehingga pendapatan bersihnya sama saja. Hal ini dapat terjadi, mungkin karena orientasi pembangunan desa yang menganggap bahwa petani sebagai obyek untuk memproduksi lebih banyak, tanpa memperhatikan nasib mereka. Pada hal tujuan pembangunan masyarakat desa adalah menolong penduduk pedesaan untuk membantu diri mereka sendiri. Adopsi dan adaptasi segi-segi teknologi bagi orang Bugis dan orang Toraja tidak terlalu banyak dipersoalkan, sepanjang teknologi itu tidak merusak adat dan ke-

percayaannya, serta tidak merugikan hasil kerjanya.

Pelaksanaan Bimas/Inmas dan BUUD/KUD, sudah berhasil menggerakkan partisipasi sebagian masyarakat dan meningkatkan produksi, tetapi belum dapat menjangkau petani secara wajar. Disadari bahwa perbaikan kehidupan petani, bukan saja menyangkut faktor teknologi, melainkan juga masalah pemilikan tanah yang pada umumnya sempit-sempit, sistem bagi hasil, pemasaran, mata pencaharian sampingan, dan biaya produksi.

2. *Perbaikan transportasi dan komunikasi.* Perbaikan sarana transpor amat menonjol di pedesaan. Pemukiman yang terpencil sudah dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat atau roda dua, sehingga mungkin dapat dikatakan, bahwa tidak ada lagi penduduk di pedalaman yang tidak pernah mengunjungi pusat-pusat pelayanan di ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan, bahkan para remaja kadangkala pulang balik mengunjungi ibu kota propinsi. Di Tana Toraja, kemajuan ini tampak sekali dengan adanya jalanan yang menembus celah-celah gunung menghubungkan pemukiman-pemukiman. Di kabupaten ini terdapat sekitar 300 buah kendaraan angkutan barang dan penumpang beroperasi antara desa dengan kota atau antara desa dengan desa. Dibanding dengan jumlah penduduk kabupaten ini, maka ada 10% jumlah pengangkutan yang dimiliki oleh penduduk setempat dan selebihnya berasal dari Ujung Pandang.

Media massa, seperti radio, televisi dan surat kabar sudah banyak di pedesaan. Di desa-desa orang Bugis, 40% dari jumlah rumah tangga sudah memiliki radio, sedang di desa-desa orang Toraja, mencapai 25%. Mereka lebih suka mendengar lagu-lagu daripada warta berita. Kalau mereka inginkan warta berita, maka dari radio Australia yang mereka peroleh karena lebih jelas terdengar.

Beberapa stasiun relay televisi baru saja dibangun di Sulawesi Selatan, sehingga tindakan dan anggapan penduduk belum dapat dicatat secara jelas, namun kegairahan penduduk dan keinginan untuk memiliki sebuah televisi agaknya menjadi ukuran terhadap prestise sosial seseorang. Mereka sering berkunjung ke kota besar (Ujung Pandang dan Pare Pare) dan menyaksikan siaran TV. Selain warta berita, mereka memperoleh juga beberapa pengetahuan tentang daerah lain melalui televisi. Melalui wawancara diketahui bahwa agaknya masyarakat pedesaan sudah mulai terbuka dan berpikir kritis, mirip dengan alam pikiran orang kota. Hal ini sebagai suatu tanda bahwa pengaruh TV di pedesaan sangat pesat dan per-

lahan-lahan mengubah sikap hidup mereka. Selain TV yang dimiliki oleh penduduk mulai dari Ujungpandang ke Utara sampai ke kota Enzekang, sedang dari Ujung Pandang ke Selatan sampai ke Kota Bulukumba. Kabupaten yang belum ialah Palopo, Tana Toraja, Polewali, Mandar, dan Mamuju. Pemerintah sudah merencanakan untuk mendirikan stasiun relay di semua kabupaten.

Surat kabar yang memasuki pedesaan, antara lain *Bina Baru*, *Pedoman Rakyat*, *Angkatan Bersenjata*, *Mimbar Karya* dan *Suara Karya*. Semua surat kabar ini diterbitkan di Ujungpandang, sedang surat kabar *Kompas* dan *Sinar Harapan* yang terbit di Jakarta belum sampai di pedesaan.

3. *Proyek kesinambungan, P.K.K., Keluarga Berencana, dan Proyek 4K (Kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban)*. Semua Proyek ini telah dilancarkan tahap demi tahap. Berangsur-angsur terjadi perubahan, baik tingkah laku anggota masyarakat maupun perubahan sikap hidup. Namun perkembangannya agak lambat, karena faktor kemiskinan yang mempengaruhi kemampuan tiap anggota keluarga untuk mentaati peraturan dalam Proyek ini. Sebagian hambatan datang dari sistem kepercayaan yang dianutnya. Kepercayaan yang berasal dari suatu aliran keagamaan itu mengatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan dan segala sesuatunya berasal dari Dia dan kembali kepada-Nya. Apapun kita perbuat, semuanya ditetapkan dan ditentukan olehNya.

Proyek kesinambungan menganjurkan kebersihan, ketertiban, dan pemanfaatan pekarangan. Mereka menyadari kegunaannya, tetapi pelaksanaannya belum berhasil sepenuhnya sebagaimana contoh di bawah ini. Berbagai kepala keluarga melaksanakan peraturan-peraturan itu bila kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi, tanpa berusaha memiliki cara pencapaian kebutuhan pokok. Berbagai rumah tangga sudah diberikan bantuan dalam pembuatan jamban keluarga, tetapi sebagian besar tidak menggunakannya karena dianggapnya bahwa lingkungan alam masih mampu membuat *recycling* (daur balik) tinja-tinja yang dibuang secara serampangan.

Ketiga unsur yang memasuki pedesaan tersebut, selain mewujudkan rangsangan dan tantangan, tampak pula menimbulkan kecenderungan ke arah persaingan bebas dan memberikan penilaian yang tinggi kepada hal-hal yang bersifat materi. Kecenderungan itu tampak pada sesuatu yang menjadi interest mereka, seperti penghormatan kepada orang yang memiliki kekayaan, yang me-

miliki jabatan beserta fasilitasnya, orang yang memiliki benda-benda mewah, dan orang yang mempunyai tanah pertanian yang luas.

Persoalan kita sekarang adalah *bagaimana pengembangan pedesaan itu harus dibarengi oleh kegiatan dinamisasi nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga dapat meratakan jalan respons mereka terhadap setiap tantangan lingkungan dengan tepat serta sejauh mana pembangunan pedesaan telah mengaitkan diri dengan usaha ke arah keseimbangan lingkungan. Karena usaha itu bertujuan untuk melestarikan eksistensi manusia, maka diperlukan suatu lingkungan alami yang memungkinkan manusia dapat bertahan sebagai insan di samping juga untuk dapat tetap memelihara kebudayaannya.* Oleh karena itu lingkungan pemukiman perlu mendapat perhatian yang serius.

Semua masalah tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi *bagaimana kualitas lingkungan yang paling optimum bagi suatu pemukiman, sehingga lingkungan pemukiman itu dapat memelihara nilai-nilai yang manusiawi bagi penghuninya.* Selanjutnya dipertanyakan, *bahwa pola pedesaan manakah yang sesuai dengan kemajuan dan yang dapat menguasai perkembangan sistem pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil kerja manusia sendiri, agar bahaya buatan manusia itu dapat dihindari, untuk mengurangi degradasi martabatnya.* Semuanya ini merupakan dorongan untuk inventarisasi dan dokumentasi pola pemukiman di Sulawesi Selatan.

E. TUJUAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka diusahakan meng-himpun data dalam lokasi penelitian, yaitu pada dua buah desa. Diharapkan dari dua buah desa ini akan tergambar dua macam pola pemukiman yang mungkin berbeda satu dengan lainnya, disebabkan karena perbedaan geografis, sosial budaya, dan intensitas tantangan yang dialaminya. Disadari pula bahwa pada segi-segi tertentu terdapat persamaan karena rangsangan bagi pembangunan yang terjadi di pedesaan berasal dari satu sumber, yaitu pemerintah pusat.

Pembahasan masalah pemukiman, akan menyangkut aspek hubungan kekerabatan, pelapisan sosial, aspek kesejahteraan penduduk, kepemimpinan, religi, struktur lapangan kerja, dan lain-lain yang menyangkut nilai-nilai yang dihormati oleh lingkungan

pemukiman tersebut. Memang alam pedesaan sebagai bentuk pemukiman tradisional dengan segala aspek yang tersembunyi di dalamnya, menarik untuk dikaji.

Pengkajian lingkungan pemukiman secara optimal, yaitu dengan memperhatikan semua aspek tersebut di atas, tentu saja memerlukan penelitian yang meluas dan mendalam. Oleh karena itu sebagai langkah awal akan diinventarisasi tanggapan penduduk yang berwujud tindakan terhadap tantangan lingkungannya, yang tercermin pada kehidupan sosial budaya.

F. PROSEDUR INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI

Tugas inventarisasi dan dokumentasi diterima sejak *Term of Reference* (TOR) diterima dalam bulan Agustus 1980. Sejak itu pula, TOR tersebut dipelajari dan dinilai kemungkinan pelaksanaannya dan diadakan persiapan-persiapan, seperti tertera di bawah ini :

1. Tanggal 24 s/d 31 Agustus 1980 diadakan penjajahan pendahuluan ke Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Wajo untuk menetapkan desa yang akan menjadi lokasi penelitian.
2. Tanggal 1 s/d 7 September 1980, diadakan persiapan untuk penelitian lapangan, antara lain bahan-bahan pedoman wawancara dan pembatasan ruang lingkup yang akan diamati.
3. Tanggal 8 s/d 14 September 1980, berkunjung ke Kabupaten Wajo dan langsung ke Desa Wage sebagai desa yang telah dipilih untuk penelitian.
4. Tanggal 15 s/d 21 September 1980, penyusunan dan klasifikasi data yang telah diperoleh pada kunjungan pertama di Desa Wage.
5. Tanggal 22 s/d 28 September 1980, berkunjung ke Kabupaten Tana Toraja dan langsung ke Desa Batupapan.
6. Tanggal 29 – 30 September dan 1 s/d 5 Oktober 1980, penyusunan dan klasifikasi data yang diperoleh dari Desa Batupapan pada kunjungan pertama.
7. Tanggal 6 s/d 26 Oktober 1980, berkunjung kedua kalinya ke Desa Wage.
8. Tanggal 27 s/d 31 Oktober 1980, pengolahan data, pembuatan Tabel dan peta, serta diskusi bersama anggota tim.
9. Tanggal 1 s/d 23 Nopember 1980, berkunjung kedua kalinya ke Desa Batupapan.
10. Tanggal 24 s/d 30 Nopember 1980, pengolahan data, pembuat-

an tabel dan pembuatan peta bersama-sama dengan anggota tim.

11. Tanggal 1 s/d 7 Desember 1980, diskusi bersama anggota tim untuk menilai hasil pengolahan data dan dimulai membuat konsep dasar Bab I sesuai apa yang tercantum dalam TOR.
12. Tanggal 8 s/d 21 Pembuatan konsep berupa ketikan Bab II, kemudian kedua bab ini dievaluasi kembali.
13. Tanggal 22 s/d 31 Desember 1980 dan 1 s/d 4 Januari 1981, pembuatan konsep laporan Bab III dan selanjutnya pula dibuat konsep laporan pada tanggal berikutnya untuk Bab IV.
14. Tanggal 19 s/d 29 Januari 1981 pengetikan sheet, penyusunan dan penjilidan laporan.

G. PEMILIHAN DESA PENELITIAN

Dua desa yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian ialah Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan Desa Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Tujuan inventarisasi dan dokumentasi melalui penulisan *Pola Pemukiman* adalah mengungkapkan ciri-ciri sosial budaya pedesaan, terutama tantangan lingkungan pedesaan dan respons penduduk terhadap tantangan itu. Karena itu penelitian ini dipusatkan pada dua desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kedua desa tersebut terletak di Jalan Poros yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan dan fasilitas, misalnya Desa Wage terletak antara kota Sengkang (ibu kota Kabupaten Wajo) dan kota Watangsoppeng (ibu kota kabupaten Soppeng). Demikian pula desa Batupapan terletak diantara lalu lintas antara kota Makale (ibu kota Kabupaten Tana Toraja) dan Kecamatan Saluputi. Lalu lintas melalui Desa Batupapan dari Makale ke Rantepao, tempat lapangan terbang perintis.
2. Kedua desa ini termasuk desa swakarya. Suatu klasifikasi desa yang dibuat oleh instansi Pembangunan Masyarakat Desa (Bangdes), bahwa desa swakarya adalah setingkat lebih maju daripada desa swadaya dan setingkat lebih rendah dari desa swasembada. Syarat ini diperlukan untuk melihat tingkat perkembangan desa, bahwa desa swakarya mempunyai ciri-ciri penduduk yang sudah mengalami pengaruh pembaharuan. Administrasi desa sudah mulai teratur dan mempunyai prasarana ekonomi seperti irigasi, jalan, jembatan, lumbung desa, dan pasar desa. Kehidupan penduduk masih menunjukkan cara-

- cara tradisional dan sedikit sudah mulai menunjukkan cara hidup baru, ditandai dengan keberhasilan, kerapihan dan keindahan.
3. Jarak antara ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan tidak terlalu jauh. Lokasi Desa Wage, 6 km dari Sengkang, dan 6 km dari Salojampue (ibu kota Kecamatan), sedang Desa Batupapan, 5 km dari Makale, dan 23 km dari Rantepao (sebagai kota kedua di Tana Toraja). Jarak ini perlu diperhitungkan dari kota-kota besar, oleh karena kota-kota itu merupakan pusat pelayanan dan fasilitas, sekaligus pula sebagai pusat datangnya tantangan atau idea pembaharuan. Jarak ini cukup berarti bagi masyarakat pedesaan menurut ukuran desa yang disesuaikan dengan fasilitas pengangkutan dan sarana jalanan. Kedua desa ini tidak termasuk kota kecamatan.
 4. Kedua desa itu memiliki sumber daya alam yang memadai. Di kedua desa ini terdapat daerah persawahan, perkebunan, dan tanah pertanian yang masih potensial. Kedua desa ini dilalui oleh sungai. Desa Wage oleh Sungai Salojampue, sedang Desa Batupapan oleh Sungai Sadang. Sebagaimana Desa Wage terdiri atas Danau Tempe.
 5. Lapangan kerja yang utama penduduk kedua desa tersebut adalah pertanian. Untuk pengolahan, terutama pada pra panen, digunakan tenaga keluarga, sedang pada waktu panen digunakan tenaga luar keluarga atas dasar bantu membantu. Lapangan kerja sampingan masih terbatas jumlahnya.
 6. Kedua desa ini sudah menjalankan sistem panca usaha tani, Bimas/Inmas, Proyek Kesenambungan bagi peranan Wanita, dan P.K.K. Demikian pula dalam bertani sudah menggunakan varitas bibit unggul. Semua kegiatan ini merupakan tantangan penduduk untuk merubah sistem pertaniannya yang berarti harus membaharui cara kerjanya dan cara hidupnya. Proyek-proyek tersebut langsung berfungsi sebagai indikator bagi tantangan penduduk untuk pembaharuan. Cara hidup sehat, tertib, indah dan pemanfaatan lingkungan alam dijalani lewat Proyek Kesenambungan. Proyek ini merupakan indikator bagi pengaturan pemukiman.

H. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan dan masalah yang dikemukakan di atas, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut :

1. Teknik Pengkajian pustaka, yaitu pengumpulan data, kerangka masalah, dan berbagai pendapat terutama yang berhubungan dengan masalah pedesaan.
2. Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan anggota masyarakat.
3. Teknik wawancara, yaitu suatu bentuk dialog dengan informan. Yang terdiri dari informan kunci dan informan ahli. Informan kunci terdiri atas pejabat kantor/dinas, Kepala Desa, dan pemuka-pemuka kampung, sedang informan ahli terdiri atas para ahli adat (Tominaa: Toraja; dan Pallontara : Bugis), petani yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai tani, dan guru Sekolah Dasar yang sudah berdiam selama 5 tahun di desa tersebut. Selain itu, wawancara dilakukan pula terhadap mereka yang telah mengalami Proyek Kesenambungan sebanyak 30 buah Kepala Keluarga dan mereka yang turut mengurus masalah Bimas/Inmas atau anggota koperasi.

B A B II

TANTANGAN LINGKUNGAN

A. LOKASI

1. Desa Wage

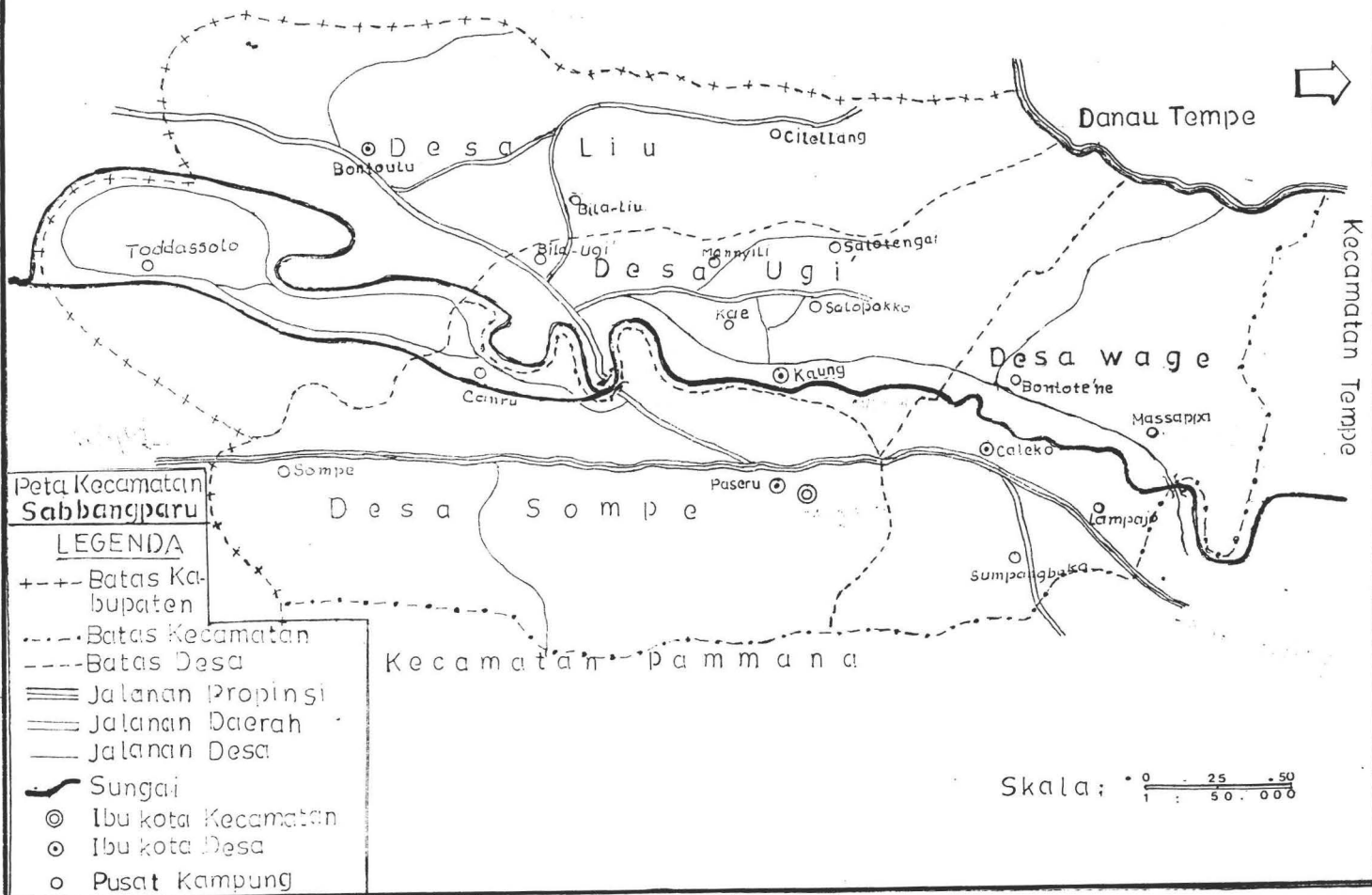
Desa Wage berada di bagian utara Kecamatan Sabbangparu, dan berbatasan dengan Kecamatan Tempe di sebelah utara, Kecamatan Pammana di sebelah timur, Desa Sompe dan Desa Ugi' di sebelah selatan, dan Danau Tempe di sebelah barat. Kecamatan Sabbangparu sendiri terletak di pinggir bagian selatan Kabupaten Wajo dan berbatasan dengan Kabupaten Bone di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Soppeng di sebelah barat seperti tergambar pada Peta 1, yaitu Peta Kecamatan Sabbangparu.

Jarak Desa Wage dari kota Sengkang sebagai ibu kota Kabupaten Wajo sekitar 6 km, sedang jaraknya dari Salojampue, ibu kota Kecamatan Sabbangparu, sekitar 6 km juga. Hubungan jalan dari Sengkang ke Watasoppeng sebagai ibu kota Kabupaten Soppeng sejauh 42 km, melalui Desa Wage. Sekitar 23 km sebelah barat Wage, terletak kecamatan Cabbengnge (Kabupaten Soppeng) yang ramai dikunjungi orang karena terkenal sebagai tempat industri tembakau rakyat. Desa Wage yang dibagi dua oleh jalanan propinsi dari Ujung Pandang ke Sengkang, merupakan salah satu jaringan jalan perekonomian yang ramai di Sulawesi Selatan. Kecamatan Sabbangparu mempunyai 4 (empat) buah desa dan 18 (delapan belas) buah kampung. Distribusi desa dan kampung dalam kecamatan ini, dapat dilihat dalam Tabel II – 1.

**Tabel II – 1. DISTRIBUSI DESA DAN KAMPUNG DALAM
KECAMATAN SABBANGPARU, KABUPATEN WAJO
(Th. 1979)**

D e s a	Luas wilayah (Km ²)	Nama Kampung
1	2	3
1. W a g e	37,57	a. Caleko b. Sumpangbaka

K A B U P A T E N S O P P E N G



Peta No. 11. Pembagian Desa-Desa Di Kec. Sabbangparu,
 Sumber: Kantor Kecamatan Sabbangparu, th. 1980.



1	2	3
2. S o m p a	25,23	c. Lampajo d. Massappa e. Bontote'ne a. Paseru b. Canru c. Sompe
3. U g i '	30,80	a. Salotonga b. Salopokko' c. Kaung d. Mannyili e. K a o f. Fila-Ugi'
4. L i u	37,77	a. Bontoulu b. Bila-liu c. Cilellang d. Toddassolo'

Sumber : a. Kantor Kecamatan Sabbangparu
b. Kantor Sensus dan Statistik Dati II Wajo

Sejarah perkembangan Desa Wage tidak terlepas dari sejarah perkembangan Kabupaten Wajo. Dalam tahun 1952 semasa R. Su-
diro sebagai Gubernur Sulawesi, daerah Sulawesi Selatan yang oto-
nom itu dibubarkan oleh pemerintah pusat, kemudian dibentuk
tujuh buah daerah otonom. Salah satu diantaranya adalah daerah
Bone yang meliputi kerajaan-kerajaan (swapraja) Bone, Wajo dan
Soppeng. Daerah otonom Bonne memiliki tiga badan pemerintaha-
an, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggota-
nya sebanyak 35 orang, diantaranya 12 orang berasal dari Wajo,
Kepala Daerah, dan Dewan Pemerintah Daerah (DPR) yang ang-
gotanya terdiri dari 5 orang, salah satu dari padanya berasal dari
Wajo.

Awal tahun 1954, baik di Wajo maupun di Soppeng timbul
gerakan dari kalangan rakyat yang ingin berdiri sendiri sebagai
daerah otonom setingkat dengan kabupaten. Tiga tahun kemudian,
yaitu dalam tahun 1957 pemerintah pusat memperkenan tuntutan
kedua daerah tersebut, dan masing-masing daerah berdiri sebagai

daerah otonom Tingkat II, berarti berakhirilah bentuk pemerintahan swapraja.

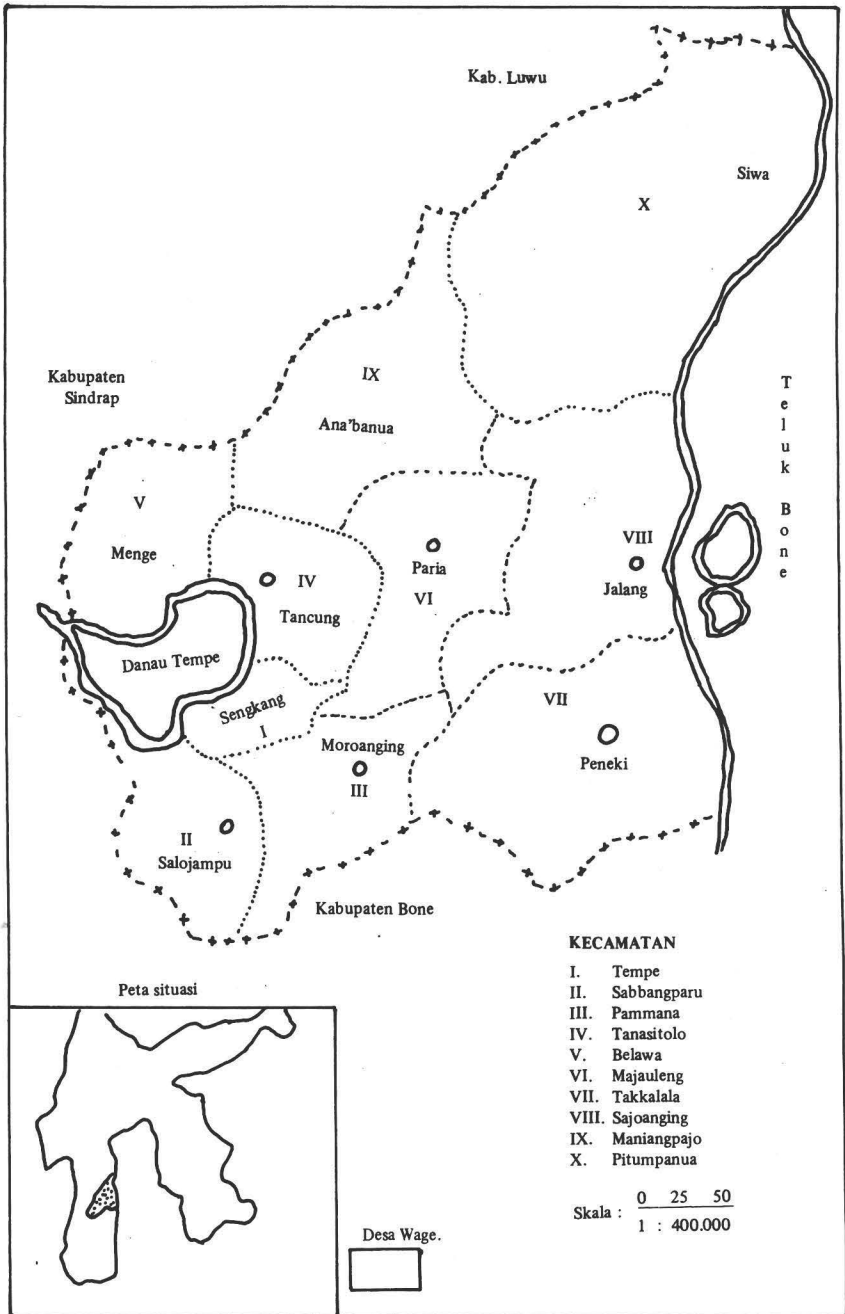
Sampai tahun 1960, daerah Wajo, masih terbagi atas 20 buah persekutuan hukum yang disebut *Wanua*. Diantaranya Wanua Wage dan Wanua Ugi' yang sekarang ini menjadi salah sebuah Desa dalam Kecamatan Sabbangparu. Pada permulaan tahun 1961, daerah Wajo mengalami perubahan struktur pemerintahan, ialah dengan pembentukan kecamatan-kecamatan. Mulai pada waktu itu daerah Wajo terdiri atas 10 buah kecamatan, antara lain Kecamatan Sabbangparu yang meliputi bekas Wanua Pammana, Wanua Liu', Wanua Ugi' dan Wanua Wage. Selanjutnya Kecamatan Pammana, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Belawa, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Pitumpuana.

sampai perubahan struktur pemerintahan daerah Wajo dalam tahun 1961, tetap dikuasai secara turun-temurun oleh seorang Raja yang bergelar Arumpage. Wanua Wage termasuk salah satu anggota federasi Kerajaan Wajo. Bangsawan di Kerajaan pusat senantiasa menjalin hubungan kekerabatan dengan kerajaan bawahan anggota federasi antara lain melalui perkawinan, agar tercipta suasana pemerintahan yang dinafasi oleh kekeluargaan.

Desa Wage terletak di pinggir bagian selatan Kabupaten Wajo, menghadapi pinggir Danau Tempe bagian tenggara dan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. (Lihat Peta Kabupaten Wajo). Kecamatan Sabbangparu yang luasnya 131.37 Km², termasuk salah sebuah kecamatan yang sempit di Kabupaten Wajo di samping Kecamatan Tempe yang memang termasuk wilayah kota. Kabupaten Wajo memiliki 10 (sepuluh) buah kecamatan dan 56 buah Desa. Gambaran mengenai jumlah kecamatan dan luasnya, dapat dilihat dalam Tabel II - 2.



Map of the Lake Basin of the State of California, showing the contour lines and the location of the Lake Basin.



Peta 2 KABUPATEN WAJO PROPINSI SULAWESI SELATAN
 Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kab. Wajo.

**Tabel II – 2 DISTRIBUSI KECAMATAN, LUAS DAN
IBU KOTANYA DI KABUPATEN WAJO, SULAWESI SELATAN
(Tahun 1979)**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Nama Ibu Kota
1. Tempe	38,01	Sengkang
2. Tanasitolo	153,94	Tancang
3. Maniangprajo	323,44	Anabanua
4. Belawa	173,25	Menge
5. Sabbangparu	131,37	Salojampu
6. Pammana	155,22	Maroanging
7. Majauleng	230,79	Paria
8. Takkalalla	352,76	Wt. Peneki
9. Sajoanging	320,70	Jalang
10. Pitupanua	542,54	S i w a

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Wajo.

2. Desa Batupapan

Desa Batupapan berada di bagian barat Kecamatan Makale dan berbatasan dengan Kecamatan Saluputti di sebelah utara, dengan Desa Bungin di sebelah timur, dengan Desa Bombongan dan Desa Manggau di sebelah selatan, dan dengan Desa Tiromanda di sebelah barat. Kecamatan Makale terletak di bagian tengah Kabupaten Tana Toraja, berbatas di bagian utara dengan Kecamatan Rantepao, sebelah timur dengan Kecamatan Mangkendek dan Kecamatan Sanggalla', di sebelah selatan dengan Kecamatan Bongkakaradeng, dan di sebelah barat dengan Kecamatan Saluputti. Desa Batupapan terletak dalam Kecamatan Makale seperti yang dapat dilihat pada Peta 3.

Kalau Desa Wage merupakan desa dataran rendah, maka Desa Batupapan merupakan desa dataran tinggi. Jarak Desa Batupapan dari kota Makale sekitar 5 km dan dari Kota Rantepao sekitar 23 Km. Jarak kota Makale dari Ujungpandang sekitar 310 Km melalui Pare-Pare. Penduduk yang berdiam di Kecamatan Saluputti dan di Kecamatan Rindingallo, senantiasa melalui Desa Batupapan jika mereka berkunjung ke pasar Makale atau pasar Rantepao. Jalan daerah yang membagi dua Desa Batupapan, menghubungkan

Makale dengan Kecamatan yang terletak di bagian barat dan lapangan terbang perintis Rantepao. Desa ini ramai dilalui karena menghubungkan Makale sebagai pusat administrasi pemerintahan dengan pusat-pusat pemukiman di bagian barat Tana Toraja.

Desa Batupapan yang berbatasan dengan Kecamatan Saluputti itu, merupakan desa yang paling sempit di antara 7 (tujuh) desa dalam Kecamatan Makale. Luas seluruh Kecamatan Makale adalah 230,72 Km², terdiri atas 50 buah Rukun Kampung. Berbeda halnya dengan Kecamatan Sabbangparu yang menggunakan istilah Kampung, Untuk unit yang lebih rendah disini digunakan istilah Rukun Kampung dalam susunan administrasi pemerintahannya. Mungkin istilah (penamaan) ini disesuaikan dengan adat-istiadat orang Toraja yang amat menjunjung tinggi kerukunan. Untuk setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan umum, diadakan *Kombongan*, yaitu semacam musyawarah pemuka masyarakat untuk memutuskan segala-galanya tentang penyelenggaraan kegiatan itu, seperti penyelenggaraan upacara Rambu Tuka dan Rambu Solo. Musyawarah tersebut berlangsung dengan rukun dan damai.

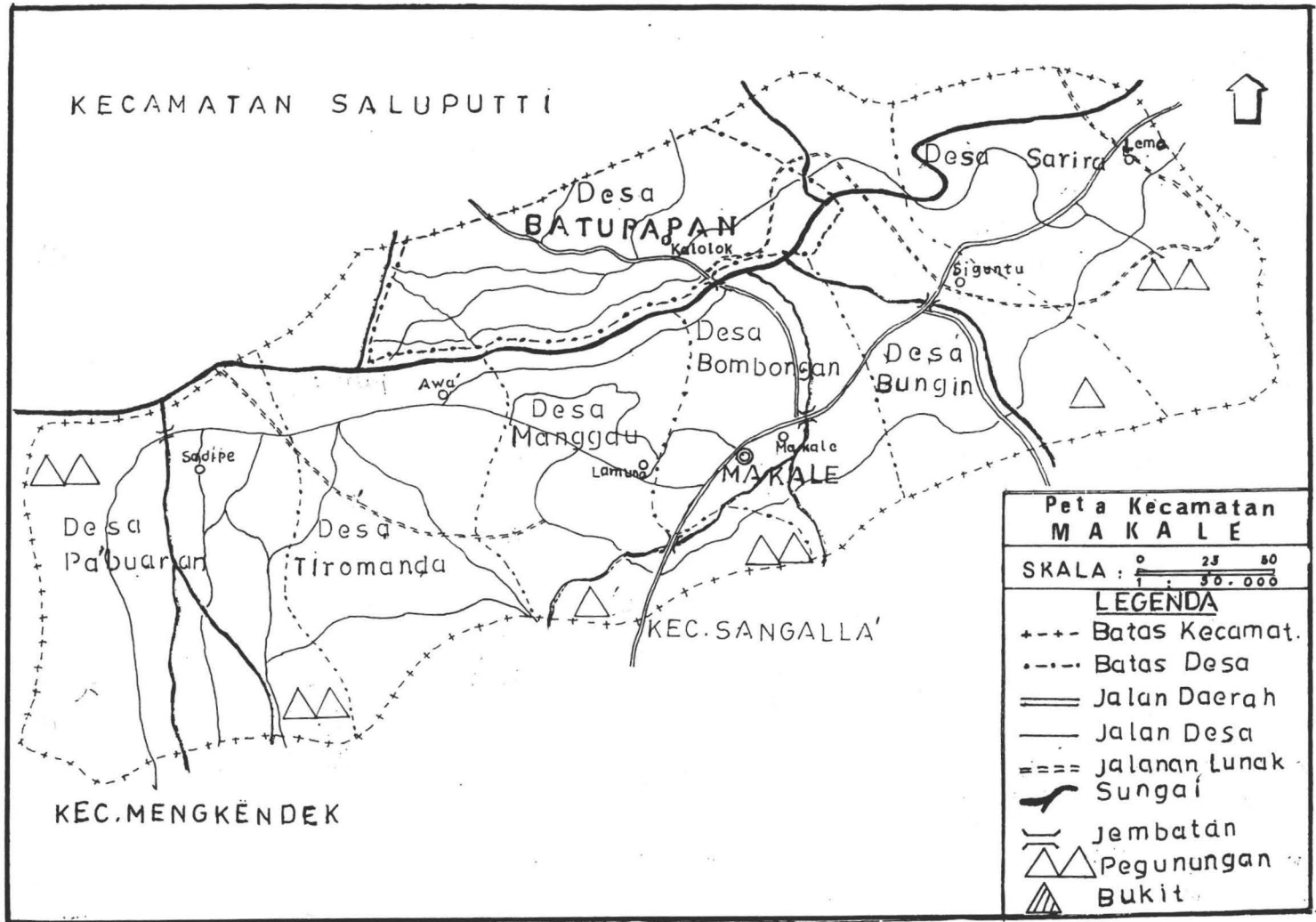
Tabel II – 3 DISTRIBUSI DESA DAN BANYAKNYA RUKUN KAMPUNG DALAM KECAMATAN MAKALE, KABUPATEN TANA TORAJA (Tahun 1979)

Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah R.K.	Pusat Kampung
1. Sarira	60,05	8	Lemo
2. Bungin	18,17	6	Siguntu
3. Batupapan	12,00	6	Kalolok
4. Bombongan	16,00	10	Makale
5. Manggau	24,00	9	Lamuna
6. Tiromanda	30,00	6	Awa'
7. Pa'buaran	70,50	5	Sadipe

Sumber : a. Kantor Kecamatan Makale, Tana Toraja.

b. Kantor Sensus dan Statistik Dati II Tana Toraja.

Nama Desa Batupapan diambil dari sebuah batu keramat yang terletak di samping jembatan yang berfungsi sebagai pintu untuk memasuki Desa Batupapan. Batupapan terdiri atas dua suku kata,



KECAMATAN SALUPUTTI

Desa BATURAPAN
Kalotok

Desa Sarira
Lemu

Desa Bombongan

Desa Bungin

Desa Manggadu
Lamua

Makale

Desa Pa'uaran
Sadipe

Desa Tiromanda

KEC. SANGALLA

KEC. MENGENDEK

**Peta Kecamatan
MAKALE**

SKALA : $\frac{0 \quad 25 \quad 50}{1 \quad 50.000}$

LEGENDA

- + + + + Batas Kecamatan.
- Batas Desa
- ==== Jalan Daerah
- Jalan Desa
- === jalanan Lunak
- ~ Sungai
- Jembatan
- △ Pegunungan
- ▲ Bukit

Peta NO : 3 Pembagian Desa dan Jaringan Jalaanan Kec. Makale.
Sumber : Kantor Kecamatan Makale. Tator, t h. 1980.



yakni *batu* dan *papan* yang artinya batu yang rata. Nama desa Batupapan disesuaikan dengan bentuk batu tersebut. Sejak dahulu, batu tersebut dikeramatkan serta menjadi tempat pemujaan dan tempat memohon berkat termasuk untuk memperoleh kekuatan jasmani. Batu keramat tersebut ramai dikunjungi orang sampai sekarang, terutama bila seseorang dalam desa bermimpi melihat tanda-tanda akan ditimpa malapetaka atau akan menjalar penyakit menular dalam desa. Mimpi ini di sebar luaskan kepada penduduk, maka segera diadakan upacara pemujaan kepada batu untuk menangkis semua malapetaka dan penyakit.

Daerah Tana Toraja sejak dahulu terdiri atas daerah persekutuan hukum yang disebut *Lembang*. Menurut ceritera lisan yang diperoleh dari Tominaa (ahli adat), bahwa dahulu kala pernah terjadi perang saudara antara Puang Bullu Matua dan Pantan Lembang Bombongan melawan sepupu sekalinya yang bernama Puang Raja Sampin di Kaero yang memangku jabatan kerajaan Kalindo Bulanan. Dalam perang tersebut Raja Sampin dikalahkan dan kedudukannya direbut oleh Puang Bullu Matua. Dengan demikian Kalindo Bulanan dipimpin oleh Puang Bullu Matua sampai ia lanjut usia. Berhubung karena tidak ada puteranya yang dapat menggantikannya, maka kerajaan jatuh kepada 3 orang cucunya. Dengan demikian Kalindo Bulanan dibagi menjadi Tallu Lembang, ialah :

- a. Lembang Basse Kakanna, diperintah oleh Puang Tianglangi'.
- b. Lembang Basse Tangana, diperintah oleh Puang Palondang, dan
- c. Lembang Basse Adinna, diperintah oleh Puang Kambolang.

Ketiga buah Lembang ini merupakan tiga kekuasaan yang bersaudara. Lembang Basse Kakanna, ialah daerah Makale sebagai kakak, Lembang Basse Tangana, yaitu daerah Sanggala' sebagai adik tengah dan Lembang Basse Adinna, yaitu daerah Mengkendak sebagai adik bungsu. Pemerintah pertama di daerah Makale ialah Puang Tianglangi' yang menjalankan kekuasaannya sebaik-baiknya. Beliau membentuk empat koordinator pemerintahan yang merupakan federasi di bawah pimpinannya seperti :

- a. Annan Pananianna di bawah koordinator Tongkonan Layuk Pangi, meliputi Lembang Sarira dan Lembang Bungin.
- b. Patang Bua' di bawah koordinator Tongkonan Layuk Pantan dan Torongko, meliputi Lembang Batupapan dan sebagian Lembang Bombongan.

- c. Karua Bua'na di bawah koordinator Tongkonan Layuk Tondon, Mamullu, Banua Lando dan Banua Sura'.
- d. Annan Bua'na dipa'buaran.

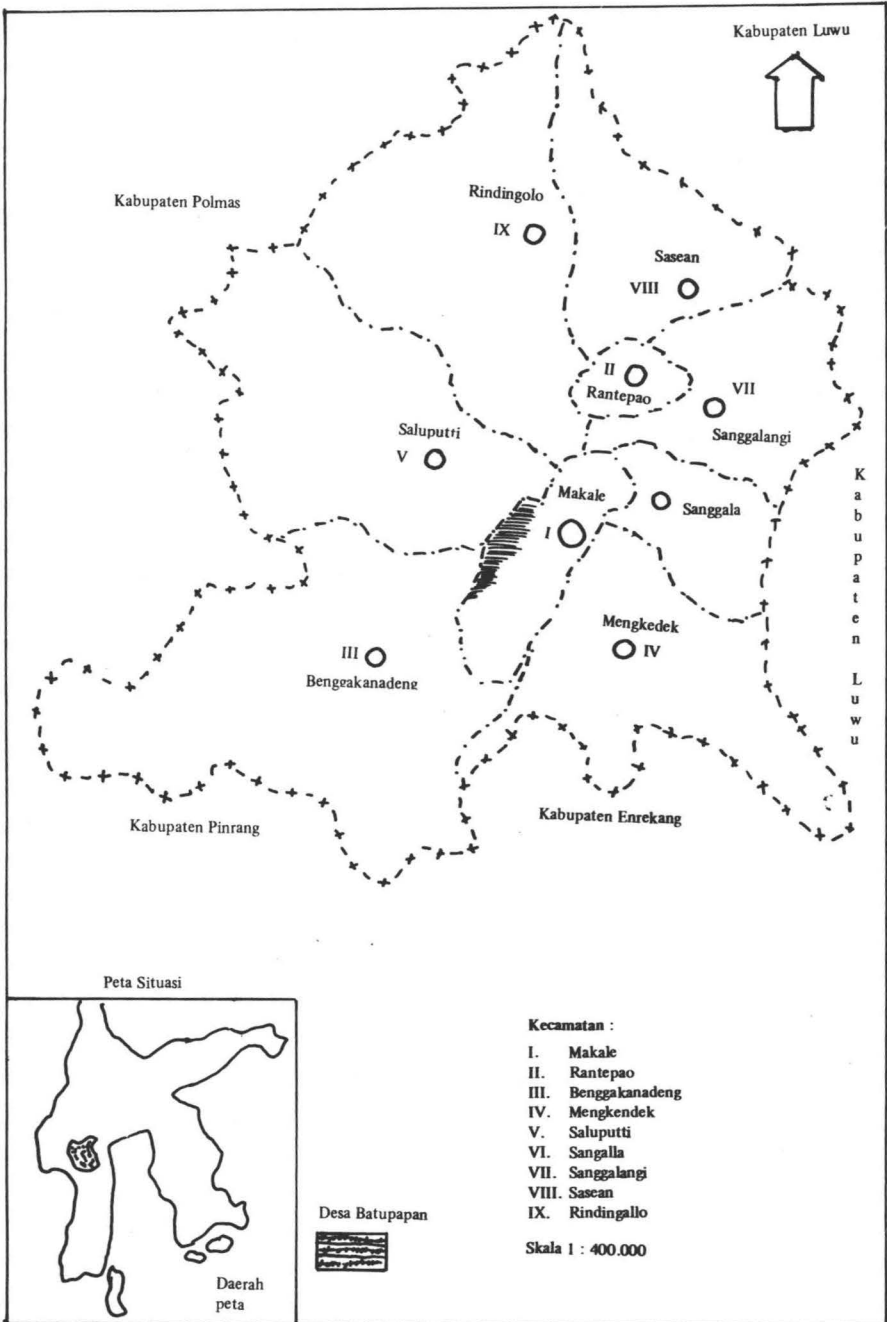
Paling maju dan menonjol di antara empat daerah federasi ini ialah Karua Bua'na, oleh karena telah menyusun struktur pemerintahannya dengan pembagian fungsi-fungsi, seperti adanya wakil koordinator, pertahanan/keamanan, pengadilan, dan urusan pertanian.

Lembang Batupapan berada di bawah kordinator Tongkonan Layuk Pantan dan Tarongko. Sampai tahun 1961, sama halnya dengan struktur pemerintahan waktu itu di Sulawesi Selatan, semua bentuk daerah-daerah di ubah dan disesuaikan dengan perkembangan, maka Lembang Batupapan diubah menjadi salah satu desa dalam Kecamatan Makale. Sejak namanya Lembang sampai menjadi Desa, calon Kepala Desa Batupapan selalu dipilih dari orang yang berasal dari Tongkonan Pantan atau Tarongko. Kepala Desa sekarang bukan pegawai negeri, melainkan keturunan bangsawan yang berpengaruh di daerahnya.

Desa Batupapan berada di pusat Kabupaten Tana Toraja seperti yang tergambar dalam Peta 4. Posisi Kecamatan Makale memanjang dari selatan ke utara. Kabupaten Tana Toraja yang luasnya 4233,60 Km² itu memiliki 9 (sembilan) kecamatan dan 65 buah desa. Luas dan ibu kota masing-masing kecamatan itu dinyatakan dalam Tabel II – 4.

Tabel II – 4 DISTRIBUSI KECAMATAN, LUAS DAN IBU KOTA KECAMATAN, DI KABUPATEN TANA TORAJA (Tahun 1979)

Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Nama Ibu Kota
1	2	3
1. Makale	230,72	Makale
2. Rantepao	31,09	Rantepao
3. Bonggakaradeng	1.366,60	Poton
4. Mengkendek	329,95	Ge'tengan
5. Saluputtin	694,20	Ulusalu



Peta 4 Kabupaten Tana Toraja, di Sulawesi Selatan
 Sumber : Kantpr Bupati/K.D.H. Tana Toraja.



1	2	3
6. Sangalla'	267,62	Kendoran
7. Sanggalangi	449,02	T. Kalau'
8. Sesean	319,01	Rantepang
9. Rindinggallo	545,39	Pangala

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Tator.

3. Keadaan alam dan iklim Desa Wage dan Desa Batupapan

Di muka telah diungkapkan, bahwa Desa Wage adalah desa dataran rendah dan berada di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan, sedang Desa Batupapan adalah desa dataran tinggi, berada diantara bukit dan pegunungan. Gambaran secara singkat mengenai topografi, jenis tanah, tipe iklim, dan suhu udara kedua desa tersebut terdapat dalam Tabel II – 5.

Tabel II – 5 KEADAAN ALAM DAN IKLIM DESA WAGE DAN DESA BATUPAPAN DI SULAWESI SELATAN (Tahun 1979)

Keadaan alam dan iklim	Desa Wage	Desa Batupapan
1. Topografi tanah	70% datar 15% berbukit 15% rawa	8% datar 49% berbukit 43% bergunung
2. Jenis tanah	Alluvial, Regosol, dan Latosol	Latosol, Regosol dan Potsolid merah kekuningan
3. Tinggi dari Permukaan laut	12 – 120 m	150 – 1.500 m
4. Posisi	120,1 ^o B.T. 4,1 ^o L.S.	119,8 ^o B.T. 3,3 ^o L.S.
Tipe iklim	C & D	B

6. Rata-rata Curah Hujan	1.900 mm	2.600 mm
7. Rata-rata hari hujan	90 hari	150 hari
8. Bulan-bulan basah	Januari s/d Juni	Okt. s/d Mei
9. Bulan-bulan kering	Juli s/d Desb.	Juni s/d Sept.
10. Suhu udara	Maks 34 ^o C Min 23 ^o C	Maks 28 ^o C Min 17 ^o C

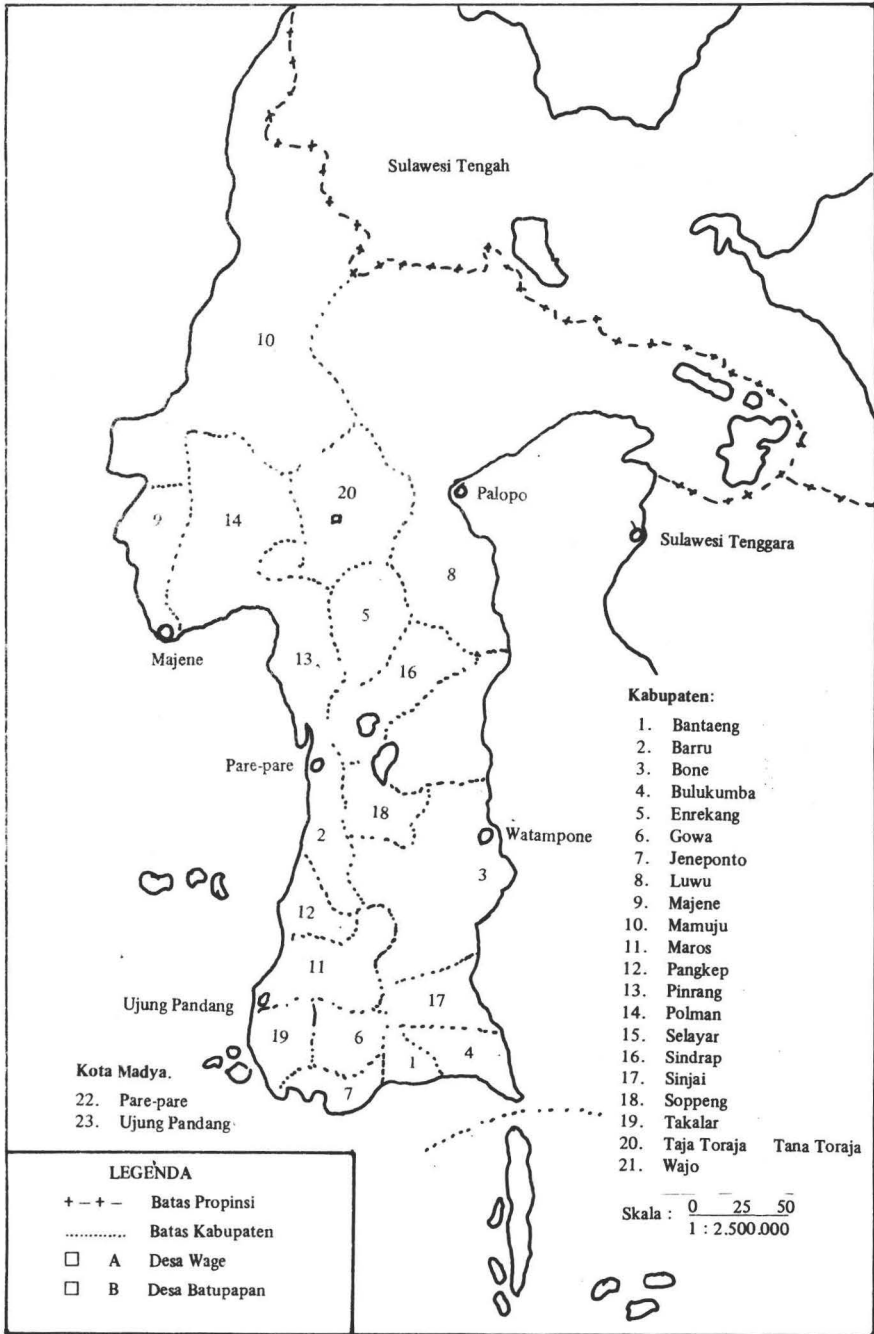
Sumber :

- a. Stasiun Metrologi Canru, Kecamatan Sabbangparu
- b. Stasiun Metrologi Leon, Kecamatan Makale
- c. Kantor P.U. Cabang Pengairan Wajo
- d. Kantor Dinas Perkebunan, Tana Toraja

Menurut keadaan topografi, daerah Sulawesi Selatan terbagi dalam 3 zone, yaitu zone selatan, tengah, dan utara. Desa Wage termasuk zone tengah, sedang Desa Batupapan termasuk zone utara. Desa Wage berbatasan dengan Danau Tempe yang sangat bermanfaat bagi kehidupan penduduk. Menurut Schmidt & Ferguson, iklim daerah Wajo termasuk tipe C, sedang menurut Koppen termasuk tipe Am. Hal ini berarti bahwa di daerah ini terdapat masa kering selama satu atau dua bulan, selanjutnya turun hujan dalam jumlah terbatas, sehingga walaupun dalam bulan kering, tetap ada vegetasi yang serupa dengan bulan-bulan basah.

Dalam musim hujan, air Danau Tempe naik dari 2,50 sampai 2,70 m disebabkan air sungai Wallannae. Sungai ini sering mengalami banjir dan menggenangi juga persawahan yang terdapat di sekitarnya. Demikian pula sungai Salojampue sebagai cabang dari sungai Cenrana, mengalami banjir setiap tahun dan melanda persawahan yang terletak dalam Desa Wage. Sungai Cenrana yang berhulu di Danau Tempe itu bermuara di Teluk Bone.

Di Desa Batupapan, Tana Toraja, meskipun dalam bulan-bulan kering, tidak dirasakan panas, sedang di waktu malam terasa dingin dan sejuk karena terletak di daerah pegunungan. Walaupun angka curah hujan tinggi dan jumlah hari hujannya juga banyak,



Peta 5 PROPINSI SULAWESI SELATAN

akan tetapi tidak pernah terjadi genangan air, oleh karena air turun melalui lereng pegunungan dan memasuki sungai Sa'dang, mengalir melalui Enrekang dan bermuara di Selat Makasar.

Kedua desa ini termasuk di antara 1.170 buah desa di Sulawesi Selatan dalam 170 buah kecamatan. Di Sulawesi Selatan terdapat 21 kabupaten dan 2 buah Kota Madya. Luas Sulawesi Selatan 77.637.67 Km².

B. POTENSI ALAM

Di antara sumber daya alam yang potensial, tanah termasuk salah satu yang paling penting. Masa depan makhluk manusia banyak ditentukan oleh bagaimana cara mereka menggunakan tanahnya. Di lapisan atas tanah hidup aneka ragam makhluk hidup termasuk manusia, sedang di lapisan bawah terkandung zat hara dan zat-zat lain yang meresap secara kimiawi, memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya dimanfaatkan oleh manusia dan hewan.

Penduduk Sulawesi Selatan senantiasa mencita-citakan untuk memiliki tanah, meskipun dalam ukuran yang sempit. Memiliki tanah merupakan suatu kebanggaan, terutama bagi orang Bugis dan Makasar. Bagi orang Toraja, memiliki *tedong* (kerbau) dan babi, terutama kerbau belang, merupakan kebanggaan tersendiri. Ukuran luas tanah yang dikuasai sebanyak 5 Ha sudah dianggap kaya. Pengaruh penguasaan tanah ini, dianggap wajar bagi seseorang yang menduduki jabatan pamong, orang kaya dan orang terpandang. Seolah-olah terdapat nilai bahwa bagi pejabat, orang kaya dan orang terpandang itu, identik dengan pemilikan tanah yang luas.

**Tabel II – 6 TATAGUNA DI DESA WAGE DAN BATUPAPAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN (Tahun 1979)**

Penggunaan Tanah	Desa Wage	Desa Batupapan
1. Sawah irigasi (Ha)	904	200
2. Sawah tadah hujan (Ha)	14.000	2.830
3. Tegalan/kebun/ladang (Ha)	4.460	470
4. Pekarangan (Ha)	5.627	2.000
5. Danau/Rawa (Ha)	5.279	
6. Padang rumput (Ha)	—	70

7. H u t a n (Ha)	7.300	2.250
8. Lain-lain (Ha)	—	1.760
Jumlah (Ha)	37.570	13.760

Sumber : Diolah dari statistik Dinas Pertanian Rakyat, Kabupaten Tanor dan Wajo

Dalam tabel di atas, tampak dicantumkan sejumlah sawah yang beririgasi. Tetapi bukanlah irigasi teknis atau semi-teknis, melainkan irigasi desa yang dibuat sendiri oleh petani sejak dahulu. Di Desa Batupapan, sumber air untuk irigasi terdapat di gunung dalam Kecamatan Saluputti. Hampir dapat dipastikan bahwa pertanian di kedua desa ini 90% pertanian tadah hujan. Pada musim kemarau persawahan di Wage kering gersang, tanah retak-retak menunjukkan tidak dapat ditanami dua kali setahun. Di penghujung bulan-bulan basah setelah selesai panen persawahan, sebagian daerah alluvial-regosol di Wage, ditanami jagung dan akhir-akhir ini kegiatan penanaman palawija sudah meningkat, karena harga sudah meningkat di pasaran. Di Desa Batupapan, tanah persawahan lebih banyak ditanami jagung daripada tanaman lainnya setelah selesai panen.

Dari pengolahan hasil wawancara dan statistik mengenai kedua desa ini, dapat diketahui bahwa kepemilikan tanah oleh penduduk rata-rata 0,25 Ha sawah, 0,23 Ha tegalan dan 0,27 Ha ladang di Desa Batupapan, sedang di Desa Wage 0,22 Ha ladang. Hal ini disebabkan areal ladang di Batupapan lebih luas dan dapat diperluas lagi dengan membuka lereng-lereng gunung yang masih banyak tersedia. Di Desa Wage tidak terdapat lereng-lereng gunung dan yang dapat dijadikan tanah perladangan, kecuali bagian punggung dari dua bukit yang memanjang dari timur ke arah barat-daya. Tanah persawahan di Desa Wage terdiri atas sawah tadah hujan, sawah pinggiran sungai, dan sawah paya-paya. Sedang di Desa Batupapan hanya mungkin sawah lereng gunung dan sawah lembah. Tidak terdapat di desa ini sawah paya-paya atau sawah dekat rawa-rawa. Gambaran mengenai sumber daya alam di kedua desa tersebut adalah seperti yang tercantum pada Tabel II – 7

**Tabel II – 7 SUMBER DAYA ALAM DESA WAGE DAN
BATUPAPAN PROPINSI SULAWESI SELATAN (Tahun 1979)**

Sumber daya alam	Desa Wage	Desa Batupapan
1. Sawah pertanian (Ha)	14.904	3.030
2. Kebun/Pekarangan (Ha)	10.087	2.470
3. Tambak (Ha)	—	—
4. Tambang	—	—
5. Sungai (Km)	5	4
6. Padang rumput (Ha)	—	70
7. Danau/rawa (Ha)	5.279	—
8. Hutan (Ha)	7.300	2.250
9. Laut (Ha)	—	—

Sumber : Diolah dari stastitik Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Tanor dan Wajo

Danau Tempe yang sebagiannya, masuk dalam Desa Wage adalah satu-satunya danau di Sulawesi Selatan yang diolah sejak lama. Tiap tahun menghasilkan panen ikan yang cukup memberi peningkatan hidup kepada nelayan. Ikan yang dikenal dengan nama sepat siam itu biasanya dikeringkan dan digarami untuk dijual ke luar daerah. Sejak sebelum Perang Dunia ke II, terjadi pendangkalan pada danau ini sebesar 10 – 20 Cm/tahun, disebabkan adanya sedimentasi yang bersumber dari sungai-sungai yang bermuara di danau itu terutama sungai Walenae dari selatan dan sungai Bila dari utara.

Karena pendangkalan terus-menerus, maka produksi ikan menurun dari 25.000 ton setahun sebelum Perang Dunia ke II menjadi hanya 4.000 ton setahun dewasa ini. Apabila pendangkalan berlanjut terus, akhirnya sebagian atau seluruh danau itu akan menjadi daratan. Dalam musim kemarau, pinggir di bagian timur ditanami jagung oleh penduduk yang berdiam di sekitarnya. Akhir musim penghujan (lazimnya bulan Juni), tinggi permukaan air di danau adalah 2,50 s/d 3.00 M dibandingkan dengan tinggi permukaan air pada akhir musim kemarau. Pada akhir musim hujan, luas danau 35.000 Ha, akhir musim kemarau hanya 13,173 Ha. Malahan sekarang ini dan mungkin seterusnya perlahan-lahan akan berkurang, oleh karena pengendapan terus berlangsung di dasar

danau. Usaha-usaha pemerintah guna merintis pembangunan pintu-pintu air sudah ada, agar air sungai Walanae dan sungai bila dapat dikendalikan agar tidak langsung menuju ke Danau Tempe, tetapi membelok ke Sungai Cenrana dan sebagian airnya saja yang memasuki Danau Tempe.

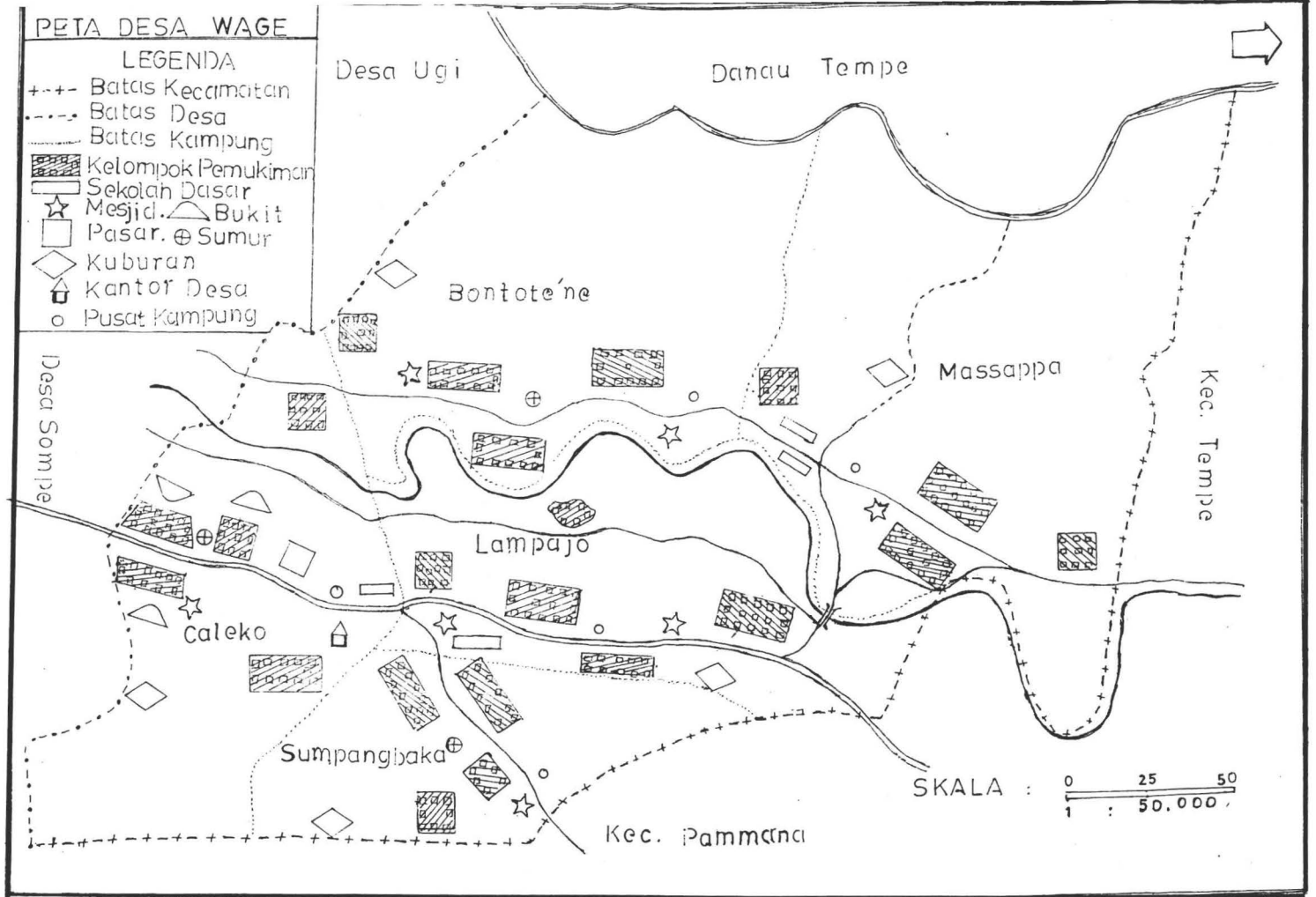
Dalam Peta 6 tampak adanya sungai yang membagi dua Desa Wage, sedang sungai yang terdapat pada Desa Batupapan menjadi batas antara desa ini dengan Desa Manggau serta Desa Tiromanda. Namun demikian sungai di Desa Batupapan dimanfaatkan oleh penduduk yang berdiam di sekitarnya. Sungai di Desa Wage dapat dilayari dengan perahu motor tempel atau perahu layat bercadik bahkan beberapa keluarga nelayan mencari penghidupannya di sungai tersebut. Sungai di Desa Batupapan belum dimanfaatkan secara optimal, karena keadaan sungai tidak terlalu dalam dan berbatu-batu. Kebutuhan akan ikan bagi penduduk di Desa Batupapan dipenuhi dengan mendatangkannya dari Palopo atau Pare-pare. Agaknya di Desa Batupapan, usaha perikanan darat belum dikembangkan secara baik. Sungai ini adalah cabang sungai Sa'dang yang mengalir melalui kota Enrekang dan bermuara di Selat Makasar.

C. POTENSI KEPENDUDUKAN

Di bawah ini akan digambarkan potensi kependudukan kedua desa penelitian untuk memudahkan melihat hubungan dan kesesimbangannya dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah pemukiman tersebut.

1. Desa Wage

Penduduk Desa Wage kebanyakan terdiri atas suku bangsa Bugis dan 100% menganut Agama Islam. Dalam tiap kampung terdapat sebuah Masjid dan Mushollah. Jumlah penduduk sebanyak 6.531 jiwa dalam tahun 1979 dengan 1.407 Kepala Keluarga. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 1980, yang diperoleh dari Panitia Sensus, penduduk desa tersebut sebanyak 7.907 jiwa. Angka ini menurut anggota Panitia tersebut masih bersifat sementara, karena data lainnya belum masuk. Walaupun demikian angka ini sudah mendekati ketepatan karena diperoleh dengan pencatatan yang sangat hati-hati. Kenaikan jumlah penduduk dari tahun 1979 ke 1980 sebesar 1,21%. Kenaikan ini ternyata masih di bawah kenaikan penduduk nasional (2,34%).



Peta No: 6 - Penyebaran Pemukiman di Desa Wage
 Sumber: Kanto. Desa Wage, 1979



**Tabel II – 8 JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK
DESA WAGE KECAMATAN SABANGPARU (Tahun 1979)**

Kampung	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk
1. Caleko	6,99	1.292	185
2. Sumpangbaka	6,16	595	97
3. Lampajo	6,66	1.345	202
4. Massappa	8,24	1.471	179
5. Bontote'ne	9,52	1.828	192
J u m l a h	37,57	6.531	174

Sumber : a. Diolah dari data Kantor Desa Wage
b. Kantor Kecamatan Sabbangparu, Dati II Wajo

Kampung Massappa dan Bontote'ne terluas di antara kelima buah kampung di Desa Wage. Kelima kampung itu agak berimbang kepadatan penduduknya. Di kedua kampung yang terluas itu terdapat persawahan yang luas. Distribusi penduduk Desa Wage menurut jenis kelamin digambarkan pada Tabel II – 9.

**Tabel II – 9 DISTRIBUSI PENDUDUK DESA WAGE
MENURUT JENIS KELAMIN (Tahun 1979)**

Kampung	Jumlah penduduk		Jumlah
	Lk.	Pr.	
1. Caleko	630	662	1.292
2. Sumpangbaka	280	315	595
3. Lampajo	650	695	1.345
4. Massappa	720	751	1.471
5. Bontote'ne	896	932	1.828
J u m l a h	3.176	3.355	6.531

Sumber : a. Kantor Desa Wage Kecamatan Sabbangparu
b. Kantor Kecamatan Sabbangparu Dati II Wajo

Disebutkan di depan bahwa pengolahan sawah lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Setelah padi menguning, barulah perempuan mendapat giliran mengerjakan sawah, yaitu menuai, sedang pengumpulan padi dan pengangkutannya ke rumah dilakukan juga oleh laki-laki. Dalam kenyataan, apabila telah selesai musim bersawah dan tiba musim kemarau, kebanyakan laki-laki keluar desa mencari tambahan pendapatan, bahkan ada di antaranya yang bermigrasi musiman ke Sumatera dan mereka kembali jika musim barat tiba.

Berdasarkan catatan Kepala Desa dan hasil Sensus Penduduk, 1980, maka tingkat pendidikan penduduk dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tidak pernah tamat sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar	4.518 orang
b. Tamat Sekolah Dasar/ sederajat	1.491 orang
c. Tamat SLP / sederajat	461 orang
d. Tamat SLA/ sederajat	57 orang
e. Tamat Perguruan Tinggi	4 orang

Jumlah 6.531 orang

Di desa Wage terdapat Madrasah Ibtidaiyah milik Perguruan Islam Asa'diyah yang berpusat di Sengkang. Kebanyakan murid-murid Madrasah ini terdiri atas perempuan. Sebagian murid-murid belajar di SDN pagi hari dan sore hari mereka belajar di Madrasah. Tradisi belajar di desa ini, khususnya perempuan, sama halnya dengan di daerah-daerah Bugis lainnya, yaitu kaum wanita terbatas pendidikannya karena ikatan-ikatan adat terutama pergaulan antara dua jenis kelamin masih dibatasi dengan ketat. Anak-anak wanita paling tinggi bisa mengembangkan tingkat pendidikannya sampai di SLP.

Komposisi penduduk menurut tingkat umur di desa ini yang masih menggunakan interval 0 – 4,5 – 14 dan seterusnya, menyulitkan kita untuk melihat jumlah bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa secara tepat. Lebih sukar lagi memperkirakan jumlah angkatan kerja yang berada antara umur 16 sampai dengan 45 tahun. Catatan Kepala Desa Wage dan Kantor Kecamatan Sabbangparu dapat membantu memberikan gambaran komposisi penduduk seperti pada Tabel II – 10.

**Tabel II – 10 KOMPOSISI PENDUDUK DESA WAGE
MENURUT TINGKAT UMUR (Tahun 1979)**

Tingkat Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Lk	Pr.	
0 – 4	424	512	936
5 – 14	590	861	1.451
15 – 24	622	615	1.237
25 – 54	876	1.162	2.038
55 –	442	427	875

Sumber : a. Catatan Kepala Desa Wage
b. Diolah dari catatan Kantor Kecamatan Sabbangparu

Dari Tabel II – 10 tidak dapat diperkirakan jumlah angkatan kerja karena angkatan kerja mencakup penduduk berusia 10 tahun ke atas yang bekerja dan pencari kerja. Apabila semua laki-laki yang berusia antara 15 – 54 bekerja, maka dapat dikatakan bahwa 22% dari jumlah semua penduduk menanggung kehidupan seluruh penduduk desa.

Jumlah penduduk di Desa Wage sejak tahun 1975 sampai tahun 1979 kelihatan tidak bertambah, bahkan berkurang selama 5 tahun terakhir ini. Tabel di bawah ini menunjukkan demikian dan berbagai catatan arsip Kantor Kecamatan Sabbangparu tidak menemukan sebab-sebabnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka masyarakat Wage, ternyata hal itu disebabkan migrasi keluar daerah setiap tahun dan sebagian telah memutuskan untuk menetap di negeri tujuan. Hal ini terutama tampak pada jumlah laki-laki dewasa dari tahun 1975 sampai 1979 pada Tabel II – 11.

**Tabel II – 11 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK
DESA WAGE DARI TAHUN 1975 s/d 1979**

Tahun	Jumlah K.K.	Jumlah Penduduk				Jumlah
		Dewasa		Anak-anak		
		Lk.	Pr	Lk.	Pr.	
1975	1.392	1.725	1.830	1.672	1.780	7.007
1976	1.400	1.801	1.914	1.714	1.830	7.259
1977	1.400	1.825	1.997	1.726	1.825	7.373
1978	1.403	1.931	2.473	1.919	1.901	8.224
1979	1.407	1.318	1.589	1.636	1.988	6.531

- Sumber :
- a. Diolah dari data penduduk Desa Wage.
 - b. Diolah dari data Kantor Sensus dan Statistik Kecamatan Sabbangparu
 - c. Diolah dari buku Kabupaten Wajo dalam angka Tahun 1978

Catatan Kepala Kecamatan Sabbangparu mengenai gejala kependudukan dalam kecamatannya adalah sebagai berikut. Dalam tahun 1972 bertambah 105 orang, tahun 1973 berkurang 2.313 orang, tahun 1974 berkurang 2.251 orang, tahun 1975 bertambah 3.610 orang, seterusnya dalam tahun 1976 bertambah 4.184, dan tahun 1977 bertambah lagi 354 orang. Kemudian dalam tahun 1978 berkurang 1.361 orang. Rupanya dalam kecamatan ini terjadi migrasi keluar berkelompok dan secara besar-besaran menuju negeri tujuan Sumatera, Kalimantan Tenggara, dan Jawa. Migrasi secara berkelompok diduga diatur oleh orang-orang pencari tenaga kerja sebagai buruh di perusahaannya atau membantu usaha pertanian di tempatnya.

Melihat angka-angka tersebut di atas, pertambahan dan berkurangnya penduduk bukan dipengaruhi oleh selisih angka kematian dan kelahiran, melainkan karena migrasi keluar. Apabila gejala tersebut kita lacak lebih jauh pada pemuka-pemuka masyarakat, maka di antara jawaban-jawabannya terselip kata-kata tidak senang terhadap situasi masyarakatnya pada waktu itu. Mereka mengatakan bahwa alasan orang-orang yang bermigrasi keluar itu bukan semata-mata karena ingin memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi, melainkan karena ketimpangan sosial yang langsung me-

reka rasakan sebagai suatu tekanan jiwa yang tidak mungkin dielakkan, seperti adanya pungutan-pungutan, kerja bakti beberapa hari, ancaman yang bersifat politik dan hubungan-hubungan sosial di lingkungan pemukimannya. Hal itu tidak dapat dielakkan karena peraturan-peraturan itu berasal dari pemerintah atasan desa. Dari beberapa penelitian sosial disimpulkan bahwa daerah Wajo termasuk salah satu daerah yang tertinggi tingkat migrasinya dan bahwa orang Wajo bermigrasi karena untuk memperbaiki penghidupan ekonominya. Seolah-olah dalam Kabupaten Wajo tidak ada lagi lapangan penghidupan atau dalam kata lain lapangan penghidupan pertanian tidak mampu dijadikan landasan untuk memperbaiki tingkat penghidupan. Mereka yang berpindah itu pada umumnya adalah petani, sedang mereka bermigrasi ke daerah lain untuk melakukan pekerjaan bertani juga. Padahal daerah pertanian di Wajo masih luas dan subur, bahkan daerah Wajo dikenal sebagai gudang beras di Sulawesi Selatan. Masalah perpindahan orang Wajo dari daerahnya ini perlu diteliti lebih jauh mengingat bahwa perpindahannya itu bukan karena desakan faktor ekonomi, melainkan faktor ketimpangan sosial yang langsung mereka rasakan. Penduduk Wajo lebih dapat menerima peraturan-peraturan yang mereka ikut musyawarahkan dan sepakati. Filsafat orang Wajo yang mengatakan *Maradeka Towajoe ade'nami napopuang*, tertanam benar dalam lubuk hati mereka.

Gambaran mengenai perbandingan potensi penduduk Desa Wage dengan desa lainnya dalam Kecamatan Sabbangparu, serta perbandingan potensi penduduk Kecamatan Sabbangparu dengan kecamatan lainnya dalam Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel II - 12, II - 13, dan II - 14 dalam lampiran.

2. Desa Batupapan

Sebagiaian besar penduduk Desa Batupapan terdiri atas suku bangsa Toraja. Mereka memeluk tiga agama, yakni Agama Kristen, Agama Islam, dan Kepercayaan Aluk Todolo. Jumlah penduduk dalam tahun 1979 sebanyak 4.721 orang dengan 847 Kepala Keluarga. Menurut hasil sensus Penduduk tahun 1980, jumlah penduduk desa itu sebanyak 4.955 orang yang berarti kenaikan hanya 1,05% atau dengan angka mutlak 234 orang.

Tabel II –15 DISTRIBUSI JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK DESA BATUPAPAN, KECAMATAN MAKALE MENURUT RUKUN KAMPUNG (Tahun 1979)

Rukun Kampung	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk
1. Tarongko	2,19	999	456
2. Lapandan	2,18	785	360
3. Kasimpo	2,27	675	297
4. Kalolok	2,38	717	301
5. Rante	2,24	864	386
6. Mamaho	2,50	681	272
Desa Batupapan	13,76	4.721	343

Sumber : Diolah dari data Kantor Desa Batupapan

Kepadatan penduduk Desa Batupapan adalah yang tertinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Makale, bahkan juga dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Tana Toraja. Terbentuknya Desa Batupapan menjadi sebuah desa di dasarnya pada sejarahnya, yaitu bahwa Wilayah ini sejak dahulu merupakan satu Lembang yang diperintah oleh seorang bangsawan yang berkedudukan sama tinggi dengan Lembang lain dan menguasai sebagian wilayah Kecamatan Saluputti sekarang. Walaupun tidak luas dan potensi sumber daya alamnya kurang, namun dari segi sejarahnya wilayah ini memiliki cukup potensi untuk menjadi satu wilayah tersendiri.

Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di desa ini agak berimbang dibanding dengan Desa Wage. Jumlah laki-laki, 2.272 orang, sedang perempuan sebanyak 2.449 orang, yang berarti hanya berbeda 117 orang. Perbedaan seperti ini biasanya dalam kenyataan sosial tidak terlalu banyak membawa konsekuensi sosial. Lagi pula dalam usaha tani di Tana Toraja umumnya dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan. Golongan perempuan turut menanam bibit padi dan menyianginya, dan setelah menguning seluruhnya dipetik oleh golongan perempuan. Di Desa ini, sedang digalakkan *Proyek Kesenambungan*, yaitu Proyek penataan

kehidupan rumah tangga dan pekarangan, yang seluruhnya dilakukan oleh golongan perempuan. Peranan wanita Toraja lebih menonjol bila dibandingkan dengan wanita di desa-desa Bugis. Pada umumnya di desa-desa Bugis, golongan laki-laki lebih dominan dalam mencari penghidupan.

**Tabel II – 17 JUMLAH PENDUDUK DESA BATUPAPAN
MENURUT TINGKAT UMUR (Tahun 1979)**

Tingkat Umur	Banyaknya penduduk		Jumlah
	Lk.	Pr.	
0 – 4	361	406	767
5 – 12	393	409	802
13 – 18	373	417	790
19 – 28	391	420	811
29 – 45	390	395	785
46 –	364	402	766
J u m l a h	2.337	2.384	4.721

Sumber : Diolah dari data Kantor Desa Batupapan, Kecamatan Sabbangparu

Penetapan interval yang dikemukakan pada Tabel II – 17 di dasarkan pada anggapan masyarakat bahwa seseorang disebut bayi jika berusia 0 – 4 tahun, anak-anak jika berumur 5 – 12 tahun, sedang yang berusia 13 tahun dianggap sudah bisa membantu orang tua di sawah atau di ladang. Seperti halnya dengan Tabel II – 10, maka dari Tabel II – 17 tersebut di atas orang tidak dapat menetapkan jumlah angkatan kerja. Apabila semua laki-laki yang berusia 13 tahun ke atas tergolong orang yang bekerja, maka sekitar 32% dari jumlah seluruh penduduk desa menanggung kehidupan seluruh penduduk desa. Apabila jumlah laki-laki dan perempuan dari kelompok usia tersebut seluruhnya bekerja, persentasi tersebut akan lebih besar lagi. Jumlah laki-laki dan perempuan pada semua tingkat umum tampaknya sebanding. Gambaran mengenai perkembangan jumlah penduduk Desa Batupapan tahun 1975 sampai 1979 tertera pada Tabel II – 18.

Tabel II – 18 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DESA BATUPAPAN DARI TAHUN 1975 s/d 1979

Tahun	Jumlah K.K	Jumlah Penduduk				Jumlah
		Dewasa		Anak-anak		
		Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	
1975	840	825	1.082	1.130	1.322	4.359
1976	841	936	1.107	1.232	1.372	4.647
1977	841	936	1.127	1.215	1.325	4.603
1978	841	1.484	1.589	782	787	4.642
1979	847	1.175	1.187	1.162	1.197	4.721

Sumber : Diolah dari data Kantor Kepala Desa Batupapan, Kecamatan Makale

Jumlah penduduk Desa Batupapan tidak mengalami perubahan yang menyolok selama tahun 1975 sampai 1979. Pertambahan penduduk selama lima tahun hanya sebanyak 362 orang atau 1,80%. Melihat pertambahan ini, seolah-olah program Keluarga Berencana berhasil. Akan tetapi berdasarkan informasi yang diterima, pelaksanaan program KB di desa ini belum lancar benar. Hasil wawancara terhadap pemuka-pemuka masyarakat menunjukkan bahwa keadaan itu terjadi karena banyak penduduk yang melakukan perpindahan keluar desa. Di antaranya ke kota-kota terdekat dan sebagian pula ke kota Ujungpandang. Sebagian lagi berpindah secara musiman. Mereka kembali jika tiba musim barat untuk memulai kerja sawah.

Tabel II - 19 DISTRIBUSI UMAT BERAGAMA DI DESA BATUPAPAN MENURUT R.K. (Tahun 1979/1980)

R.K.	Protestan	Katolik	Islam	Aluk Todolo	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1. Tarongko	355	195	92	357	999
2. Lapandan	350	203	52	180	785
3. Kasimpo	192	189	77	217	675
4. Kalolok	512	87	12	106	717

1	2	3	4	5	6
5. Rante	350	141	101	272	864
6. Mamabo	121	66	13	480	681
Jumlah	1.880	882	347	1.612	4.721

Sumber : Kantor Desa Batupapan

Sebagian besar penduduk Desa Batupapan menganut agama Kristen (Protestan dan Katolik) dan Agama Islam. Sebagian lainnya menganut kepercayaan nenek moyang yang disebut *Aluk Todolo*. Perincian jumlah penganut agama dan kepercayaan tersebut tertera pada Tabel II – 19.

Di antara penganut Kristen dan Islam, masih terdapat orang-orang yang mempunyai tindak-tanduk dalam kehidupan sehari-hari menganut pula Aluk Todolo. Jadi dapat dikatakan, bahwa nilai-nilai yang mereka taati dipengaruhi oleh tiga macam kepercayaan tersebut. Adakalanya dalam satu keluarga terdapat tiga macam agama dan mereka saling menghormati antara satu dengan lainnya, sama-sama menyumbang penyelenggaraan upacara pemakaman keluarganya. Orang Islam turut pula memelihara babi meskipun tidak untuk dimakan, tetapi untuk disumbangkan kepada keluarga yang mengadakan upacara. Demikian pula orang Kristen sering mendengar larangan menyembah berhala, namun mereka menganggap bahwa menyembah arwah nenek moyang bukanlah seperti menyembah berhala, melainkan merupakan pengabdian kepadanya.

Kepercayaan asli orang Toraja pada mulanya tidak mempunyai nama tertentu, akan tetapi kemudian setelah Agama Islam dan Kristen masuk, kepercayaan mereka disebutnya Aluk Todolo. Orang Toraja menyebut Agama Islam dengan *Salleng* dan Agama Kristen dengan *Sarani*. Orang Toraja dapat hidup dengan damai di antara keluarga yang menganut tiga macam kepercayaan. Gambaran mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Batupapan tertera pada Tabel II – 20 dalam lampiran. Di bawah ini diuraikan distribusi dan kepadatan penduduk Kecamatan Makale agar dapat dilihat posisi Desa Batupapan dalam kaitan dengan desa-desa lainnya.

**Tabel II – 21 DISTRIBUSI PENDUDUK DAN KEPADATAN
PENDUDUK KECAMATAN MAKALE, TATOR (Tahun 1979)**

Desa	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km ²)
1. Sarita	60,05	3.820	64
2. Bungin	18,17	4.687	258
3. Batupapan	13,76	4.721	343
4. Bombongan	16,00	7.882	493
5. Manggau	24,00	6.191	258
6. Tiromanda	30,00	4.291	143
7. Pa'buaran	70,50	5.518	78
Jumlah	232,48	37.110	161

Sumber : Kantor Kecamatan Makale, Tator.

Desa Bombongan yang terletak dalam Kota Makale, paling tinggi kepadatannya, kemudian menyusul Desa Batupapan yang terletak 5 Km sebelah barat Kota Makale. Selanjutnya desa yang dekat dengan kota Makale adalah desa Manggau dan desa Bungin, termasuk pula tinggi kepadatannya. Hal ini berarti penduduk bergerak mendekati pusat-pusat fasilitas karena di desa sendiri tidak cukup fasilitas untuk memenuhi segala keperluannya.

Dari hasil sementara Sensus Penduduk tahun 1980 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Makale sebanyak 39.377 orang yang terdiri atas laki-laki 19.838 dan perempuan 19.539 orang. Atas dasar itu pertambahan penduduk dari tahun 1979 sampai tahun 1980, yaitu selama satu tahun adalah 1,06%. Di antara desa-desa yang mempunyai persentasi tertinggi pertambahannya adalah desa Bombongan, yaitu sebanyak 1,14%. Hasil Sensus penduduk tahun 1980 di Kecamatan Makale, terlihat dalam Tabel II – 22.

**Tabel II – 22 DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT JENIS
KELAMIN TIAP DESA, KECAMATAN MAKALE,
KABUPATEN TATOR *) (Tahun 1980)**

Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah	Kepadatan Penduduk
	Lk	Pr.		
1. Sarira	2.049	1.937	3.986	66
2. Batupapan	2.486	2.469	4.955	360
3. Bungin	2.547	2.422	4.969	273
4. Bombongan	4.422	4.525	8.947	559
5. Manggau	3.435	3.366	6.801	283
6. Tiromanda	2.223	2.148	4.371	145
7. Pa'buaran	2.676	2.672	5.348	78
Jumlah	19.838	19.539	39.377	169

*) Angka sementara hasil Sensus penduduk tahun 1980

Sumber : Catatan Kepala Kecamatan Makale

Hasil sensus tersebut menunjukkan jumlah golongan laki-laki dan perempuan agak berimbang, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertambahan penduduk Desa Batupapan selama setahun hanya 1,04%, sedang desa-desa lainnya dalam kecamatan itu seperti Desa Sarira 1,04%, Desa Bungin 1,06%, Desa Bombongan 1,13%, Desa Manggau 1,09%, Desa Tiromanda 1,01%, dan Desa Pa'buaran 0,96%. Selanjutnya, gambaran mengenai mutasi penduduk selama tahun 1979 di Kecamatan Makale, dapat dilihat dalam Tabel II – 23.

**Tabel II – 23 MUTASI PENDUDUK TIAP DESA DALAM
KECAMATAN MAKALE (Tahun 1979)**

Desa	Lahir	Datang	Pindah	Meninggal	Tambah	Kurang
1. Sarira	11	1	3	14	12	17
2. Bungin	7	20	11	24	27	35
3. Batupapan	3	2	6	10	5	16
4. Bombongan	4	2	3	4	6	7
5. Manggau	12	—	4	4	12	8
6. Tiromanda	9	—	8	2	9	10
7. Pa'buaran	27	1	4	8	28	12

Sumber : Diolah dari arsip Kantor Kecamatan Makale

Dari Tabel II – 23 tampak bahwa penduduk Kecamatan Makale dalam tahun 1979 lebih banyak yang pindah daripada yang masuk, sedang jumlah orang yang lahir lebih besar daripada orang yang meninggal. Selisih jumlah orang yang lahir dari orang yang meninggal 7 orang, sedang yang pindah dengan yang masuk 13 orang. Ini berarti bahwa berkurangnya penduduk kecamatan yang sebanyak 6 orang itu terutama disebabkan oleh orang pindah. Gejala ini dapat menjadi indikator bahwa kehidupan ekonomi penduduk di kecamatan itu cenderung melemah.

Migrasi musiman orang Toraja keluar desa, terutama mengunjungi kota-kota terdekat dan ke Ujungpandang untuk mencari tambahan pendapatan. Pada umumnya mereka tidak melaporkan kepergiannya itu karena direncanakan akan kembali lagi bila tiba musim turun sawah. Mereka yang berpindah menetap di negeri tujuan, tidak langsung mengubah status kependudukannya, bahkan adakalanya mereka tetap terdaftar di negeri asalnya. Meskipun mereka menetap di negeri tujuan bersama anak isterinya, hampir dapat dikatakan mereka sering pulang balik untuk mengunjungi upacara pemakaman keluarganya setiap saat.

Ikatan dengan negeri asal sangat ketat, disebabkan adanya sifat kekeluargaan yang mendalam dan senantiasa mengingatkan mereka untuk kembali dan berkubur di negerinya, serta sifat cinta negeri leluhur yang diikat oleh satu sistem kepercayaan pada arwah nenek moyang yang disebut Aluk Todolo. Ikatan itu dimanifestasikan dalam upacara pemakaman dengan suatu kewajiban pemberian

sumbangan sebagai simbol hubungan kekeluargaan dan senegeri asal. Mobilitas mereka keluar desa untuk mencari tambahan penghasilan di negeri lain, erat hubungannya dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban itu dihubungkan dengan martabat sosial seseorang. Barang siapa yang mentaati secara penuh akan memperoleh nilai tertentu dalam kejadian-kejadian sosial. Pelaksanaan kewajiban itu menjadi ukuran seseorang memperoleh pujian atau dicelah dan tersisih. Kewajiban itu memberi motivasi untuk keluar desa mencari taraf penghidupan yang lebih baik demi untuk kembali ke negeri asalnya. Persebaran penduduk Kabupaten Tana Toraja menurut kecamatan, dapat dilihat pada Tabel II – 24 dalam lampiran.

3. Watak umum dan ciri-ciri mobilitas

Daerah yang dikenal tinggi mobilitas penduduknya di Sulawesi Selatan, adalah Kabupaten Wajo, Bone, Sidenreng, dan Pinrang, kemudian menyusul tana Toraja. Rata-rata penduduk Sulawesi Selatan yang bermigrasi keluar sebanyak 58.000 setahun sejak tahun 1970. Selain ke Sumatera dan Jawa, banyak juga yang ke Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan 5 tahun terakhir ini banyak pula ke Irian Jaya. Di samping migrasi keluar propinsi, terjadi pula migrasi lokal antara kabupaten-kabupaten.

Kepindahan fisik para migran tidak berarti status kependudukan turut dipindahkan. Banyak contoh menunjukkan bahwa mereka yang berpindah sudah beberapa tahun di negeri tujuan, masih ingin dicatat sebagai penduduk daerah asalnya dan tercatat pula di negeri tujuan. Kepergiannyapun sering tidak dilaporkan sampai mereka merasa sudah mempunyai pekerjaan tetap atau milik yang tetap di negeri tujuan, barulah dialihkan status kependudukannya. Everett S. Lee (1976 : 5) mengemukakan bahwa migrasi ialah perubahan tempat tinggal secara permanen. Ini berarti bahwa ia menekankan pada segi-segi permanennya migran tersebut dan tidak memasukkan sebagai gejala migrasi pekerja-pekerja musiman yang tidak lama berdiam di suatu tempat tujuan.

Ada perbedaan-perbedaan baik dari segi jarak, lama menetap, tempat tujuan, maupun latar belakang berkenaan dengan perpindahan penduduk di Sulawesi Selatan. Misalnya orang Toraja kebanyakan berpindah ke kota-kota terdekat di Sulawesi Selatan. Sebagiannya lagi dalam jumlah yang relatif kecil ke Kalimantan

Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Irian Jaya. Di daerah asalnya mereka adalah petani-petani. Di negeri tujuan, mereka menjadi pengrajin-pengrajin yang terampil. Mereka melakukan pekerjaan sebagai tukang sepatu, tukang kayu, dan tukang batu. Lain halnya dengan orang Bugis. Sebagai petani di daerah asalnya, setelah pindah ke daerah lain, mereka mencari daerah pertanian untuk bertani juga. Kalau tidak berhasil sebagai petani mereka menjadi pedagang dan wiraswasta yang gesit. Mereka senantiasa berusaha membeli tanah pertanian di negeri tujuan atau di negeri asalnya bila mereka sudah mempunyai cukup modal. Apabila sudah memperoleh tanah di negeri tujuan, mereka berusaha untuk membangun rumah, kemudian mengundang keluarganya ke tempatnya sekarang sebagai tanda bahwa tempatnya sekarang sama dengan negeri asalnya dan mereka merasakan kehidupan di negeri tujuan sudah permanen. Apabila sudah demikian keadaannya, maka migran itu dapat dikategorikan sebagai migran menetap. Sama halnya nelayan-nelayan Bugis yang sering mengadakan migrasi musiman ke Kalimantan. Jika mereka sudah membiasakan dirinya menetap di daratan dalam sebuah rumah dan bukan lagi perahunya yang dijadikan rumah, maka hal itu merupakan tanda bahwa mereka dapat dikelompokkan sebagai migran menetap.

Memang agak aneh kedengaran, kalau dikatakan bahwa orang Bugis sebagai petani meninggalkan tanah pertaniannya, berpindah ke negeri lain mencari lapangan kerja pertanian juga. Hal ini kebanyakan dilakukan pula oleh nelayan-nelayan Bugis yang berpindah ke Kalimantan Timur. Dikatakan aneh jika dihubungkan dengan alasan perpindahan untuk mencari sumber penghidupan yang lebih baik, seolah-olah lapangan kerja pertanian di negeri asal tidak mampu lagi memberikan jaminan kerja atau kesempatan kerja yang lebih baik.

Pendapat umum mengatakan bahwa penduduk pantai lebih besar mobilitasnya daripada penduduk pedalaman dengan latar belakang kehidupan bertani. Kenyataan menunjukkan bahwa orang Toraja yang berdiam di dataran tinggi dan orang-orang di daerah Wajo, Bone, Sidenreng, dan Pinrang, yang juga berkebudayaan tani itu sangat menonjol mobilitasnya.

Penelitian mengenai migrasi di Sulawesi Selatan dewasa ini dengan bertolak dari konsep bahwa *penduduk pantai lebih tinggi mobilitasnya daripada penduduk pedalaman tidak dapat dipertahankan lagi* karena integrasi suku bangsa sudah demikian

tinggi disebabkan oleh lalu lintas dan fasilitas pengangkutan. Suatu hal perlu ditinjau kembali mengenai anggapan bahwa orang Bugis itu mempunyai mental perantau. Mungkin anggapan ini dikaitkan dengan lapangan kerjanya sebagai *pasompe* (pelayan-pedagang) dengan perahu *rimisi* yang mengangkut barang antar pulau di Indonesia. Seolah-olah profesi sebagai pelayan pedagang itu adalah sikap mental.

Sejarah migrasi pada umumnya di Sulawesi Selatan harus dicari dasar-dasarnya jauh ke belakang. Sejak peng-Islaman oleh Kerajaan Gowa pada awal abad ke XVII ke daerah-daerah pedalaman, timbul berbagai-bagai kejadian sosial yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Dilanjutkan dengan peperangan antar kerajaan, terutama peperangan antara Kerajaan Bone dengan Gowa yang berakhir dengan kekalahan Gowa pada paruh kedua Abad XVII itu. Proses peng-Islaman yang disusul oleh perang untuk penguasaan hegemoni melibatkan seluruh rakyat. Ke dua kerajaan itu, Bone dan Gowa,¹ berhasil menjadikan negerinya sebagai kerajaan maritim. Abad ke XIX sampai awal abad XX terjadi gejolak sosial untuk mempertahankan kemerdekaan dari campur tangan penjajah. Dalam tahun 1906 Sulawesi Selatan secara yuridis telah berada di tangan Belanda dan beberapa kerajaan lokal yang berkongsi dengan Belanda sedikit mendapatkan kebebasan untuk mengurus daerahnya. Sampai revolusi fisik setelah proklamasi, gejolak sosial berlangsung terus yang dilanjutkan oleh gerombolan DI/TII yang baru berakhir pada tahun 1960-an.

Jadi dapat dikatakan bahwa daerah ini sebelumnya tidak pernah tenang. Akibat dari kondisi yang demikian, penduduk Sulawesi Selatan banyak meninggalkan daerahnya dengan motif mencari keselamatan hidup. Pengaruh sampingan pembangunan sedikit banyak mempengaruhi pula penduduk sehingga sejumlah dari mereka lalu memutuskan untuk berpindah ke daerah lain mencari penghidupan yang lebih baik. Kemudian modernisasi meluas sampai ke pedalaman dalam bentuk perbaikan berbagai macam sarana dan fasilitas kehidupan, keluarnya berbagai macam aturan, peningkatan produksi di bidang pertanian, dan penduduk makin mengenal berbagai peralatan modern. Namun di pihak lain tingkat pendapatan penduduk belum sebanding dengan kemajuan kebutuhan mereka. Dengan demikian motif migrasi-keluar bervariasi sesuai dengan variasi tuntunan hidup.

Migrasi dengan gaya beranting dapat juga terjadi, yaitu orang yang sudah lebih dulu pindah mengundang anggota keluarganya

dan sanak familinya sehingga terjadi perpindahan spontan keluarga demi keluarga. Ada kalanya mereka melaporkan diri kepada pihak berwajib, tetapi sebagian yang lain tidak melaporkan keberangkatannya. Migrasi spontan yang menempuh gaya beranting itu berlangsung sepanjang tahun. Rupanya modernisasi dan perbaikan lapangan hidup di bidang pertanian belum berhasil menahan atau mencegah arus migrasi-keluar. Pengetahuan mereka tentang lautan dan ketrampilan berlayar merupakan salah satu jalan dan memudahkan mereka mengambil keputusan untuk migrasi, ditambah lagi dengan sistem nilai yang berpusat pada *Siri'*, yakni malu hidup menderita dan tertekan di kampung halamannya sendiri. Semua itu melatar belakangi tujuan perpindahan mereka ke negeri lain.

Selain mobilitas penduduk yang berbentuk migrasi spontan seperti yang dikemukakan di atas, terdapat pula mobilitas penduduk dengan pengertian bahwa penduduk desa tertentu mengunjungi desa-desa sekitarnya dengan maksud menghadiri upacara pemakaman keluarganya atau upacara-upacara lain yang termasuk upacara *Rambu Tuka* dan *Rambu Solo di Tana Toraja*.

Upacara *Rambu Tuka*, adalah upacara syukuran atau upacara suka-ria dan upacara *Rambu Solo* adalah upacara duka-cita, termasuk upacara pemakaman. Bagi penduduk Desa Wage, perpindahan semacam itu terjadi bila mengunjungi pesta perkawinan keluarga, famili dan sahabat di desa lain.

Para pedagang keliling dari kedua desa itu mengunjungi pasar-pasar yang berada di sekitarnya. Orang Toraja menganut sistem peredaran 6 hari mata-pasar, sedang orang Bugis di Wajo menganut sistem peredaran 5 hari mata-pasar. Para pedagang tersebut mulai berangkat meninggalkan rumahnya pukul 5.00 pagi dan kembali lagi di waktu sore pukul 15.00. Sering pula mereka bermalam untuk mengunjungi pasar berikut besoknya di lain tempat. Penduduk yang berbelanja harus pula mengikuti sistem pasar ini. Dengan demikian mereka pun berpindah dari satu desa ke desa lain dalam wilayah Kabupaten.

Berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa ada tiga ciri mobilitas penduduk sesuai dengan ungkapan bahasa Bugis, ialah (a) *Massaro lellang*, (b) *Llao Sompe'* dan (c) *Mallekke' dapureng*. *Massaro lellang* terbagi dua, yakni *massaro lellang llao-lisu* dan *massaro lellang mabbeni-benni*. *Massaro lellang* ialah berkunjung ke suatu desa atau famili di desa lain, adakalanya *llao-lisu* (pergi-pulang) hari itu juga dan adakalanya pula *mabbeni-benni* (bermalam beberapa hari sampai dengan satu minggu). *Llao-sompe*

ialah pergi merantau atau pergi berlayar. Meskipun perjalanan itu tidak melalui lautan, dikatakan pula pergi berlayar. Jadi arti merantau adalah pergi ke negeri orang satu sampai dengan enam bulan. *Mallekke' datureng* ialah pindah negeri. Biasa pula dalam bahasa Bugis disebut *lece' wanua* atau pindah negeri.

Ciri mobilitas yang ketiga ini dapat disamakan dengan migrasi menetap. Mobilitas *sompe'* dapat disamakan dengan migrasi musiman. Migrasi musiman bisa berakibat menetapnya migran tersebut dinegeri tujuan. Demikian pula pada *sompe'*, penduduk dapat memilih suatu daerah untuk menetap bilamana daerah itu berkenan di hatinya, setelah ia melihat kemungkinan memperoleh lapangan kerja. Ketiga ciri mobilitas ini sudah berlangsung lama, mengingat bahwa istilah-istilah yang digunakan itu banyak dikenal dalam masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk lebih merasa terikat dengan tanahnya atau dengan pekerjaan di pertanian, serta lebih merasa aman dan tenteram apabila berada di tengah-tengah keluarga dan sanak saudaranya. Kalau seseorang bepergian, ia berusaha untuk kembali pada hari yang sama, atau kalau dalam keadaan terpaksa baru ia menginap, dan secepatnya ia berusaha untuk kembali. Motivasi lainnya ialah bahwa setelah selesai panen dan setelah musim kemarau tiba, pengairan jadi kering dan tanah tak dapat diolah, lalu mereka berusaha menambah penghasilan di lain tempat atau berusaha keluar desa. Kepergiannya itu bisa memakan waktu sampai dengan seminggu atau sampai selesai urusannya, tetapi segera ia kembali ke desanya yang mungkin akan dilanjutkan lagi di lain hari. Demikian seterusnya sehingga datang musim untuk turun sawah. Apabila musim hujan sudah tiba, maka semua urusan keluar desa difangguhkan.

Mereka yang mengolah tanah sempit, dengan sendirinya waktu yang digunakan mengurus sawah cepat selesai dan pemeliharannya tidak terlalu memakan waktu lama. Waktu yang selebihnya digunakan untuk kegiatan lain yang mungkin ada di luar desa. Berbeda halnya orang yang memiliki sawah yang terletak di lain desa, maka waktu yang digunakan adalah pergi-pulang pada hari yang sama atau bermalam di tempat sawahnya pada sahabat atau familinya.

Massaro lellang ke lain desa sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, jenis kegiatan, dan kesibukan di sawah. Murid SLTP pergi-pulang sekolah yang terletak di desa lain, sama halnya pegawai

negeri yang bekerja di desa lain atau pedagang yang pergi pulang berdagang. Semuanya disebut *massro lellang* ke desa lain. Biasanya istilah ini hanya dikenakan kepada kunjungan ke rumah keluarga atau famili yang berada di desa lain. Mereka berkunjung karena upacara pemakaman neneknya atau ada pesta perkawinan salah seorang anggota keluarga atau sahabatnya. Biasa saja *massa-rollellang* kepada keluarga yang jauh di kabupaten lain, bukan semata-mata karena pesta, melainkan lebih penting artinya untuk *sita-sita* (berjumpa) dan saling mendekatkan tali persaudaraan.

Llau sompe lebih banyak dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki, karena memerlukan kewaspadaan dan keuletan, apalagi dalam perjalanan jauh. Tujuan lebih utama untuk melihat *labangeng* (lapangan kerja) atau untuk mencari rezeki, sedang perempuan menunggu di rumah mengurus rumah tangga. *Mallekke'dapureng* adalah berpindah bersama keluarga, yaitu isteri dan anak-anaknya, bilamana pekerjaan di negeri tujuan sudah jelas, dan sudah dipastikan tidak akan menganggur. Mobilitas ini agak jarang dilakukan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Perpindahan semacam itu banyak dilakukan oleh orang Bugis pada waktu di Sulawesi Selatan timbul kekacauan oleh gerombolan DI/TII. Dewasa ini perpindahan semacam itu masih berlangsung, tetapi tidak lagi dalam rombongan yang besar. Migrasi keluar umumnya dilakukan oleh pemuda-pemuda yang belum kawin. Mereka berpindah ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Irian Jaya, dan Sulawesi Tenggara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa daya tolak negeri asal pada umumnya timbul karena dua hal. Pertama, adanya tugas moral untuk mengunjungi sanak saudara, keluarga yang berdiam di daerah lain, terutama ia kunjungi untuk upacara-upacara atau pesta-pesta dan hari-hari besar agama. Kedua, adanya rasa tidak puas terhadap usaha taninya, kurang kesempatan kerja dan terbatasnya pelayanan dan fasilitas pendidikan. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa mobilitas penduduk itu adalah karena faktor-faktor ekonomi dan sosial. Kedua-duanya secara bersama-sama memegang peranan dalam pengambilan keputusan bagi seseorang apakah akan berpindah ke daerah lain ataukah tetap berdiam di dalam desa asalnya.

BAB III

HASIL TINDAKAN PENDUDUK

A. BIDANG KEPENDUDUKAN

Titik berat uraian berikut pada korelasi antara tantangan alam dengan potensi kependudukan. Bagi penduduk pedesaan, pertanian merupakan wujud korelasi yang paling menonjol. Pertanian merupakan sumber pendapatan terpenting dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Pertanian menyediakan 60 sampai dengan 85 persen lapangan kerja dan meliputi usaha produksi tanaman makanan pokok. Fungsi dan sumbangan pertanian kepada pembangunan ekonomi meliputi (a) peningkatan persediaan pangan dalam negeri, (b) memperbesar kemungkinan pemasaran dalam negeri, (c) meningkatkan persediaan tabungan dalam negeri, dan (d) memberikan devisa yang diperoleh dari ekspor hasil-hasil pertanian (Hla Myint : 1975 : 327 – 353).

Desa yang menjadi perhatian kita pada kesempatan ini, adalah Desa Wage dan Batupapan. Masing-masing mempunyai kepadatan penduduk 174 orang per KM² dan 343 orang per Km². Kepadatan agraris untuk Desa Wage sebesar 296 orang per Ha dan untuk Desa Batupapan sebesar 741 orang per Ha. Perkiraan jumlah angkatan kerja di Desa Wage adalah 20% dari seluruh jumlah penduduk desa itu sedang di Desa Batupapan 19,79%.

Tanah pertanian di Desa Wage (19.364 Ha) dan di Desa Batupapan (3.500 Ha) itu terdiri atas sawah irigasi desa, sawah tadah hujan, dan tegalan atau ladang. Kepadatan agraris adalah jumlah penduduk dibandingkan dengan luas tanah pertanian. Angka ini penting artinya bagi perencanaan desa, oleh karena kepadatan agraris itu membawa pengertian tentang lapangan kerja dan kesempatan kerja penduduk di pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian.

Penduduk kedua desa ini memiliki tanah pertanian sempit-sempit hanya sekelompok orang yang mempunyai tanah lebih dari 2 Ha. Pemilikan tanah pada lazimnya melalui prosedur hukum, seperti (a) pembagian warisan, (b) pembelian, (c) pemberian orang tua waktu kawin, dan (d) pembagian tanah swapraja (tanah *arajang* atau tanah *kawuwiyang*). Tanah arajang telah dibagi kepada penduduk dalam tahun 1961. Di Desa Batupapan, sesuai dengan

tradisi orang Toraja, seseorang dilarang menjual tanah atau se-kurang-kurangnya dianggap aib bila sampai terjadi penjualan tanah pertanian. Memang sekarang banyak kejadian tanah-tanah pertanian dijual dan dibeli oleh orang asal Toraja yang sudah lama di luar daerah dan memiliki modal. Pemilikan tanah pertanian di Tana Toraja lebih banyak dikuasai oleh golongan bangsawan yang diperolehnya dari tanah Tongkonan tempat ia berasal. Tanah wilayah Tongkonan tidak dibagi kepada penduduk, tetapi dibagi di kalangan bangsawan sendiri. Kemudian seorang bangsawan dapat menjualnya kepada orang lain jika memerlukan uang tunai atau karena terdorong sesuatu kebutuhan mendadak.

Tabel III – 1 PERKEMBANGAN PENDUDUK DESA WAGE DAN BATUPAPAN MEURUT JENIS KELAMIN DARI TAHUN 1975 s/d 1980

Tahun	Desa Wage			Desa Batupapan		
	Lk.	Pr.	Jumlah	Lk.	Pr.	Jumlah
1975	3.397	3.610	7.007	1.955	2.404	4.359
1976	3.515	3.744	7.259	2.168	2.479	4.647
1977	3.551	3.822	7.373	2.151	2.452	4.603
1978	3.850	4.374	8.224	2.266	2.376	4.642
1979	2.954	3.577	6.531	2.337	2.384	4.721
1980	3.677	4.230	7.907	2.486	2.469	4.955

Sumber : a. Diolah dari data Kantor Kepala Desa Wage dan Batupapan

b. Kantor Sensus dan Statistik Dati II Wajo dan Tana Toraja

Angka pada Tabel III – 1 menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di kedua desa ini tidak terlalu menonjol. Rata-rata pertambahan dalam setahun untuk Desa Wage 1,13% dan Desa Batupapan 1,14%. Kalau program Keluarga Berencana berhasil baik, maka jumlah tersebut masih bisa ditekan lagi. Apabila jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga, maka rata-rata tiap Kepala Keluarga beranggotakan 5 orang. Menurut

tradisi orang Bugis dan orang Toraja, suatu pantangan apabila dalam suatu rumah tangga terdapat dua buah dapur yang berarti di dalam rumah tangga tersebut terdapat dua Kepala Keluarga yang berpisah periuk. Setelah satu tahun menikah atau sesudah beranak lalu memisahkan diri untuk mendirikan rumah tangga baru, barulah si suami menjadi Kepala Keluarga. Selama menumpang pada orang tua ia tetap sebagai anggota keluarga orang tuanya. Letak rumah baru dapat di dekat rumah orangtua isteri atau rumah orangtua suami. Kedua cara ini dianggap ideal dan tampak dalam pola perkampungan. Kenyataan sekarang sudah banyak yang menyimpang dari pola ideal ini, karena faktor-faktor lapangan kerja dan sulitnya mendapatkan tanah.

Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk kedua desa itu adalah bertani. Pekerjaan pokok yang kedua penduduk Desa Wage adalah nelayan dan berdagang, sedang di Desa Batupapan adalah peternakan dan tukang. Tidak banyak penduduk yang bekerja pada lapangan kerja lainnya seperti pegawai (guru) dan jasa. Peternakan di Batupapan bukan merupakan usaha peternakan yang diorganisasi dan manajemen yang teratur, melainkan peternakan yang dilakukan oleh tiap Kepala Keluarga secara tradisional. Hampir setiap rumah tangga mempunyai kandang babi di samping atau di belakang rumahnya, karena babi sangat diperlukan dalam upacara-upacara. Pada setiap upacara sekurang-kurangnya harus dipotong seekor babi. Selain babi, beberapa Kepala Keluarga memelihara *tedong* (kerbau) yang dianggap tinggi nilai dan harganya, terutama kerbau *bonga* (kerbau belang). Adakalanya dalam upacara pemakaman dipotong puluhan sampai ratusan ekor kerbau yang diperoleh dari sumbangan para keluarga atau melalui pembelian. Karena itu pula babi dan kerbau dijual dengan harga tinggi kepada mereka yang ingin lebih meramaikan upacara pemakaman orang tuanya.

Termasuk pada lapangan kerja industri di kedua desa ini adalah pemeliharaan ulat sutera untuk produksi benang sutera di Wage, dan industri keramik di Batupapan. Industri ini turut memberi lapangan kerja kepada penduduk. Sebagian Kepala Keluarga semata-mata hidup dari pekerjaan ini. Menurut ceritera orang-orang Wage yang melakukan pemeliharaan ulat sutera, sebelum orang Jepang memasukkan bibit ulat sutera, bibit lokal yang dipelihara sejak tahun 1961 mampu memberikan penghasilan kurang lebih Rp.30.000,- sebulan. Bibit lokal musnah seluruhnya dalam tahun

1972 dan sejak itu didatangkan bibit dari Jepang. Jumlah pemeliharaan ulat sutera yang bibitnya berasal dari Jepang sudah terbatas. Pada hal pemeliharaan bibit lokal dapat dilakukan oleh semua orang di semua tempat.

Pada saat pertama memasuki kedua desa ini, pandangan dan pikiran kita akan tertarik pada bentuk dan ramuan bahan-bahan yang digunakan pada perumahan. Rumah dengan segala bentuk dan keanehan yang terdapat di dalamnya, menunjukkan ciri-ciri masing-masing kebudayaan. Ramuan rumah itu, menunjukkan potensi alam yang dimiliki daerah itu. Sekarang dengan adanya bahan bangunan yang didatangkan dari luar, ramuan rumah lebih menonjolkan sifat sosial dan kemampuan ekonomi dari pemiliknya. Bahan yang digunakan penduduk untuk membangun rumah bermacam-macam, antara lain tertera pada Tabel III – 3.

Tabel III – 3 BAHAN–BAHAN BANGUNAN PERUMAHAN DI DESA WAGE DAN DESA BATUPAPAN (Tahun 1979)

Bahan - bahan	Desa Wage (buah)	Dewa Batupapan (buah)
I. Atap.		
a. Seng	696	161
b. Bambu	—	592
c. Campuran	172	23
d. Daun nipa	539	—
e. Lolong	—	71
	<hr/> 1.407	<hr/> 847
II. Lantai		
a. Papan	773	759
b. Bambu	634	88
	<hr/> 1.407	<hr/> 847

III. Dinding		
a. Papan	444	217
b. Zink	59	—
c. Bambu	879	630
d. Daun nipa	25	—
<hr/>		
Jumlah KK	1.407	847
<hr/>		

Sumber : a. Data primer

b. Diolah dari data Kantor Kepala Desa Wage dan Batupapan

Ada lima bahan utama yang digunakan pada bangunan rumah, baik rumah-rumah Bugis maupun rumah-rumah orang Toraja, yaitu papan kayu, bambu, seng, nipa, dan rumput lalang. Orang Toraja menggunakan rumput lalang dan bambu sebagai atap rumah. Sekarang sudah banyak juga yang menggunakan seng. Bentuk rumah asli sebagian sudah berubah mengikuti bentuk rumah Bugis, ukuran panjang dan lebarnya diperluas, ventilasi dan jendela sudah diperlebar. Atap dan dinding rumah Bugis terdiri dari daun nipa atau bambu. Sekarang sebagian besar menggunakan seng untuk menghindari kebakaran.

1. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas

Walaupun tidak menonjol, jumlah penduduk di kedua desa itu dari tahun ke tahun mengalami penambahan. Karena itu pembukaan pemukiman baru di kedua desa itu berlangsung terus, meskipun dalam skala kecil. Areal yang 10 tahun lalu, merupakan tanah kosong, sekarang sudah ramai dengan perumahan, bahkan sudah menjadi kota-kota kecil. Pengaturan jalanan di pemukiman itu makin tertib. Dari lereng-lereng gunung yang tadinya masih sepi, sekarang pada malam hari terpancar sinar-sinar lampu di rumah-rumah penduduk.

Pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, seperti intensitas penggunaan tanah ditingkatkan melalui penanaman dua kali setahun, disertai perbaikan jaringan pengairan desa. Tanaman-tanaman baru diintroduksikan agar dapat memberikan produktivitas yang lebih

tinggi. Dimasukkan pula jenis-jenis tanaman budidaya serta tersebarnya secara meluas budidaya palawija. Bahkan terakhir ini dimasukkan varietas padi yang dapat berproduksi tinggi dalam rangka "Revolusi hijau".

Akan tetapi dengan alasan-alasan seperti yang sudah dikemukakan pada bab terdahulu sebagian penduduk kedua desa itu pernah pindah ke daerah lain. Perpindahan penduduk secara spontan dari Desa Wage dan Batupapan secara individual berlangsung sepanjang tahun. Adakalanya terjadi migrasi musiman atau melalui cara merantau yang kemudian menetap di negeri tujuan yang sudah dipilih.

Orang Toraja berpindah ke kota-kota terdekat menjadi tukang kayu dan tukang sepatu. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tukang sepatu di Sulawesi Selatan adalah orang Toraja. Mereka memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pertukangan, termasuk tukang kayu yang membuat perabot rumah tangga. Sebagian diantaranya menetap di kota-kota, hanya pada saat tertentu mereka kembali ke negeri asal jika sampai upacara pemakaman atau upacara-upacara yang dilakukan oleh keluarganya. Sebagian lagi berada di kota-kota secara musiman, jika tiba musim turun sawah mereka kembali bekerja sawah dan kemudian kembali lagi ke kota. Orang Toraja yang berpindah ke Kalimantan, Sulawesi Tenggara, dan Irian Jaya melakukan pekerjaan yang sama. Meskipun orang Toraja secara fisik berada di rantau, namun rohani dan perhatiannya senantiasa terikat pada negeri asal sebagai negeri leluhur. Oleh karena itu bila terjadi upacara, terutama upacara pemakaman, mereka berusaha sedapat mungkin menghadirinya. Mereka dipandang berhasil bila mereka datang dengan menampilkan hewan-heawan yang akan dikorbankan dalam upacara. Dorongan mereka bermigrasi antara lain karena sempitnya tanah pertanian dan kesempatan kerja. Tetapi sebagian besar terdorong oleh keinginan untuk mengumpul harta guna meramaikan upacara dengan pematangan hewan yang berjumlah banyak.

Transmigrasi pada orang Bugis selalu dikaitkan dengan kebiasaan mereka sebagai perantau yang sering mengakibatkan menetapnya seseorang di negeri tujuan. Kebiasaan mereka sebagai perantau itu dihubungkan dengan keterampilan mereka berlayar dan pengetahuan mereka tentang lautan. Sesungguhnya pekerjaan *sompe'* (berlayar) itu adalah suatu profesi. *Sompe'* adalah pelayar-pedagang yang berkeliling di Nusantara mengangkut barang dan

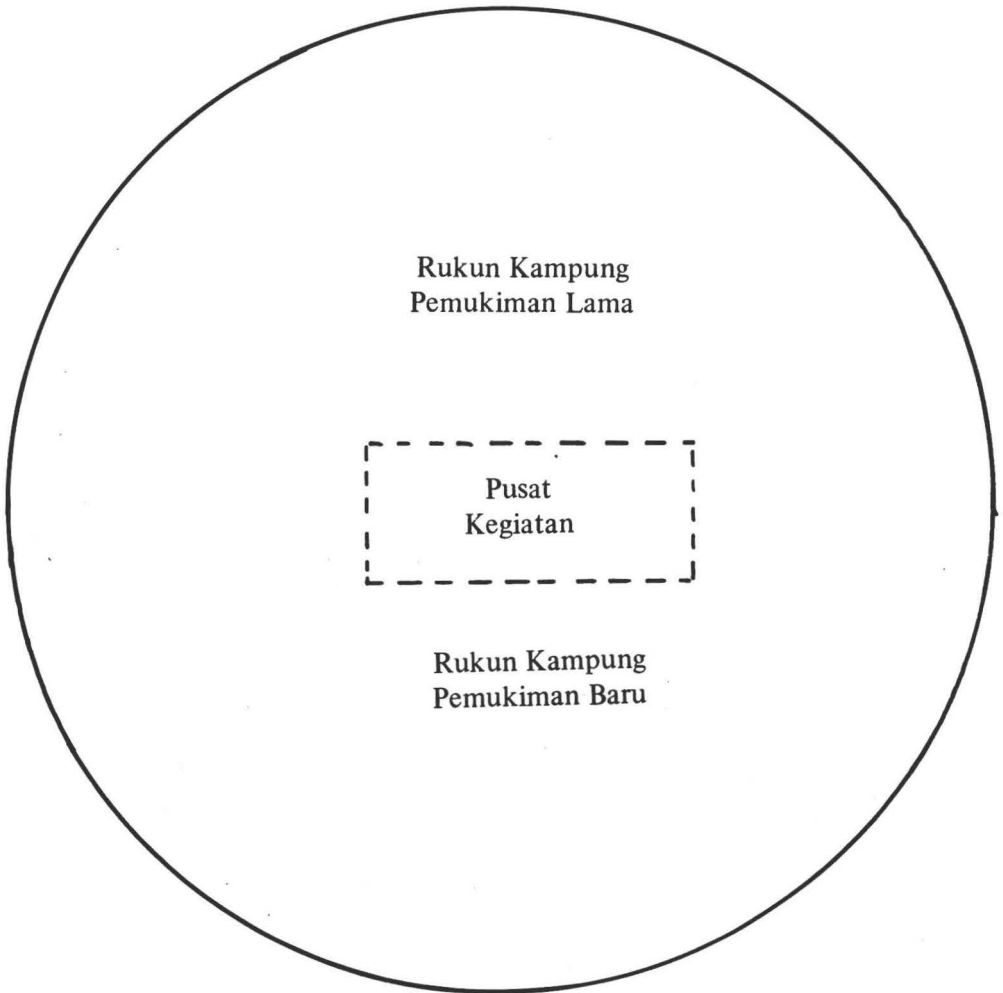
hasil-hasil bumi dari satu pulau ke pulau lain. Dorongan melakukan transmigrasi spontan, sebagian oleh faktor-faktor ekonomi dan sebagiannya lagi oleh faktor-faktor sosial. Hal ini sudah dibiarkan di depan.

Transmigrasi spontan dan pemukiman baru bagi orang Bugis dan Toraja, rupanya tidak banyak mengalami masalah. Mereka berpindah tanpa merepotkan pemerintah. Pertama-tama mereka menumpang pada keluarga atau famili yang sudah lebih dahulu berada di tempat tujuan. Kalau tidak, mereka menumpang pada sahabat atau sekampungnya. Melalui famili dan sahabat sekampung itu mereka mendapatkan kerja. Apabila pekerjaan yang dipilih sudah mendatangkan hasil, secara berangsur-angsur ia berusaha mendirikan rumah di tempat itu atau di tempat sawah dan kebunnya yang sudah memberi harapan akan mendatangkan hasil. Transmigran tersebut kemudian merupakan penduduk yang menetap pada suatu pemukiman baru, atau pemukiman yang berada di antara pemukiman yang sudah lama.

Di kedua desa itu tidak ada pemukiman transmigran. Namun pembangunan menciptakan mobilitas dan selanjutnya menciptakan pemukiman baru. Masalah sekarang, bagaimana meningkatkan mutu pemukiman baru itu di kemudian hari. Karena itu persiapan wilayah pemukiman harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sudah banyak konsep dan model pemukiman yang dibuat sekarang, terutama bagi transmigrasi dari Jawa dan Bali, tetapi belum ada yang memuaskan secara penuh. Kalau kita kembali pada ceritera pengembara di masa yang lalu, maka pasti di sekitar pusat kegiatan akan berkembang pemukiman baru.

Rupanya kelahiran pemukiman baru sekarang masih mengikuti konsep "mendekati pusat kegiatan" seperti dalam ceritera pengembara tadi, seperti yang diperlihatkan pada Gambar III - 1.

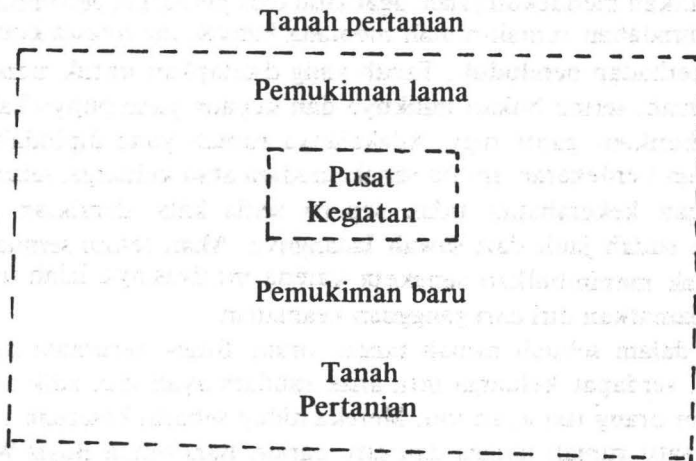
PEMUKIMAN BARU DI ANTARA RK LAMA



Gambar itu menunjukkan bahwa sejumlah Kepala Keluarga transmigran menempati ruang antara Rukun Kampung dalam sebuah desa. Jumlah KK transmigran sama dengan jumlah KK Rukun Kampung yang lama. Bentuk rumah-rumah transmigrasi harus pula sama dengan rumah-rumah Rukun Kampung yang lama. Antara RK lama dan RK baru terjadi saling berkomunikasi di pusat kegiatan yang terletak tidak jauh dari RK yang ada dalam desa tersebut. Model pemukiman Rukun Kampung yang baru harus mengikuti model pemukiman yang sudah lama.

Wilayah pemukiman orang Bugis berbentuk segi empat. Rumah-rumah menghadap ke arah empat penjurur angin. Sedang model pemukiman orang Toraja adalah berbanjar mengikuti arah matahari terbenam, dari timur ke barat dan rumah-rumah harus menghadap ke utara.

Rukun Kampung transmigran dijadikan salah satu RK dalam desa. Keuntungan konsep ini adalah cepat terjalannya integrasi sosial dan adaptasi kultural di antara penduduk RK yang perlahan-lahan akhirnya pada generasi kedua sudah terjadi pembauran kultural.



Gambar III – 2 PEMUKIMAN BARU BERADA DALAM SATU KOMPLEKS KERJA DENGAN PEMUKIMAN LAMA

Gambar III – 2 memperlihatkan model pemukiman yang menempatkan tempat kerja di antara pemukiman lama dengan pe-

mukiman baru dalam satu wilayah pertanian sedang pada model pertama letak pemukiman berhadap-hadapan dan saling bertemu di pusat-pusat kegiatan dan pelayanan. Integrasi dan adaptasi kultural mungkin bisa berlangsung melalui tempat kerjanya di samping pertemuan mereka di pusat-pusat kegiatan, fasilitas dan pelayanan.

2. Penyebaran pemukiman dan sarana fisik

a. Desa Wage

Desa Wage terbagi atas 5 (lima) buah Kampung, 10 (sepuluh) Rukun Kampung, dan 34 (tigapuluh empat) Rukun Tetangga. Organisasi pemukiman ini mulai dibentuk dalam tahun 1961, saat dimulai pemugaran desa-desa di Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam tahun itu pula rumah-rumah yang jauh dari jalan raya dipindahkan ke dekat pinggir jalan untuk memudahkan pengawasannya dari gangguan gerombolan DI/TII. Gangguan gerombolan waktu itu membuat penduduk terbagi dua, yaitu sebagian yang dapat dikuasai oleh gerombolan dan sisanya dikuasai oleh pemerintah. Karena itu pemerintah menganjurkan agar rumah rumah penduduk dipindahkan mendekati jalan, agar jauh dari perhatian gerombolan.

Pemindahan rumah-rumah memang banyak membawa konsekuensi terhadap penduduk. Tanah yang ditetapkan untuk mendirikan rumah, sering bukan miliknya dan kepada yang punya hak tidak diberikan ganti rugi. Adakalanya rumah yang dipindahkan tidak lagi berdekatan antara sanak saudara atau keluarga, sehingga hubungan kekerabatan tidak seperti sedia kala, demikian pula mereka sudah jauh dari sawah ladangnya. Akan tetapi semuanya itu tidak menimbulkan sengketa karena motivasinya ialah untuk menyelamatkan diri dari gangguan keamanan.

Di dalam sebuah rumah tangga orang Bugis, terutama di pedesaan, terdapat keluarga inti, anak saudara ayah/ibu, adik ayah/ibu, dan orang tua ayah/ibu. Mereka hidup sebagai kesatuan sosial dalam satu rumah tangga dan satu dapur. Bagi orang Bugis Wajo, adalah menjadi pantangan jika dalam sebuah rumah tangga terdapat dua dapur. Ayah menjadi penanggung jawab atas penghuni rumah. Penghuni sebuah rumah tangga tidak tetap, karena mungkin nenek atau ipar pada suatu saat berpindah ke rumah anaknya yang lain. Jumlah anggota di dalam sebuah rumah tangga terdiri antara 3 sampai 9 orang atau lebih.

Tabel III – 4 **DISTRIBUSI KEPALA KELUARGA (KK), RK,
DAN RT DI DESA WAGE (Tahun 1979)**

Kampung	Luas wilayah (Km ²)	J u m l a h		
		KK	RK	RT
1. Caleko	6,99	258	2	6
2. Sumpangbaka	6,16	118	2	6
3. Lampajo	6,66	269	2	6
4. Massappa	8,24	295	2	7
5. Bontote'ne	9,52	366	2	9
Jumlah	37,57	1.306	10	34

- Sumber : a. Kantor Desa Wage
b. Kantor Kecamatan Sabbangparu
c. Catatan Kantor Sensus dan Statistik Wajo

Dari Tabel III – 4 dapat diperoleh angka rata-rata jumlah KK pada setiap Ha. Kampung Caleco 40 KK/Ha, Sumpangbaka 29 KK/Ha, Lampajo 54 KK/Ha, Massappa 59 KK/Ha dan Kampung Bontote'ne 76 KK/Ha. Apabila setiap KK menghuni sebuah rumah tangga, maka tiap Rukun Tetangga terdiri atas 38 buah rumah dan tiap RK terdiri atas 131 buah rumah.

Selanjutnya dapat pula dihitung *land man ratio*, jika jumlah KK dan luas wilayah dijadikan dasar perkiraan. Kalau tiap rumah (atau KK) menggunakan tanah perumahan 450 m² (15 x 30), maka luas tanah untuk perumahan bagi KK mencapai 5.877 Ha. Sisa luas wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh anggota keluarga sebanyak 31.693 Ha. Tentu saja tidak semua tanah ini dimanfaatkan dewasa ini. Sebagiannya lagi terdiri atas sungai, rawa dan tanah-tanah kritis selain areal pesawahan.

Orang Bugis di Desa Wage membangun rumah di atas tiang. Lazim disebut *rumah panggung*. Jumlah tiang disesuaikan dengan banyaknya petak yang diperlukan. Apabila yang diperlukan tiga petak, maka jumlah tiang 16 batang di luar *tamping* (tambahan

samping). Susunan petak diatur menurut fungsinya, misalnya petak bagian luar (depan) berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu, bagian tengah untuk tempat tidur Kepala Keluarga, sedang bagian belakang untuk anak gadis atau keluarga perempuan. Rumah dibagi atas tiga tingkat. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Bagian atas digunakan sebagai lumbung padi, bagian tengah sebagai tempat anggota keluarga, dan tingkat bawah untuk hewan piaraan dan segala macam peralatan pertanian atau tempat ongkongan kayu bakar. Sekarang sebagian penduduk tidak lagi menggunakan bagian atas itu sebagai tempat menyimpan padi karena padi langsung diolah menjadi beras dengan alat yang disebut huller.

Demikian pula bahan pembuat rumah sudah mulai berganti. Dewasa ini daun nipa sebagai atap diganti dengan seng, sedang anyaman bambu sebagai dinding diganti dengan papan kayu. Rumah batu sebagai tempat tinggal hanya tiga buah. Ini berarti kemampuan dan kesukaan penduduk masih pada bentuk rumah panggung. Sering tampak bentuk campuran, yakni rumah panggung dipertahankan, tetapi tangga dan dapur dibuat dari bahan batu.

Sebelum mengalami pemugaran dalam tahun 1961, suasana pemukiman orang Bugis adalah sebagai berikut. Letak rumah berderet-deret menghadap pada arah tertentu sesuai dengan pandangan hidup mereka. Di halaman depan, tumbuh pohon buah-buahan. Depan kolong rumah biasanya menjadi tempat para wanita menumbuk padi sampai hari menjelang malam. Di sekitar lesung berkeliaran beberapa ekor ayam mencari makanan. Biasanya tampak pula anak-anak bermain di halaman rumah sambil menyaksikan alunan bunyi lesung. Di bagian belakang rumah terdapat hewan piaraan dalam kandang. Sedang di kejauhan tampak deretan petak-petak sawah dan kebun buah-buahan memenuhi lereng dan lembah-lembah. Dari jauh kedengaran desir air memasuki tambak-tambak.

Sebelum membangun sebuah rumah, terlebih dahulu penduduk meminta nasehat *uragi bola* dan *panre bola* tentang letak dan arah yang paling baik, serta mengenai hari baik untuk membangunnya. Jadi, pembangunan sebuah rumah tempat tinggal harus pada suatu situs dan arah yang sesuai dengan pandangan dan sistem pengetahuan masyarakat. Arah rumah Bugis senantiasa menghadap pada empat penjuru angin, yaitu timur, selatan, barat, atau utara.

Paling ideal bila rumah itu menghadap ke timur, karena timur dianggap sebagai sumber kehidupan. Letak rumah sedapat mungkin pada tempat yang di sebelah barat atau selatannya agak tinggi. Pola ini dianggap ideal. Hal ini tidak berarti bahwa ketinggian di sebelah timur dan utara tidak baik. Model desa menurut pandangan hidup penduduk adalah segi empat, sesuai dengan pandangan makrokosmos mereka yang segi empat juga. Pandangan itu turut pula mempengaruhi bentuk rumah. Rumah harus segi empat dan terbagi atas tiga tingkatan. Tingkat bawah melambangkan benua bawah, tingkat tengah melambangkan benua tengah, dan tingkat atas melambangkan benua atas.

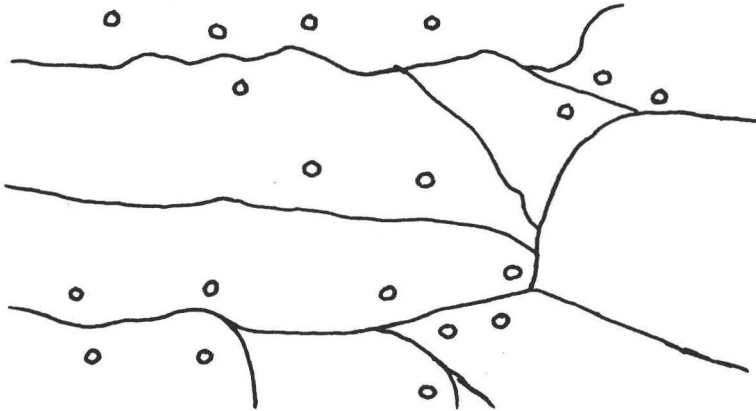
Tiap kelompok pemukiman di Desa Wage terdiri atas 10 sampai dengan 20 buah rumah yang berarti juga sama dengan Kepala Keluarga atau Rumah Tangga. Jarak antara tiap rumah diukur dari dasar tiang rata-rata 10 sampai dengan 15 meter. Ukuran rumah pada umumnya ialah 9 x 5 m, sedang ukuran halaman adalah 30 x 15 m. Lihat Peta 8.

Letak rumah berderet-deret mengikuti jalanan, baik jalanan propinsi maupun jalanan daerah atau jalanan desa. Jalanan desa menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Deretan rumah-rumah pada dasarnya merupakan kampung-kampung kecil atau berupa pemukiman yang dikelilingi oleh tanah persawahan.

Memang kelompok-kelompok rumah yang berdekatan dengan jalan mempunyai keuntungan dan kerugian, misalnya penduduk agak mudah berhubungan dengan pusat-pusat fasilitas, mudah memasarkan hasil-hasil produksinya dan mudah pula memperoleh input-input baru dari luar, terutama mengenai sistem pengetahuan dan teknologi baru dari luar. Sedang kerugiannya ialah jauh dari tempat pekerjaannya, yaitu sawah atau ladang, dan sulit mengangkut hasil panennya dari persawahan ke rumahnya. Waktu yang diperlukan untuk kesawahnya lebih banyak dari pada mereka yang berada di tengah-tengah sawahnya. Perumahan yang terletak jauh dari jalanan, di samping beruntung dan kerugian seperti tersebut di atas, dirasakan pula oleh petugas pemerintahan agak berat dalam menyampaikan pemberitahuan tentang kegiatan administrasi dan pembangunan, sehingga tampak penduduk yang bermukim jauh itu seolah-olah dianak-tirikan.

Letak rumah-rumah di Desa Wage sebelum mengalami pemugaran dalam tahun 1961, terpencar di sana sini, berada dekat sawah atau ladang. Apabila kita mengunjungi desa ini, maka di-

kejauhan tampak bangunan rumah-rumah kecil yang digunakan untuk menjaga padi yang sedang menguning dan sebagai tempat istirahat waktu musim panen. Rumah kecil ini berfungsi mendekatkan mereka pada sawah atau ladang. Pola pemukiman di Desa Wage dapat disebut *pemukiman mengelompok* seperti yang diperlihatkan pada Gambar III – 3.



Gambar III – 3 POLA PEMUKIMAN DESA WAGE

Pemukiman di Desa Wage mengelompok mendekati jalan-jalan dan sungai Salejampue yang mengalir di tengah-tengah desa. Tanah pertanian berada di luar kelompok tempat tinggal dengan jarak antara 0,5 sampai dengan 1 km. Jarak ini bagi orang desa tidak merupakan hambatan.

Jika tiba musim hujan, petani mempersiapkan segala sesuatu untuk mulai membuka persawahannya, misalnya apakah sawah itu diolah secara bergotong-royong atau dilakukan dengan kerja sama antara anggota keluarga. Bahkan semua kegiatan sosial lainnya, seperti upacara perkawinan dan upacara hari-hari besar agama ditunda atau sekurang-kurangnya disederhanakan.

Karena ada pula sawah di desa ini yang merupakan sawah tadah hujan, maka musim hujan senantiasa ditunggu dan didambakan. Sembahyang subuh yang dituntut oleh agamanya merupakan dinamika untuk bangun segera pagi, dan memohon agar usahanya dapat berhasil baik. Mereka bekerja sampai senja, sedang isterinya mempersiapkan bekal makanan siang yang kemudian diantarkan ke persawahan. Apabila pekerjaan itu dilakukan dengan mengundang tenaga luar keluarga, para tenaga bantuan itu diberi makan dan minum oleh petani yang dibantu. Bantu membantu mengerjakan persawahan dilakukan secara bergilir, sampai

akhirnya kelompok petak-petak sawah pada lokasi tertentu selesai dikerjakan.

Menurut keterangan para petani dan pejabat pertanian rakyat, panen tahun ini (1980) di daerah Wajo berhasil baik karena petani serentak membuka sawah setelah hujan mulai turun pada pertama kalinya. Selanjutnya para petani menjelaskan bahwa keberhasilan itu disebabkan antara lain oleh pembagian air secara merata dan hama tidak sempat membinasakan semua karena padi sawah sudah berisi. Selain itu pejabat pertanian rakyat juga sudah bersiap-siap dan mengawasi jalannya pertanian dengan segala alat pembasmi hama. Keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama antara aparat pemerintah dengan petani, antara lain berupa gabungan dua sistem pengetahuan, yaitu perkiraan iklim oleh ahli klimatologi dan ahli ilmu falak dari orang-orang tua desa yang tepat juga, serta adanya prasarana jalan, fasilitas kendaraan, dan cepatnya memperoleh perlengkapan pestisida. Jika tiba musim panen, mereka, terutama kaum wanita, secara bergotong-royong memungut padi dengan menggunakan ani-ani atau sabit bagi bibit unggul.

Penggunaan tenaga kerja luar keluarga bukanlah sebagai buruh tani, melainkan sebagai tenaga suka rela. Karena panen adalah suatu keberhasilan, maka tenaga suka rela dianjurkan mengambil seikat di antara 10 ikat padi yang berhasil dipetik oleh tiap orang.

Uraian di atas ini memperlihatkan bahwa struktur pemukiman mempunyai hubungan langsung dengan struktur pertanian, seku-rang-kurangnya kelompok rumah petani yang berdekatan memberi pengaruh terhadap sistem pertanian di desa. Pengaruh pola pemukiman bukan saja pada lapangan kerja, melainkan juga pada sikap individu.

Desa Wage sebagai desa Swakarya masih sedang berkembang. Jaringan jalan dibangun untuk menghubungkan pusat-pusat kampung. Tiap kampung memiliki rumah ibadah. Kampung-kampung tampak bersih dan indah. Namun berbagai sarana fisik yang sesungguhnya harus ada di desa ini, tampaknya belum ada, seperti lumbung desa, bank desa, perpustakaan desa dan administrasi yang teratur.

Tabel III – 5 DISTRIBUSI SARANA FISIK TIAP KAMPUNG DI DESA WAGE, KECAMATAN SABBANGPARU (Tahun 1980)

Jenis sarana fisik	K a m p u n g				
	Caleko	Sumpang baka	Lampa jo	Massap pa	Bento te'ne
1. Kantor Desa	1	—	—	—	—
2. Balai Desa	1	—	—	—	—
3. Pasar Desa	1	—	—	—	—
4. Sumur Umum	1	1	—	—	1
5. Mesjid/Mushollah	1	1	2	1	2
6. Gedung SD.	1	—	—	2	—
7. Madrasah	—	—	1	—	—
8. Toko/Gardu	2	1	1	1	1
9. Kantor Koperasi	1	—	—	—	—
10. Unit listrik	1	1	1	—	—
11. Unit Heller	4	3	3	4	4
12. Unit pemeliharaan ulat sutera	2	1	1	—	—
13. Kuburan	1	1	1	1	1

Sumber : a. Data primer
b. Catatan Kepala Desa Wage

Pemeliharaan ulat sutera dilakukan di bawah kolong rumah yang dipagari dengan bambu. Kekuatan masing-masing unit listrik adalah 12,5 kilo wat, 7,5 kilo wat, dan 5 kilo wat. Di antara 18 buah mesin heller, ada 3 (tiga) buah yang belum mendapat izin.

Gedung S.D. yang terdapat di Caleko dibangun dengan anggaran Inpres, sedang dua buah lainnya dibangun atas swadaya masyarakat. Madrasah yang ada di Lampajo dekat Mesjid adalah cabang dari Perguruan Islam As'adiah yang berpusat di kota Sengkang. Sumur umum dibangun dengan biaya bantuan desa tiap tahun. Sebagian bantuan desa digunakan untuk pengadaan unit listrik.

Panjang jalan di Desa Wage 27,7 Km yang terdiri dari 4 Km jalan propinsi, 5,7 Km jalan Kabupaten, dan 18 Km jalan desa. Kendaraan darat terdiri atas 3 buah kendaraan roda empat, 6 buah sepeda motor, dan 413 buah sepeda, sedang kendaraan air terdiri atas 7 buah perahu bermotor dan 94 buah perahu biasa (bercadik). Di Desa itu terdapat 10 televisi dan 130 buah radio. Angka-angka tersebut tercatat di kantor Kepala Desa dan Kepala Kampung tahun 1980.

Selain jalanan tersebut di atas terdapat pula jalan setapak sepanjang lebih kurang 32 Km. Jalan tersebut sering dilalui oleh penduduk ketika mereka berkunjung ke pasar atau untuk berhubungan dengan Kepala Desa. Dalam musim kemarau petak-petak sawah dapat menjadi jalan setapak. Perahu motor digunakan juga sebagai alat pengangkutan di samping untuk menangkap ikan di Danau Tempe. Sungai Salojampue yang membagi dua Desa ini dapat dilayari dengan perahu motor. Siaran televisi ditangkap melalui stasiun relay yang terletak di Kabupaten Sidrap, kurang lebih sejauh 40 Km. Desa Wage belum mempunyai televisi umum yang dapat disaksikan oleh penduduk. Mungkin hal ini disebabkan oleh kelompok pemukiman terletak berjauhan.

b. Desa Batupapan

Desa Batupapan terbagi atas 6 (enam) buah Rukun Kampung (RK) dan 24 buah Rukun Tetangga (RT). Organisasi pemukiman di desa ini mulai dibentuk dalam tahun 1961 pada waktu pumgaran desa-desa di Sulawesi Selatan. Sebelum itu tiap pemukiman disebut Lembang. Gangguan gerombolan DI/TII tidak banyak berpengaruh di daerah Tana Toraja, sehingga rumah yang terletak jauh dari pengawasan pemerintah tidak dipindahkan ke pinggir jalan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemukiman yang tampak sekarang sudah ada sejak zaman penjajahan. Berbeda dengan di Desa Wage, pembangunan pedesaan di Desa Batupapan antara lain dengan membuat jalanan mendekati kelompok perumahan. Dewasa ini di Sulawesi Selatan kedua cara ini ditempuh dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan dan tidak akan menimbulkan sengketa tanah. Selain itu pemukiman yang terletak di daerah pegunungan akan dipindahkan ke tempat lain jika pegunungan tersebut dimasukkan sebagai kawasan hutan.

Tabel III – 6 DISTRIBUSI KEPALA KELUARGA (KK) DAN RUKUN TETANGGA (RT) MENURUT RUKUN KAMPUNG (RK), DI DESA BATUPAPAN (Tahun 1979)

Rukun Kampung (RK)	Luas Wilayah (Ha)	J u m l a h	
		KK	RT
1. Tarongko	2.190	180	6
2. Lapandan	2.180	141	5
3. Kasimpo	2.270	121	3
4. Kalolok	2.380	128	3
5. Rante	2.240	155	4
6. Mamabo	2.500	122	3
Jumlah	13.760	847	24

Sumber : Diolah dari catatan Kantor Desa Batupapan

Jumlah seluruh KK dalam Kecamatan Makale sebanyak 6.673 dengan 37.110 jiwa (tahun 1979). Menurut Sensus Penduduk tahun 1980 jumlah penduduk Kecamatan Makale 39.377 orang. Ini berarti bahwa jumlah penduduk Desa Batupapan sebesar 37% dari penduduk Kecamatan Makale. Dari angka-angka pada Tabel itu dapat dihitung rata-rata KK per Ha. Untuk RK Rarongko : 12 KK/Ha, Lapandan : 15 KK/Ha, Kasimpo : 19 KK/Ha, Kalolok : 19 KK/Ha, Rante : 15 KK/Ha, dan Mamabo : 20 KK/Ha. Kalau tiap KK memang menghuni hanya sebuah rumah, maka dapat diperkirakan bahwa tiap RT terdiri atas 35 buah rumah. Rata-rata seluruh Desa Batupapan adalah 16 KK/Ha.

Menurut sejarah, Desa Batupapan termasuk dalam pemerintahan Lembang Basse Kakanna yang berpusat di Makale, diperintah oleh seorang raja bernama Puang Tianglangi. Setelah merasa sudah tua, raja ini membagi kerajaannya menjadi tiga wilayah, namun masih mempunyai ikatan berbentuk federasi. Masing-

masing wilayah diperintah oleh cucu Puang Tianglangi. Lembang Batupapan berada di bawah wilayah federasi Tongkonan Layuk Pantan dan Torongko. Tongkonan Layuk Pantan sekarang ini berada di Desa Ulusalu, Kecamatan Saluputti, berbatasan dengan Desa Batupapan. Dilihat dari segi sejarah, Desa Batupapan harus masuk salah satu desa bawahan dari Kecamatan Saluputti, akan tetapi jika dilihat dari segi administrasi dan hubungan, lebih dekat dengan Makale. Hal ini sesuai dengan sejarahnya mula-mula, yaitu berada dalam pemerintahan Lembang Basse Kakanna.

Lembang mengandung pengertian yang sama dengan Wanua (Bugis). Lembang dan Wanua sekarang ini berubah menjadi Desa. Tiap kelompok pemukiman orang Toraja yang tergabung pada Tongkonan Layuk disebut Lembang. Di samping istilah lembang dikenal pula istilah *banua*, seperti Banua Lando, Banua Sura', dan Banua Puan. Istilah banua dapat diartikan sebagai tempat kediaman, sedang daerah-daerah yang tergabung dalam lingkungan adat atau satu persekutuan hukum adat disebut *penannian*.

Tongkonan Layuk terbagi pula atas beberapa tongkonan karena penambahan penduduk dan adanya bangsawan yang mendirikan pemukiman tersendiri bersama rakyat dan pengikutnya. Tidak selalu sebuah tongkonan tertua berubah menjadi Tongkonan Layuk. Ada kemungkinan sebuah tongkonan biasa berubah menjadi Tongkonan Layuk (tongkonan tertinggi), tergantung dari bangsawan tertinggi dan penguasa tertinggi yang telah diakui atau dipilih antara para penguasa tongkonan-tongkonan.

Bagi orang Toraja, tongkonan melambangkan sumber keturunan atau tempat berdiam nenek moyangnya, sehingga menjadi asal mula silsilah seseorang (stamboom). Karena itu tongkonan dianggap oleh orang Toraja sebagai simbol keturunan atau simbol ikatan keluarga, yaitu bahwa semua orang yang berasal dari tongkonan tertentu adalah sekeluarga. Tiap orang yang merasa berasal dari tongkonan itu, turut mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keselamatan dan pemeliharaannya sehingga jika sampai waktunya tongkonan tersebut akan dipugar, maka semuanya hadir walaupun tidak diundang, dengan membawa sumbangan berupa uang, hewan, dan barang-barang yang diperlukan dalam upacara.

Perkataan tongkonan berasal dari kata *tongkon* yang berarti duduk. Kemudian pengertian selanjutnya tergantung dari kalimat dan cara menggunakannya, misalnya *tongkonan dama'*, yaitu tempat duduk damar, *pergi tongkon* berarti pergi menghadiri

upacara orang mati yang biasanya dilakukan dengan duduk bersama semua orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang mati itu. Dalam pencatatan kebudayaan daerah, kata Tongkonan lebih banyak diartikan rumah keturunan yang didirikan oleh seorang yang mula-mula membangun sebuah pemukiman bersama keluarganya. Orang ini disebut *Pangala Tondo*, yaitu yang mula-mula membangun sebuah perkampungan dan menyusun pembagian tugas-tugas di kalangan mereka untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan.

Tongkonan yang mula-mula senantiasa dibangun di tempat yang tinggi agar mudah melihat musuh. Di sekitar tongkonan dibangun beberapa tempat kediaman oleh penduduk yang merasa terikat secara kekeluargaan dengan pembangun pertama tongkonan tersebut dan mengikuti segala peraturan dan tata-tertib yang dikeluarkannya. Dengan demikian fungsi tongkonan, selain sebagai sumber keturunan, dipandang juga sebagai *sumber sukaran alu*. Melalui tongkonan, aturan, tata tertib, adat-istiadat, dan sanksi-sanksinya dipancarkan. Semua penduduk yang bermukim dalam lembang itu merasa terikat dengan adat-istiadat tongkonan. Mereka tetap merasa mempunyai keluarga, mempunyai adat, mempunyai kelompok, mempunyai pemimpin, dan tidak terpengaruh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tiap orang Toraja mempunyai tongkonan, berarti tiap orang mengenal asal keturunannya, mengenal adat-istiadat tongkonannya, dan mengenal orang yang menjadi keluarganya, meskipun tidak menggunakan nama di belakang namanya. Karena itu bila tiba saat pemugaran, semua orang mati hadir untuk memperkenalkan dirinya bahwa ia berasal dari tongkonan ini.

Upacara pentahbisan tongkonan yang disebut pula *magrara banua* diadakan sebelum didiami. Upacara itu dihadiri oleh seluruh anggota keluarga dari beberapa tingkat generasi. Semuanya hadir dengan membawa babi dan barang-barang konsumsi.

Upacara pentahbisan itu merupakan reuni keluarga baik dari jauh, maupun yang dekat. Tongkonan itu sering pula disebut rumah pusaka, yaitu pusaka bagi semua orang yang berasal dari nenek moyang yang mula-mula membangun rumah tersebut. Tongkonan itu dapat pula disebut rumah adat, oleh karena dari situ adat dipancarkan, berarti dari situ adat-istiadat yang sekali sudah ditetapkan oleh nenek moyang yang mula-mula membangun tongkonan itu, harus ditaati oleh anak cucunya.

Ikatan penduduk dengan tongkonannya, menyebabkan adanya ikatan dengan tempat asalnya atau dengan daerahnya. Masing-masing Tongkonan Layuk di Tana Toraja mempunyai wilayah, yaitu lingkungan alam yang berada disekeliling tongkonan tersebut. Tanah yang ada di sekeliling tongkonan yang sekali telah dimiliki oleh pembangun pertama, menjadi tanah tongkonan atau tanah ulayat yang berarti bahwa semua orang yang berada dalam lembang tempat tongkonan itu berdiri dan berkuasa, berhak mengusahakan tanah itu sepanjang untuk menghidupi dirinya setelah mendapat persetujuan dari penguasa tongkonan. Apabila penguasa tongkonan sudah meninggal atau tidak berkuasa lagi dalam struktur pemerintahan, maka ditunjuk seorang kerabat dekat yang bangsawan pula untuk menjaga wilayahnya dan melihat tongkonan tersebut.

Orang Toraja memandang tongkonan sebagai simbol makrokosmos, sedang tongkonan adalah mikrokosmos. Aturan-aturan dan tata-tertib dari mikrokosmos harus mengikuti tata-tertib makrokosmos. Tata-tertib mikrokosmos (tongkonan) itu harus menyebar ke dalam lembang.

Lembang dan tata-tertibnya merupakan proyeksi dari model dan tata-tertib makrokosmos melalui tongkonan.

Keterikatan penduduk terhadap tongkonannya adalah demi untuk upacara menurut aturan tongkonannya karena tata-tertib tongkonannya merupakan jembatan baginya untuk memperoleh keselamatan di alam *puya* (hari kemudian). Orang mati harus diupacarakan secara meriah dan pengorbanan hewan, agar supaya dapat disambut di alam *puya* dengan kemeriahan pula oleh para dewa.

Saling memberi sumbangan dalam upacara pemakaman didorong oleh kesadaran solidaritas sosial, kesatuan pemukiman, dan oleh karena berasal dari satu tongkonan. Tongkonan juga adalah rumah keluarga luas, sehingga hubungan sepupu sakakek atau yang lebih jauh dari itu masih dirasakan bersaudara. Jodoh untuk orang-orang dalam satu tongkonan pada lazimnya dicari di luar tongkonannya.

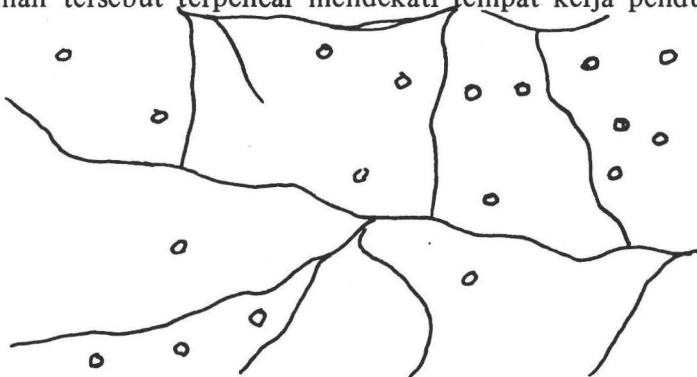
Tongkonan sebenarnya adalah juga pusat pemukiman. Apabila sebuah tongkonan dibangun di suatu tempat, maka menyusul pembangunan rumah kediaman di sekitarnya yang didiami oleh penduduk pengikut tongkonan itu. Tongkonan dan rumah kediaman penduduk di sekitarnya selalu dibangun menghadap ke utara. Jadi dalam suatu lembang selalu tampak pemukiman yang

rumah-rumahnya berbanjar dari timur ke barat. Di hadapan rumah dibangun lumbung-lumbung padi yang berbanjar dari timur ke barat juga. Antara rumah dan lumbung terdapat pekarangan yang digunakan untuk bermain-main oleh anak-anak yang belum dewasa dan digunakan sebagai tempat upacara. Di belakang rumah terdapat beraneka ragam pepohonan, antara lain pohon bambu yang tumbuh dengan subur. Pohon bambu adalah pohon yang sangat akrab dengan orang Toraja, karena kegunaannya amat banyak. Antara lain sebagai bahan bangunan rumah, misalnya belahan-belahan bambu dibuat jadi atap, anyaman bambu jadi dinding, dan sebagainya. Selain itu potongan bambu dapat dijadikan wadah untuk minum tuak.

Pemukiman orang Toraja berbentuk memanjang mengikuti arah gerak matahari sehari-hari yakni dari timur ke barat, sedang kelompok-kelompok pemukiman itu terpencah di sana-sini, di lereng-lereng bukit atau gunung, dan di lembah-lembah.

Tidak selalu pada sebuah kelompok pemukiman terdapat sebuah tongkonan, akan tetapi sebuah kelompok pemukiman selalu terkait pada sebuah tongkonan yang menjadi sumber adat-istiadatnya. Demikian pula bentuk rumah penduduk tidak selalu mengikuti bentuk tongkonan, tetapi bentuk tongkonan harus selalu mengikuti ciri-ciri tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang. Rumah-rumah kediaman di Desa Batupapan sudah banyak yang berubah bentuk dan bahannya. Ada yang mengikuti bentuk rumah kediaman orang Bugis dan ada pula yang menggunakan bahan bangunan dari batu.

Pola pemukiman di Desa Batupapan dapat disebut *pemukiman terpencah*, sebagai yang diperlihatkan pada Gambar III – 4. Pemukiman tersebut terpencah mendekati tempat kerja penduduk.



Gambar III – 4 POLA PEMUKIMAN DESA BATUPAPAN

Pola pemukiman seperti ini mempunyai kerugian dan keuntungan. Penduduk yang berada di sekitar sawah ladangnya akan lebih cepat sampai ke tempat pekerjaannya dan dapat secara langsung mengawasi usaha taninya sampai mendatangkan hasil. Di lain pihak, petani agak jauh membawa hasil-hasil produksinya ke pusat-pusat pemasaran.

Desa Batupapan berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Pemukiman terpecah mengikuti keadaan alam itu. Penduduk mendirikan rumahnya di lereng-lereng bukit atau pada lembah-lembah. Persawahan hanya terdapat di antara bukit dan gunung, sedang bukit dan gunung dijadikan ladang untuk tanaman ubi jalar. Sebagian penduduk menanam bukit-bukit itu dengan cengkeh dan pohon buah-buahan.

Desa Batupapan sebagai desa swakarya masih sedang berkembang. Jaringan jalan sudah dibuat menghubungkan kampung-kampung. Kebersihan, kerapian, dan keindahan masih perlu ditata terus-menerus. Unit listrik dan televisi belum ada. Air minum diperoleh dari sumber-sumber mata air di perut gunung.

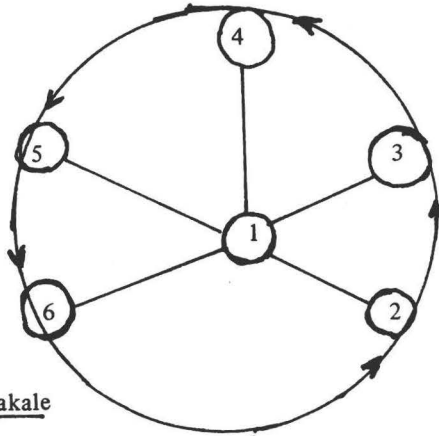
Kantor Kepala Desa dan Balai Desa terdapat di R.K. Kalolok. Di tiap-tiap RK Tarongko, Kalolok, Rante, dan Mamabo terdapat sebuah mesjid. Pada keenam RK di Desa Batupapan terdapat gereja, bahkan pada empat RK yaitu Lapantan, Kasimpo, Kalolok, dan Rante terdapat dua buah masing-masingnya. Gedung SD terletak di RK Kasimpo, Kalolok, dan Rante. Kantor koperasi dan kios papan sebanyak 35 buah, dengan perincian 9 buah di Kasimpo, 8 buah di Kalolok, 7 buah di Lapandan, 5 buah di Tarongko, 3 buah di Rante, dan 3 buah di Mamabo.

Sarana fisik tersebut di atas dapat dilihat pada Peta 8 mengenai penyebaran pemukiman di Desa Batupapan. Dalam peta tersebut beberapa sarana fisik tidak tampak, karena berada dalam kelompok pemukiman, seperti unit industri keramik lokal yang dilakukan di bawah kolong rumah. Pasar desa tidak terdapat di desa ini, oleh karena mungkin dianggap berdekatan dengan pasar Rembon yang terletak di sebelah baratnya dan dekat dengan pasar Makale yang terletak 5 Km sebelah timur.

Di Tana Toraja terdapat semacam penggiliran hari pasar. Hari pasar dapat berfungsi sebagai lembaga sosial dan merupakan sarana pembangunan masyarakat. Berikut ini dikemukakan bagan hari pasar yang menjangkau semua tempat di Kabupaten Tana Toraja. Hari pasar rupanya sudah membudaya sedemikian rupa,

sehingga beberapa kegiatan sosial ditentukan pula oleh adanya hari-hari pasar tersebut, misalnya dijadikan patokan untuk melangsungkan upacara tertentu.

Peredaran hari pasar tersebut bersumbu di Makale. Selain itu ada pula hari pasar yang sumbunya berpusat di kota Rantepao dengan jaring-jaring peredaran di bagian utara daerah Tana Toraja. Kota Makale dan Rantepao merupakan dua kota kembar yang menjadi tumpuan perhatian dan kebanggaan orang Toraja.



HARI PASAR DI TANA TORAJA

- di Makale.
- di Rantepao.
- Rembon, Kecamatan Saluputti.
- di Sanggalla.
- Mebali, Kecamatan Mengkendek.
- To'karau, Kecamatan Sescan.

Makale

18	Rantepao				
12	30	Mengkendek			
18	36	30	Saluputti		
11	29	23	29	Sanggalla'	
30	12	42	48	42	Sescan

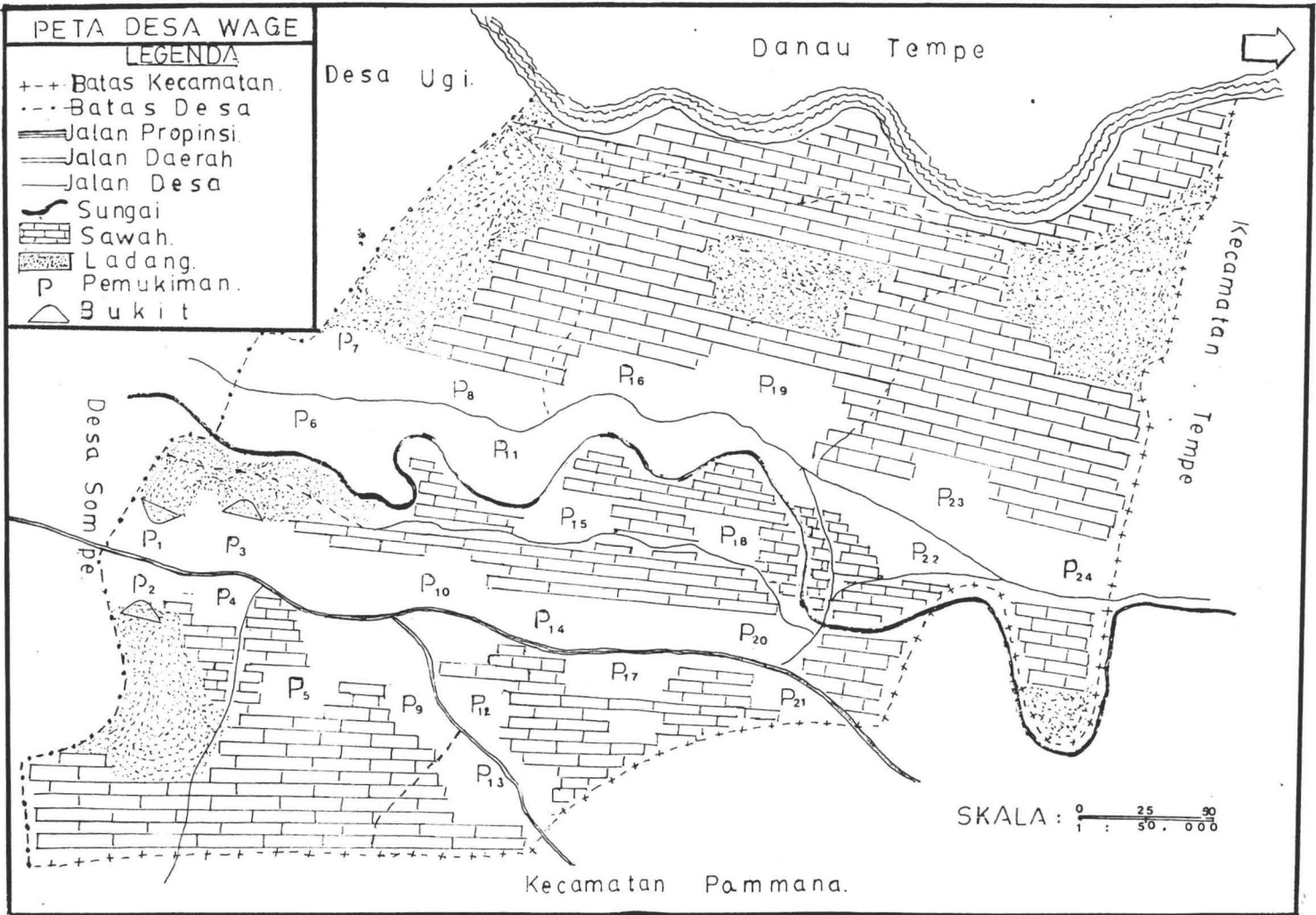
Gambar III – 5 b BAGAN JARAK ANTARA IBU KOTA KECAMATAN DAN IBU KOTA KABUPATEN (Km)

Keadaan fisiografis daerah Tana Toraja cukup membantu tetap berlangsungnya peredaran hari-hari pasar tersebut. Para konsumen tidak perlu harus menempuh jarak yang sulit dan jauh untuk mengunjungi pasar di Makale. Hasil-hasil wawancara dengan penduduk desa menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi mereka berpusat pada pasar. Pasar diadakan sekali dalam enam hari.

PETA DESA WAGE

LEGENDA

- +--+ Batas Kecamatan.
- Batas Desa
- ==== Jalan Propinsi.
- ==== Jalan Daerah
- Jalan Desa
- ~ Sungai
- ▤ Sawah.
- ▨ Ladang.
- P Pemukiman.
- △ Bukit



Peta NO : 8 Sumber Daya Alam Desa Wage Kec.Sabbangparu,
 Sumber : Kantor Desa Wage. Th 1979.



Khusus pasar Makale dan Rantepao terbuka tiap (pasar harian). Di samping itu kedua kota itu sekali enam hari memperoleh giliran hari pasar seperti dikemukakan di atas. Para pedagang keliling mengetahui benar hari-hari pasar ini. Mereka menggunakan kendaraan sepeda motor atau menumpang bus mengunjungi pasar. Sore hari baru kembali ke rumah. Pedagang-pedagang itu berkeliling dalam seminggu menjajakan barang-barang dipasar. Kegiatan mengunjungi pasar dapat menjadi indikator mobilitas penduduk dan perubahan kehidupan sosial penduduk.

Kegiatan sosial ekonomi yang berpusat pada pasar sangat bergantung pada tersedianya prasarana perhubungan yang baik. Dalam tahun 1979 tercatat di kantor Kepala Desa Batupapan 4 Km jalan daerah, 58 Km jalan desa, dan 58 Km jalan setapak. Jumlah kendaraan roda empat 4 buah, sepeda motor 17 buah, sepeda 81 buah, dan radio 38 buah di desa tersebut tahun itu. Sedang direncanakan untuk dibangun stasiun relay televisi. Surat kabar yang beredar di desa ini adalah Mimbar Karya terbitan Ujungpandang. Belum tampak beredar surat kabar terbitan Jakarta.

B. BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Mata pencaharian pokok

Di kedua desa itu 85% jumlah penduduk mempunyai lapangan kerja pokok pertanian karena sebagian besar waktu diperuntukkan bekerja di pertanian dan hasil yang diperoleh penduduk bersumber pada pertanian itu. Mata pencaharian sampingan tidak banyak. Misalnya seseorang dengan mata pencaharian pokok pertanian, berjualan di pasar pada hari pasar di suatu tempat, atau sebagian waktu dipakai untuk berjualan karena pengolahan sawah dikerjakan bersama anggota keluarga. Contoh yang lain adalah seorang petani setelah menyelesaikan pengolahan sawahnya yang sempit dalam beberapa hari, menggunakan waktu selebihnya untuk berdagang kain-kain dari rumah ke rumah atau duduk berjualan di pasar-pasar terdekat. Contoh yang lain lagi ialah bahwa seorang petani di samping mengerjakan sawahnya, mempunyai usaha industri keramik lokal, sedang isteri dan anak-anaknya turut membantu. Selain berdagang dan mengerjakan keramik, penduduk juga menangkap ikan, berternak dan tukang sebagai pekerjaan sampingan. Bila hujan mulai turun penduduk segera membuka tanah

secara serempak bersama tetangganya atau sekampung. Proses mengolah tanah sampai ditanami berlangsung antara 7 sampai dengan 15 hari. Kemudian tiba masa istirahat. Dalam pada itu sewaktu-waktu mereka mengunjungi sawah sampai tiba masa menyiangi. Lamanya masa istirahat tergantung dari bibit unggul yang disemaikan. Bibit unggul rata-rata berumur 110 hari, berbeda dengan bibit lokal yang berumur 125 sampai 140 hari. Selain varitas bibit unggul yang menentukan waktu kerja petani, masalah air sangat memegang peranan. Adakalanya jika ada cukup air, setelah padi selesai dipetik dilanjutkan dengan menanam palawija, seperti kacang hijau atau kacang tanah. Pekerjaan sampingan dilakukan pada waktu-waktu tidak bekerja di sawah.

Di samping lapangan pekerjaan utama, penduduk masih juga mengerjakan pekerjaan sampingan karena ingin menambah penghasilan.

Rupa-rupanya sikap seperti ini meliputi semua penduduk baik pegawai maupun petani. Kadang-kadang timbul akibat buruk seperti pekerjaan tetap jadi terlangar dan tidak menjadi ahli pada bidang pekerjaan tertentu, atau sebagai pedagang mereka berke- rumun di sektor tertentu jika ada keuntungan pada sektor itu. Di Desa Batupapan, orang Toraja pada umumnya mencari pekerjaan sampingan di luar desanya.

Beras sebagai makanan pokok penduduk Desa Batupapan, didatangkan dari daerah lain. Karena itu mereka memerlukan uang tunai pembeli beras, sedang uang tunai itu harus dicari melalui pekerjaan sampingan. Pada waktu musim panen, terdapat tradisi di Tana Toraja menerima tenaga kerja luar keluarga yang kebanyakan terdiri atas tenaga kerja perempuan. Adakalanya mereka secara berombongan mendatangi suatu areal persawahan yang sedang menguning di kecamatan lain untuk menunai dengan upah in-natura. Pekerjaan seperti ini disebut *ma'saroang*. Jika ia mampu memetik 10 ikat, maka upahnya 1 ikat.

Sebagai pekerja *ma'saroang*, pergi-pulang pada hari yang sama dan sebagainya lagi bermalam. Mereka yang pergi-pulang disebut *ma'pole* dan yang bermalam disebut *ma'bongi*. Demikian secara bergilir tiap kecamatan didatangi rombongan penuai, sehingga tidak pernah didengar padi yang sudah menguning rusak di tempat. *Ma'saroang* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk seperti halnya orang Bugis yang berkunjung ke desa lain yang disebut *massaro lellang*.

Istilah lain bagi orang Toraja untuk migrasi ke luar desa ialah *ma'lombakalando*, yaitu penduduk yang merantau mencari nafkah.

Orang Toraja memelihara babi dan kerbau. Hampir pada setiap rumah tangga terdapat kandang babi di samping atau di belakang rumah. Kebun-kebun ditanami jagung, ubi kayu kacang hijau, kacang kedele, dan kopi untuk menambah penghasilan. Penanaman cengkeh masih pada taraf permulaan.

Areal sawah di Desa Wage memang luas. Produksi tiap tahun mencukupi untuk konsumsi penduduk. Di Desa Batupapan, sawah pertanian amat sempit dan hasilnya tidak mencukupi kebutuhan penduduknya, sehingga beras didatangkan dari Pinrang dan Sidrap. Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Kabupaten Tana Toraja, Desa Batupapanpun menghasilkan kopi Rabusta dan kopi Arabika. Produksi kopi tersebut dikirim ke luar daerah, bahkan menjadi salah satu hasil bumi yang diekspor terutama ke Jepang.

Sebagian hutan di Desa Batupapan sudah dimanfaatkan oleh penduduk, antara lain kayu untuk ramuan rumah. Tetapi yang lebih penting artinya adalah hasil damar yang dapat dijual keluar daerah. Ramuan rumah orang Toraja tidak juga terlalu banyak memerlukan kayu hutan, oleh karena tiang-tiang yang digunakannya berasal dari kayu 'banga' yang tidak tumbuh di hutan, melainkan di sekeliling pekarangan. Lain halnya ramuan rumah orang Bugis lebih banyak menggunakan kayu hutan sehingga kayu di hutan menjadi sasaran penebangan. Hutan di Desa Wage sudah kritis karena tanah yang terkikis secara perlahan-lahan sejak dahulu. Ditambah dengan keadaan iklim di musim kemarau yang panas membawa kekeringan yang panjang. Rata-rata hari hujan di musim penghujan hanya 90 hari atau dua bulan, sedang dalam bulan-bulan lain kadang-kadang hujan rintik-rintik sebagai akibat hujan yang turun dipantai barat Sulawesi Selatan. Dari Desa Batupapan, tampak gunung-gunung batu yang gundul, hanya lereng-lerengnya di bagian bawah ditumbuhi hutan-hutan yang tidak terlalu lebat. Pada umumnya tanah bukit-bukit yang tersebar di desa ini sudah diolah oleh penduduk. Peraturan pemerintah Hindia Belanda tanggal 4 Januari 1938 No. 1, menetapkan bahwa bila terjadi kebakaran hutan, maka seluruh kampung yang terletak di sekeliling kebakaran itu diwajibkan menanam kembali tanah yang rusak itu. Demikian pula *Kombongan* (Kerapatan) Kepala-kepala Distrik memutuskan untuk menganjurkan kepada penduduk supaya pada tanah ladang di lereng-lereng gunung itu dibuat petak-petak yang

bertangga-tangga dan dibatasi dengan tanaman hidup atau pagar batu, agar supaya air yang mengalir tidak mudah menghanyutkan tanah. Demikian aturan sejak Belanda, tetapi kenyataan menunjukkan gunung-gunung gundul pun terjadi, akibat kurang pengawasan setelah kemerdekaan. Perladangan di Desa Batupapan jauh lebih potensial memberikan manfaat kepada penduduk dari pada persawahan karena faktor topografi. Pada hal di Tana Toraja bulan-bulan basah agak panjang dari pada bulan-bulan kering.

Sedikit areal tanah di Desa Wage dapat dijadikan perladangan padi yang disebut *ase'dare* (sekarang istilah ini sudah tidak pernah kedengaran lagi). *Ase'dare* ditanam di ladang dan tidak memerlukan terlalu banyak air. Ladang-ladang yang dahulu ditanami padi, sekarang ini ditanami ubi kayu, ubi jalar dan beberapa jenis palawija, karena dianjurkan penanaman varitas bibit unggul yang memerlukan banyak air, sehingga sistem perladangan *ase'dare* sudah ditinggalkan. Paling umum dikenal sekarang sesuai jarak waktu penanaman padi itu, ialah padi rendengan (bahasa Bugis disebut *ase pattaungeng*) dan padi gadu atau *ase bare* (padi yang ditanam dalam musim hujan).

Faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan usaha pertanian di kedua desa itu adalah struktur agraria dan pola persawahan. Apabila ciri struktur agraria di kedua desa pada kedua suku bangsa (Bugis dan Toraja) ini dirumuskan, maka sekurang-kurangnya akan kita dapati hal-hal sebagai berikut :

Desa Wage

- a. Pertanian intensif
- b. Pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri, selebihnya baru orintasi pasar.
- c. Pemilikan rata-rata tanah pertanian kecil.
- d. Tenaga kerja keluarga dan waktu panen dengan kerja upahan.
- e. Mobilisasi tenaga kerja luar keluarga atas dasar bantu membantu.
- f. Berdampingan dengan teknologi tradisional, pengaruh teknologi modern sudah nampak.

Desa Batupapan

- a. Pertanian intensif
- b. Terutama pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- c. Penilikan rata-rata tanah pertanian kecil.
- d. Tenaga kerja luar keluarga baik pra panen maupun panen.
- e. Mobilisasi tenaga kerja luar keluarga atas dasar komunal.
- f. Lebih banyak dengan teknologi tradisional.

Desa Wage

Desa Batupapan

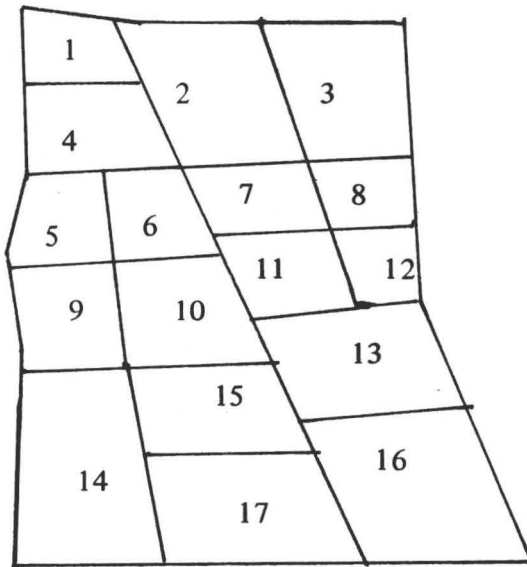
- g. Upacara yang mengikuti pertanian sudah menyusut.
- h. Tenaga kerja laki-laki lebih banyak kecuali panen.
- j. Sistem perladangan amat kecil.
- i. Kegiatan di luar sektor pertanian tidak besar menambah pendapatan.

- g. Upacara yang mengikuti pertanian lebih besar.
- h. Tenaga kerja laki-laki dan perempuan sama besar menurut fungsinya.
- j. Sistem perladangan luas.
- i. Kegiatan diluar faktor pertanian amat besar menambah pendapatan.

Kesepuluh ciri struktur agraria tersebut di atas dianggap berada di permukaan dan mudah diamati, sehingga mungkin para ahli lain dapat menarik kesimpulan lain. Di Tana Toraja proporsi penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga sering amat besar, berhubungan karena angkatan kerja potensial pada umumnya bermigrasi keluarga sehingga pekerjaan tani dilakukan oleh orang-orang tua yang kurang produktif lagi. Persawahan di Desa Wage ditandai oleh adanya kelompok sawah sebagai suatu pola persawahan yang terdiri atas beberapa petak-petak sawah seperti yang dapat dilihat pada Gambar III - 6.

Keterangan :

- 1. 0,21 Ha
- 2. 0,25 Ha
- 3. 0,25 Ha
- 4. 0,25 Ha
- 5. 0,24 Ha
- 6. 0,21 Ha
- 7. 0,19 Ha
- 8. 0,19 Ha
- 9. 0,27 Ha
- 10. 0,21 Ha
- 11. 0,19 Ha
- 12. 0,17 Ha
- 13. 0,25 Ha
- 14. 0,43 Ha
- 15. 0,21 Ha
- 16. 0,29 Ha
- 17. 0,25 Ha



Gambar III - 6 POLA PERSAWAHAN (LOMPO')

Di Desa Wage persawahan sudah dibagi ke dalam beberapa *lompo'* terdiri atas 10 sampai 40 petak sawah yang dimiliki oleh beberapa orang. *Lompo'* berarti lapangan persawahan yang membentuk suatu kelompok untuk memudahkan pencatatan dan administrasi keagrariaan. Tidak diketahui pasti kapan nama itu mulai diadakan. Ada dugaan bahwa nama itu diberikan sejak zaman kolonial, terutama dimaksudkan untuk penertiban pertanian. Sebuah *lompo'* adalah gabungan petak-petak sawah yang mempunyai ciri-ciri yang sama karena letak dan keadaan alamnya yang sama, misalnya berada pada satu bukit, lereng, atau lembah. Biasanya diberi batas-batas seperti sungai, parit, saluran irigasi, bukit, atau hutan. Tiap *lompo'* diberi nama, sering nama tersebut mirip nama manusia, diberi nama karena suburnya atau diberi nama atas harapan-harapan yang akan diperoleh para pemiliknya. Tiap pemilik petak sawah dalam suatu *lompo'* tidak selamanya berkenalan, tetapi menurut informasi bahwa dahulu para pemilik sawah tersebut senantiasa bermusyawarah untuk memulai turun sawah dan perbaikan produksi atau tentang pemakaian air. Pemilik petak-petak sawah dalam satu *lompo'* dewasa ini ada yang bermukim di luar desa tempat *lompo'* itu berada.

Pemilikan petak-petak sawah dalam suatu *lompo'* bermacam-macam. Dapat terjadi salah satu petak dari ketujuhbelas buah itu dimiliki oleh dua atau tiga orang yang berarti penguasaan tanah oleh beberapa orang. Mungkin pula seorang memiliki petak-petak sawah yang terletak di beberapa *lompo'* yang berjauhan letaknya. Diantara petak-petak dalam satu *lompo'* bisa terdiri atas petak yang digadaikan atau yang dibagi-bagikan oleh orang yang berdiam di dalam desa.

Persawahan di Desa Batupapan dikuasai oleh tongkonan. Wilayah persawahan tersebut adalah sawah-sawah tongkonan yang biasa pula disebut sawah pusaka dan selalu dikuasai oleh tongkonan atau rumah adat. Produksi persawahan ini dibagikan kepada yang berhak dalam tongkonan yaitu kepada kaum keluarga yang paling rapat dan paling berhak. Orang-orang inilah yang diwajibkan mengurus dan memelihara rumah tongkonan. Sawah-sawah tongkonan amat sulit dipindah-tangankan kepada lain orang. Jika dalam keadaan terpaksa, maka harus melalui persetujuan keluarga atau yang menjadi ahli waris tongkonan.

2. Kehidupan sosial budaya.

Kegiatan pertanian dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang sudah melembaga. Orang Bugis percaya bahwa dalam biji-biji padi terdapat Dewi Sangiaseri. Keberhasilan panen ada hubungannya dengan kemurahan hati Dewi Sangiaseri yang dilimpahkan kepada manusia. Jika tiba musim turun sawah, dilarang berselisih dalam rumah dan dalam masyarakat, dilarang berbuat maksiat, dan lain-lain perbuatan yang mungkin mengganggu ketenangan berusaha, agar Dewi Sangiaseri tidak marah dan menghindar.

Sehubungan dengan kepercayaan itu maka sebelum turun sawah, para petani membuatkan tekad dan kerja sama, sebagaimana yang diucapkan oleh para pemuka adat :

Situru' bicarapi pabbanuae', siengkalinga adapi pamarenta napabbanuae', nawedding madeceng wisesae, nabbija alokoloe, nasawe taunna. Artinya : Jika masyarakat desa sudah seia-sekata dan setelah sepakat pemerintah dan rakyatnya, baru bisa berhasil baik tanaman padi, berkembang baik hewan-hewan dan rakyat hidup makmur.

Para ahli adat yang sering pula disebut *Pallentara* memperoleh kepercayaan dalam menentukan jadwal bersawah. Penetapan hari dan tanggal mulai turun sawah itu berdasar atas pedoman yang tertulis dalam *lonta'ra* yang diwarisi dari dahulu. Dalam *lontara* tercatat tentang tahun-tahun yang baik dan yang buruk atau tahun dengan tanaman padi akan berhasil atau tidak berhasil, sesuai dengan tanda-tanda alami yang diketahui oleh *Pallontara*. *Pallon-tara* yang ahli memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi keberhasilan tanaman, seperti curah hujan dan hari hujan, rendah dan tingginya suhu udara, kencang dan tidaknya angin, hama tikus dan wereng. Ahli adat yang tahu peredaran falak atau *pattangeng* amat besar peranannya dalam kegiatan pertanian.

Dalam memperkirakan *pattaungeng* yang baik dan yang buruk, dikenal istilah *aruwa taunna* (8 tahun), yaitu suatu pembagian tahun dalam 8 macam karakter, sebagai berikut :

- a. Tahun Alopu (∫) : Jarak waktu curah hujan panjang. Dianggap kurang menguntungkan bagi usaha padi dan dianjurkan juga menanam palawija. Hama tidak menjangkit. Tetapi kesem-

- patan baik bagi pengusaha dan pedagang yang diperkirakan bisa mendatangkan keuntungan.
- b. Tahun Ha' (٩) : Curah hujan besar, angin kencang, dan hama tidak menjangkit. Kemungkinan padi dan palawija berhasil baik dan para pedagang bisa untung.
- c. Tahun Jing (١٠) : Sangat dingin di waktu malam dan amat panas di waktu siang. Musim hujan sedikit panjang dan tanaman padi diperkirakan bisa berhasil baik, tetapi mungkin masih tanaman muda sudah rebah. Diperkirakan pedagang mengalami kerugian.
- d. Tahun Isei (١١) : Hujan pada awal musim. Suhu udara panas dan dingin sedang-sedang saja. Diperkirakan usaha tani kurang menguntungkan. Kurang banjir, hama menjangkit dan pedagang tidak mengalami kerugian.
- e. Tahun Daa-leng riolo (١٢) : Hujan turun pada awal musim dan musim hujan pendek. Angin lemah dan dingin. Diperkirakan usaha tani dan buah-buahan kurang berhasil. Pendapatan pedagang sedang. Banyak perempuan hamil meninggal dan kemungkinan akan terjadi kebakaran, dan banyak perselisihan.
- f. Tahu Ba' (-7) : Turunnya hujan sulit diperkirakan. Jika hujan turun pada awal dan pertengahan musim, maka panen berhasil. Musim hujan pendek, angin bertiup lemah dan panasnya tinggi. Pedagang tidak rugi.

- g. Tahu Wau (9) : Turunnya hujan merata dan panjang, kurang banjir, panas, dan dingin sedang-sedang saja. Pertanian akan berhasil baik (melimpah).
- h. Tahun Daaleng rimunri (7-) : Hujan turun sepanjang musim dan curah hujan sedang, angin tidak kencang, dan diperkirakan usaha tani akan berhasil baik.

Pengaruh sistem pengetahuan tersebut di atas sangat besar pada anggota masyarakat tani. Adakalanya jika tiba tahun Isei atau tahun *Daalengriolo*, para petani lebih suka memilih migrasi-keluar desanya daripada bekerja sawah bahkan sebagian migrasi keluar Sulawesi Selatan untuk mencari nafkah. Sebaliknya juga terjadi, jika diperkirakan tahun *Wau* atau tahun *Daaleng rimunri* akan datang, mereka menyiapkan tenaga dan tekad untuk bekerja, bahkan mereka mengundang keluarga yang berdiam di luar desa datang membantunya.

Keberhasilan panen tahun 1980 di Kabupaten Wajo dan khususnya di desa Wage, adalah hasil kerja sama antara ahli falak dengan pengawas stasiun meteorologi yang ada di Wajo. Kesepakatan antara keduanya menentukan hari mulai turun sawah secara serempak dan saling kerja sama dengan aparat pemerintah bidang Saprodi (sarana produksi padi). Keberhasilan panen itu, dikatakan tidak pernah dicapai sebelumnya. Hasil rata-rata per Ha 30 ton, sedang sebelumnya paling tinggi bisa mencapai 28 ton. Bahkan catatan Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Wajo, mencapai 38 ton (th. 1980) untuk seluruh daerah Wajo.

Sebelum turun sawah, dilakukan upacara *tudang sipulung*, yaitu suatu pranata musyawarah bersama. Para petani berkumpul di suatu tempat dan makan bersama (*Manre sipulung*), bersepakat untuk memulai kerja sawah, manakala petunjuk-petunjuk menurut sistem *pattaungeng* dari Matowa kampung (*Pallontara*) sebagai ahli falak dan stasiun meteorologi bahwa hujan sudah mulai akan turun. Sidang musyawarah petani itu dipimpin oleh Matowa tani yang sering disebut *Madok* atau *Sanro wanua*. Sidang itu dihadiri oleh pemimpin formal (Kepala Desa) dan pemuka-pemuka masyarakat. Makanan dalam *tudang sipulung* ini diperoleh dari sumbangan petani sendiri berupa beras, ayam, kelapa, dan gula aren. Agar

lebih semarak, diadakan sabung ayam dan permainan rakyat. Pokok pembicaraan dalam sidang itu antara lain :

- a. Anjuran mengerjakan sawah secara serentak, karena dengan demikian terjalin saling tolong-menolong dan hama tidak serentak memusnahkan tanaman.
- b. Anjuran untuk berlaku jujur yang diucapkan dalam ungkapan: *Aja naengka mala aju wetta wali, nasaba engka tau mpetta waliwi. Aja muala aju ripasanre, nasaba engka tau pasanrei.* Artinya : Jangan ada orang yang mengambil kayu tebang, sebab tentu ada orang yang menebangnya. Jangan mengambil kayu yang disandarkan, sebab ada orang yang menyandarkannya.
- c. Supaya semua orang bersungguh-sungguh bekerja di bidang pertanian sebagaimana diucapkan dalam ungkapan : *Aja mupaselleiwi ate' bolamu'*, yang berarti jangan mengganti atap rumahmu.
- d. Tuntunan dan cara-cara bercocok tanam, termasuk pemilihan bibit.

Setelah selesai upacara *tudang sipulung*, masing-masing petani menyediakan bibit yang sudah direncanakan akan disemaikan dalam tahun itu. Tiap rumah tangga petani mengadakan upacara keluarga, seperti *maddoja bine*, yaitu benih yang sudah dipersiapkan, dijaga semalam suntuk. Benih disimpan dalam bakul, di atasnya ditanapkan *pusse palleng* (semacam suluh). Di samping benih diletakkan *minnya' bau* dan beberapa peralatan memasak, sepiring nasi ketan, sebuah kelapa, dan sebuah gula aren. Sehari kemudian, benih diturunkan dari rumah. Dalam hal ini, para petani bersama mengantar benihnya untuk disemaikan, dipimpin oleh *Sanro wanua*. Sambil berjalan, para anggota masyarakat berseru *Akkellu peppeko mulao, abbulu rompeko mulisu, tasita gangkanna tellumpulungge* Artinya : Keadaan gundul engkau pergi, tetapi berbulu lebat engkau kembali, kita akan bertemu tiga bulan kemudian). Sesampai mereka di sawah, ditaburlah benih di pesemaian. Jangka waktu kurang lebih tiga minggu, bibit sudah mencapai tinggi 30 cm. Setelah memilih hari yang baik, bibit padi dicabut untuk ditanam di sawah yang sudah siap ditanami.

Tanaman permulaan dimulai pada salah satu sudut sawah yang selanjutnya diteruskan oleh anggota keluarga atau secara bersama-sama oleh pemilik sawah yang bertetangga. Pekerjaan menanam

dilakukan secara bergilir oleh petani-petani yang sawahnya berada dalam suatu lombo'. Akhirnya lombo' demi lombo' rampung ditanami semuanya. Apabila padi sudah berumur 2 bulan, dianggap sudah gadis, suatu umur transisi yang diharapkan berlanjut dengan memberi buah. Dalam umur ini diadakan upacara oleh masing-masing petani sendiri. Mereka membuat kue *onde-onde* dan *dange*, kemudian dimasukkan dalam kualii yang berisi air lalu dipercikkan berkeliling di atas tanaman. Kue *onde-onde* merupakan simbol kebulatan tekad dan tulus sebagaimana bentuk *onde-onde* itu, sedang *dange* adalah simbol kesatuan pendapat dan harapan, sebagaimana unsur-unsur tepung beras, kelapa dan gula bersatu dalam wujud kue *dange*. Upacara ini merupakan tahap memohon kemurahan hati Dewi Sangiangseri, agar supaya dalam umur ini diharapkan mencapai hasil yang memuaskan.

Ketika umur padi mencapai 3 bulan, tanaman kelihatan sudah bunting, maka diadakan upacara yang disebut *mappanre to mengideng* (memberi makan orang yang mengidam). Penganan yang mengawali upacara ini adalah *utti batu* atau *loka-batu* (pisang berbiji) dan *urang-urang sakke*. Keduanya dicampur dan dimasukkan ke dalam kualii yang berisi air. Kemudian petani membawa kualii itu ke sawah dan memercikkannya ke tanaman. Dengan upacara ini diharapkan kandungan segera membesar dan mengeluarkan buah. Selain itu diharapkan agar tanaman terhindar dari hama-hama penyakit. Manakala buah padi sudah tampak, maka petani berkeliling mengitari pematang dengan membawa seekor ayam dan kelapa *seppang* (kelapa berwarna merah). Bulu ayam dicabut lalu ditanam pada tiap sudut sawah, sedang kelapa diambil santannya lalu dipercikkan pada tanaman. Selesai tahap upacara ini, dianggap tanaman sudah selamat dan diharapkan dapat memberi hasil.

Jika padi sudah menguning dan tiba saatnya untuk dipetik, maka diadakan upacara permulaan memetik, dipimpin oleh Sanro Wanuwa. Ahli adat ini mulai memotong beberapa tangkai padi yang selanjutnya terkumpul seikat dan disebut *ase appamulang* (padi pemula dipetik). *Ase appamulang* itu lalu digoreng kemudian disimpan dekat pintu untuk mengundang jiwa padi naik ke rumah.

Ase appamulang yang digoreng itu selanjutnya ditanam pada tiap-tiap sudut sawah dan Sanro Wanuwa membacakan mantra yang berbunyi : *Lasabbara asemmu tana, Nabi Nuhung asenna wajummu, engkanie pattowanaku, bara muellaungekka' asalamakeng* (si sabar namamu hai tanah, Nabi Nuhung nama bajumu, inilah

jamuanku padamu, agar supaya engkau memohonkan kami keselamatan). Setelah Sanro Wanuwa berbuat demikian, barulah semua petani menuai padinya pada hari-hari berikutnya.

Upacara terakhir yang disebut juga pesta rakyat, diadakan sebagai tanda syukur kepada Dewi Sangiangseri. Upacara itu diadakan pada saat seluruh padi selesai dipetik dan ditimbun di tengah sawah atau sebagiannya sudah diangkut ke rumah, atau sebagiannya sudah dibawa ke penggilingan. Upacara itu dipimpin oleh Sanro wanuwa, dihadiri oleh pemimpin formal dan pemuka-pemuka masyarakat. Permainan rakyat yang sering meramaikan upacara itu ialah *mallogo*, *maggasing*, *maddaga*, *mappadandang*, *mattojang* dan *massempe*. Semua bergembira dan syukur.

Upacara-upacara yang mengikuti mata pencaharian pokok sampai sekarang tetap dilakukan oleh anggota masyarakat. Perbedaan tata cara di tiap tempat hanya segi-segi peralatan yang digunakan dan adakalanya pesta panen diperkecil supaya tidak mengarah pada pemborosan.

Demikian halnya dengan penduduk di Desa Batupapan. Mereka mempunyai kepercayaan terhadap roh atau jiwa padi. Jiwa padi disadari sebagai suatu roh hidup yang disebut *deata*, yaitu kekuatan hidup yang terkandung di dalam padi. Selain kepercayaan terhadap roh padi, orang Toraja percaya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini mempunyai roh. Demikian dipercayai bahwa roh manusia hidup terus, walaupun mereka itu sudah meninggal. Kehidupan manusia di dunia adalah merupakan suatu kontinum, yaitu kehidupan yang berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya yang makin lama makin sempurna. Kehidupan manusia merupakan salah satu tahap yang selanjutnya akan beralih kehidupan lain. Oleh karena itu kehidupan orang Toraja sangat tergantung pada segala sesuatu sepanjang menurut kepercayaan mereka dapat memberi keuntungan atau malapetaka bagi mereka. Karena mereka bahwa segala-galanya bernyawa, maka senantiasa diusahakan menjalin keakraban dan harmonisasi di antara yang bernyawa dan yang tidak bernyawa (menurut penglihatan mata). Kepercayaan seperti ini masih dianut sebagian besar orang Toraja yang disebut *kepercayaan Alu' Todolo* (kepercayaan terhadap orang dahulu).

Apabila mereka ingin membuka sebidang tanah atau ladang, terlebih dahulu mengadakan persembahan kepada deata yang menguasai tanah, agar supaya terhindar dari malapetaka dan kemarahan penguasa tersebut. Upacara persembahan dilakukan dengan sa-

ngat hati-hati, agar tidak menimbulkan kemarahan, melainkan mendatangkan hasil bagi manusia. Petugas-petugas yang mengurus pertanian dipisahkan secara jelas dengan mereka yang bertugas mengurus kematian. *Indo' padang* sebagai petugas pertanian dilarang keras mendekati atau membungkus mayat.

Adakalanya upacara panen yang disebut "*bua' pare*" diadakan oleh anggota masyarakat tani dalam desa sendiri dan bisa pula bersama-sama dengan desa-desa tetangga. Upacara panen diselenggarakan setelah selesai panen, dipimpin oleh *Tominaa* bersama *to-pare-nge*. Upacara diawali dengan penyembahan kepada roh tanah, lalu diramaikan dengan permainan rakyat. Tempat upacara di bagian sebelah timur rumah (tongkonan) dan dianggap bagian dari upacara *Rambu Tuka'*. Upacara panen atau *bua' pare'* hanyalah merupakan salah satu upacara dalam sekian banyak upacara di Tana Toraja.

Organisasi sosial yang khusus menyangkut lapangan kerja pertanian, seperti H.K.T.I. (Himpunan Keluarga Tani Indonesia) dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) baru dikenal. Belum ada koperasi yang dibentuk sendiri oleh anggota masyarakat, kecuali koperasi yang diusahakan oleh pemerintah yakni BUUD/KUD. Khusus bagi kaum wanita, mereka terlibat pada organisasi PER-TIWI yang sekarang sudah berubah menjadi Dharma Wanita. Organisasi P.K.K. tampaknya tidak banyak lagi kegiatannya, berhubung adanya Proyek Kesenambungan yang lebih luas cakupannya dari pada P.K.K. Organisasi pemuda yang dibentuk sendiri oleh anggota masyarakat tidak ada. Sekarang sudah ada K.N.P.I. Pada umumnya organisasi olah raga dibentuk oleh para pegawai negeri setempat dan juga sangat terbatas jumlahnya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pola pemukiman yang menjadi tema dalam penulisan ini adalah pola pedesaan. Membahas masalah pedesaan tidak dapat terlepas dari masalah petani dan tanah pertaniannya. Pada umumnya 85 % jumlah penduduk Desa Wage dan Desa Batupapan mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Bagi petani, tanah adalah modal utama dan menentukan jalannya kesejahteraan hidup. Tanah bukan saja sebagai faktor produksi, melainkan lebih jauh dari pada itu, yakni memiliki suatu status sosial dan menjadi orang terpendang. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan sekelompok orang memiliki tanah luas dan yang lainnya makin sempit. Tanah milik terpecah-pecah karena adanya jual-beli dan pembagian warisan.

2. Mata pencaharian sampingan di luar pertanian tidak terlalu bervariasi dan pada umumnya dicari di luar desa. Unsur-unsur teknologi modern sudah memasuki lapangan pertanian dan sudah turut meningkatkan produksi. Namun kesejahteraan masyarakat berkembang secara perlahan-lahan dan tidak seimbang dengan perkembangan kebutuhan modern. Ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi banyak mempengaruhi kehidupan pedesaan, sehingga keputusan untuk bermigrasi keluar tampak berlangsung terus. Peningkatan produksi sebagai hasil penerapan teknologi baru belum berhasil mencegah penduduk yang keluar atau mengundang penduduk yang sudah terlanjur keluar desa untuk kembali. Akibat langsung yang dirasakan oleh desa adalah kurangnya tenaga kerja produktif, terutama yang langsung bekerja di pertanian, sebagaimana yang dirasakan oleh Desa Batupapan.

3. Tindakan penduduk dalam menjawab tantangan pembaharuan itu dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama, kelompok yang menerima tantangan dengan gairah dan optimis serta turut partisipasi di dalamnya. Mereka adalah dari kelompok yang memiliki pendidikan dan sadar tentang arti perubahan. Kelompok kedua, adalah mereka yang diam tanpa kompromi, tidak

menolak dan tidak pula setuju, akan tetapi menunggu situasi yang berkembang. Kelompok ketiga, adalah mereka yang menghindari dari pembaharuan itu tanpa menunjukkan penolakan. Mereka bermigrasi keluar sebagai tanda tidak setuju atau tidak tahan dengan situasi yang berkembang di desanya.

4. Desa Wage termasuk salah satu desa diantara empat buah desa dalam Kecamatan Sabbangparu Wajo. Jarak dari kota Sengkang sebagai Ibukota Kabupaten Wajo 6 Km dan jarak dari ibu kota Kecamatan juga 6 Km. Kepadatan penduduk sebesar 174 orang per Km² dan kepadatan Agraris 296 orang per Ha.

5. Desa Batupapan adalah salah sebuah desa diantara 7 buah desa di Kecamatan Makale. Jarak dari ibu kota Kecamatan Makale 5 Km. Kepadatan penduduk 343 orang per Km², sedang kepadatan agraris sebesar 741 orang per Ha. Kalau Desa Wage berada di dataran rendah, maka Desa Batupapan termasuk dataran tinggi. Desa Wage merupakan desa orang Bugis dan hampir seluruh penduduknya menganut Agama Islam, sedang Desa Batupapan merupakan desa orang Toraja dan penduduknya menganut tiga jenis agama dan kepercayaan, yakni Islam, Kristen, dan Alu' Todolo.

6. Sumber daya alam belum diolah secara optimal, karena peralatan yang digunakan masih sebagian besar alat-alat tradisional, kecuali beberapa unsur-unsur baru dan cara-cara baru dalam mengolah sawah. Sedang sumber-sumber alam lain seperti air, hutan dan sungai terutama di Desa Batupapan belum terolah secara baik. Sumber-sumber air seperti halnya Danau Tempe di Wage akhir-akhir ini makin mengalami pendangkalan, berbeda keadaannya lima tahun yang lalu bahwa danau ini dapat menghasilkan ikan sepat siam yang diekspor ke luar desa.

7. Sikap penduduk terhadap potensi alam dan kependudukan dipengaruhi oleh :

- a. Perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya yang relatif lancar. Keadaan ini memperbesar proses meniru dan menerapkan hal-hal baru dari tempat lain.
- b. Komunikasi antara penyuluh pertanian dan masyarakat tani sudah mulai melembaga, baik melalui pendekatan kelompok maupun pendekatan individual.

- c. Pengaruh hasil-hasil percobaan dan demonstrasi teknik baru yang turut mempercepat adopsi teknologi tersebut.
- d. Kegiatan kursus-kursus tani, pertemuan-pertemuan serta informasi melalui mass media, seperti radio, televisi dan surat kabar.

8. Dorongan tersebut, berhasil merubah pandangan dan sikap petani yang antara lain tercermin pada :

- a. Kebiasaan memotong padi dengan menggunakan ani-ani beralih kepada menggunakan sabut sebagai akibat penggunaan bibit unggul yang relatif pendek jangka waktunya.
- b. Kebiasaan menyemai bibit dengan sistem *pacanda* (persemaian kering sebelum musim hujan) umumnya telah berganti menjadi sistem persemaian biasa. Hal ini juga sebagai akibat penggunaan bibit unggul yang umumnya relatif lebih pendek dibanding dengan varitas lokal.
- c. Swadaya petani mulai berkembang secara intentis. Mereka sendiri aktif bertanya-tanya, mencari, bahkan membeli sendiri bibit baru, pupuk, dan pestisida untuk usaha taninya, sedang sebelum itu mereka pasif dan enggan menggunakan apa yang disodorkan. Terlihat kecenderungan petani mendatangi sentra-sentra bibit, kios-kios pupuk dan tempat-tempat penjualan sarana produksi.
- d. Arti dan manfaat berkelompok mulai dirasakan kegunaannya, terutama dalam pengaturan penggunaan air, pembelian pupuk dan pestisida. Mereka berkongsi membeli dan bersama pula menjual gabah. Mereka menanam bersama dan secara serempak, oleh karena mereka melihat sendiri kegunaan gerakan serempak itu bila datang hama wereng menyerang, maka mereka juga bersama-sama membasminya. Jadi hama itu tidak pindah lagi ke lain tempat sebagaimana sebelumnya. Hama akan musnah seketika jika pembasmiannya secara serempak. Demikian pula dalam pemakaian air, apalagi kalau pengairan tersebut dalam ukuran kecil, maka mereka secara bersama membagi air dengan adil.
- e. Dinamika masyarakat tani atau keluarga tani cenderung meningkat serta mengarah pada usaha-usaha yang produktif, seperti keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam usaha tani keluarga, sewaktu menanam, pemberantasan hama, prosesi hasil tanaman palawija dan sebagainya. Mereka bersama berdaya upaya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.

Berbeda keadaan sebelumnya, kaum wanita hanya melakukan pekerjaan yang ringan-ringannya dan selebihnya tinggal di rumah. Sekarang penghamburan waktu semacam itu sudah mulai ditinggalkan.

- f. Akibat penerapan teknologi baru, maka beberapa kebiasaan petani berangsung-angsur menipis, seperti pemali-pemali dan tabu. Tabu membanting padi karena di dalam diri padi terkandung Dewi Sangiangseri, sekarang sudah ditinggalkan. Pemali membunuh tikus di sawah dan beberapa pemali lain, sekarang sudah tidak berpengaruh lagi.

9. Pengaruh Proyek Kesenambungan dalam pengaturan rumah-rumah, ketertiban, kerapian, dan kebersihan dalam rumah dan pekarangan sudah ditaati oleh penduduk. Penduduk sudah mulai menanam tanaman hias dan tanaman buah-buahan yang dapat menambah gizi. Di desa Batupapan, tanaman cengkeh ditanam di halaman rumah atau anjuran dari proyek kesinambungan.

10. Paling menonjol dikalangan petani adalah animo terhadap pendidikan. Kalau dahulu, anak-anak disekolahkan hanya sampai pintar tulis baca kemudian disuruh keluar karena diperlukan untuk membantu orang tua di sawah. Sekarang anak-anak disekolahkan dan dibiayai sedapat mungkin bisa mencapai Perguruan Tinggi. Cita-cita orang tua senantiasa mengharapkan anaknya menjadi orang pintar, tidak sama dengan dirinya yang dahulu tidak mempunyai kesempatan belajar. Jadi tidak heran dan sering kita lihat anak petani jadi mahasiswa dan sebagian sudah jadi sarjana. Keadaan ini merupakan suatu tanda bahwa keinginan pada hal baru dan kesadaran atas kemajuan sudah meningkat.

11. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Desa Wage tadinya bersifat tradisional, seperti pancing, jala dan pukot dengan bahan benang yang disirat. Sekarang para nelayan menggunakan bahan plastik dan cara memakainya pun lebih maju dan hasil yang diperoleh ternyata lebih banyak.

12. Paling peka bagi penduduk desa adalah program Keluarga Berencana (KB). Pembatasan kelahiran bertentangan dengan alat yang menganggap bahwa banyak anak adalah kekayaan dan kebanggaan. Sama halnya ajaran Agama Islam melarang pembatasan

kelahiran karena hal itu berarti membatasi penciptaan Tuhan. Kesadaran tentang tujuan dan arti Keluarga Berencana sudah perlahan-lahan meningkat. Di Desa Wage terdapat akseptor sebanyak 60 orang dan di Desa Batupapan sebanyak 45 orang yang diperhitungkan aktif, sedang yang lainnya diperhitungkan pasif.

13. Struktur agraris di kedua desa itu pada umumnya menunjukkan bahwa pertanian masih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan petani adalah petani keluarga. Tenaga kerja luar keluarga digunakan pada saat pra-panen dan waktu panen. Dasar utama penggunaan tenaga kerja luar keluarga ialah gotong-royong atau saling bantu membantu atas dasar kekeluargaan. Tanah pertanian yang dimiliki oleh petani pada umumnya sempit-sempit atau di bawah batas minimum.

14. Ciri-ciri mobilitas penduduk, baik mobilitas ke desa-desa tetangga maupun keluar wilayah propinsi, tercermin pula ungkapan, seperti (di Desa Wage) *assaro lellang*, *llaosompe* dan *mallekk' daporeng*. Sedang orang Toraja di desa Batupapan mengenal istilah *massaroang* dan *ma'lembakalande*. Semua ungkapan ini menunjukkan adanya kegiatan migrasi keluar desa untuk menambah penghasilan. Dalam pengembaraan, mereka mengambil keputusan untuk menetap di daerah tujuan atau kembali ke daerah asalnya bila tiba musim turun sawah.

15. Kegiatan pertanian dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, sebagaimana orang Bugis mengenal adanya Dewi Sangiaseri dan orang Toraja menganggap bahwa dalam biji padi terdapat kekuatan dan kuasa hidup. Oleh karena itu upacara syukuran atas keberhasilan panen senantiasa diadakan. Sebagian tingkah laku tradisional misalnya pemali dan pantangan-pantangan mulai dihidupkan lagi. Ada keinginan untuk mengadakan penyesuaian antara sistem pengetahuan tradisional di bidang ramalan cuaca dan penentuan turunnya hujan atau tahun baik dan tahun buruk dengan sistem modern yang berasal dari stasiun meteorologi.

16. Pola pemukiman asli dapat dikenal melalui ungkapan dalam bahasa Bugis : *iapa nariaseng wanua narékko engka padang lalla'na, uwae mallarinna seibawa pasa'na*, (artinya): barulah suatu pemukiman disebut sebagai suatu negeri, kalau sudah ada padang

luasnya, air mengalirnya dan pasarnya atau pasaknya sebagai pusat negeri. Tiga kategori harus ada bagi sebuah negeri, yaitu mempunyai padang yang luas untuk persawahan dan ladang, kedua harus ada sumber mata air yang mengalir berupa sungai dan pasar sebagai pusat fasilitas untuk saling tukar menukar dan saling komunikasi. *Pasa'* dapat diartikan pula pasak dari negeri, yaitu pusat negeri tempat dibangun pusat fasilitas. Tiga kategori ini masih terdapat ciri-cirinya di Desa Wage dan Batupapan. Pemukiman di Desa Wage berada dekat persawahan, sedang di tengah-tengah desa mengalir sungai Salojampue. Jadi pemukiman mendekati sungai dan persawahan. Pemugaran pemukiman dalam tahun 1961, rumah-rumah diangkat mendekati jalanan. Rumah-rumah menghadap pada empat penjuru angin, sebagaimana konsep kosmos orang Bugis bahwa dosa itu harus segi empat.

Di Desa Batupapan, rumah-rumah menghadap ke utara sehingga pemukiman berbentuk membanjar dari timur ke barat. Kelompok pemukiman terpecah mendekati padang persawahan, berkelompok di bukit-bukit dan lereng-lereng gunung. Jadi pola pemukiman di Desa Batupapan berbentuk tersebar dan di Desa Wage berbentuk berkelompok. Dua ciri ini belum banyak meninggalkan ciri aslinya.

17. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kedua desa itu mampu berkembang ke taraf yang lebih maju lagi mengingat tanggapan penduduk terhadap pembangunan secara perlahan-lahan sudah meningkat. Demikian pula kesadaran penduduk terhadap kemajuan dan modernisasi berangsur-angsur menjadi baik, oleh karena modernisasi yang sudah diterapkan sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya, meskipun masih dalam jangkauan yang terbatas, belum merata untuk seluruh anggota masyarakat dan belum merata dinikmati seluruh fasilitas kehidupan. Keberhasilan Desa Wage mencapai target 28 ton per Ha dan sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta dapat mengekspor sekitar 30 % dari produksinya menunjukkan bahwa pengolahan sumber daya alam di daerah ini sedang menuju ke arah optimal, sedang untuk Desa Batupapan belum.

B. SARAN – SARAN

1. Pembangunan masyarakat desa, khusus perbaikan kualitas

permukiman seharusnya berlandaskan pada pandangan-pandangan dasar yang dimiliki oleh masyarakat desa, misalnya pola permukiman dapat diatur berlandaskan konsep model desa orang Bugis yang berbentuk segi empat. Sama halnya model permukiman orang Toraja berbanjar dari timur ke barat dan rumah menghadap ke utara. Model tradisional ini dapat dipermodern tanpa menghilangkan unsur-unsur aslinya.

2. Sebagian tradisi memang tidak sesuai lagi dengan pandangan modern. Akan tetapi sebagian tradisi yang lain dapat dimanfaatkan ke arah positif untuk mendorong kegiatan ekonomi tanpa mengubah sistem sosial yang ada, sehingga tradisi yang sudah melembaga akan menjadi tingkah laku ekonominya. Kalau tradisi diolah, didorong dan diarahkan kepada hal-hal yang positif, maka akan mengembangkan dinamika ekonomi dan sosial.
3. Penelitian mengenai masalah permukiman sebaiknya makin ditingkatkan dan lebih intensif. Agar dengan demikian hal-hal seperti hubungan antara manusia dengan lingkungannya, pandangan manusia terhadap lingkungannya, dinamika yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah dimiliki, dan sebagainya dapat terungkap lebih jelas, sehingga pengembangan ke arah permukiman yang lebih baik dapat terlaksana secara wajar.
4. Dalam hubungan dengan pembentukan permukiman baru, berupa transmigrasi atau permukiman kembali maka konsep mengenai pusat kegiatan dan pusat fasilitas tempat permukiman baru dan permukiman lama dapat mengalami proses adaptasi dan asimilasi perlu mendapat perhatian.

DAFTAR BACAAN

1. Abdurrazak Daeng Patunru
1964 – *Sejarah Wajo*, Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makasar.
2. Abu Hamid, (dkk).
1980 – *Tanah, Wiraswasta dan Mingrasi-keluar*, Penelitian Potensi Perekonomian Daerah Sulawesi Selatan, LEKNAS – LIPI.
3. 1980 – *Beberapa Aspek kebudayaan yang Menunjang Pelestarian Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan* (paper yang disampaikan pada Seminar Pendekatan Sosial Budaya dalam Pelestarian Sumber daya Alam dan Lingkungan hidup) tanggal 9 September 1980 di Ujung Pandang, kerja sama Unhas-Gubernur.
4. Carter, George F.
1957 – *Man and The Land*, A cultural Geography, Helt, Rinehart and Winston, New York Chicago.
5. Chisholm, Michael.
1966 – *Rural Settlement and Land Use*, Hitchinson University Library, London.
6. Geertz, C.
1976 – *Involusi Pertanian*, Proses perubahan ekologi di Indonesia, Bhratara, Jakarta.
7. Harahap, Parada.
1952 – *Toraja*, W van Hoeve – Bandung, S'Gravenhage.
8. Kasdam, Leonard.
1975 – *Struktur Keluarga Mirasi dan Entrepreneur* (terjemahan), Majalah Berita Antropologi No. 23, Tahun VII, September.

9. Myint, Hla.
1975 – *Agriculture and Economic Development in open Economy*, in *Agriculture in Development Theory*, Yale University Press.
10. Lee, Everett S.
1976 – *Suatu Teori Migrasi (terjemahan)* Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
11. Nurhadiantomo, Drs.
1979 – *Pergeseran Pola Konsumsi di Daerah Pedesaan*, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLP-IIS), Hasanuddin University, Ujung Pandang.
12. J. Pryor, Robin J.
1975 – *The Motivation of Migration*, Australian National University.
13. Redfield, R.
1963 – *The Little Community, Peasant Society and Culture* Phunix Boeks, Univ. of Chicago Press, Chicago.
14. Ruopp, P.
1953 – *Approaches to Community Development*, The Hague dan Van Hoeve, Bandung.
15. Schumacher, E.F.
1979 – *Kecil itu indah (terjemahan LP3S)*, Jakarta.
16. Spences, J.E. dan Thomson, W.L. Jr.
1969 – *Cultural Geography*, John Wiley and Sons Inc, New York.
17. Susanto, Astrid S.
1977 – *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, penerbit Binacipta, Bandung.

18. Tangdilintin, L.T.
1980 – Upacara Pemakaman Adat Toraja, Yayasan Le-
pongan Bulan (Yalbi), Tana Toraja.
19. 1976 – *Tongkonan (rumah Adat Toraja) dengan Seni
dan Konstruksinya*, Yayasan Lepongan Bulan
20. Tandilangi, Puang P.
1967 – *Memperkenalkan Tongkonan*, dalam majalah
Bingkisan no. 8 Th. 1 tanggal 1 Desember 1967,
Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan & Teng-
gara di Makasar.

DAFTAR KATA-KATA DAERAH

1. Ale Kawa = Benua bawah, istilah ini terdapat pada pandangan cosmogoni orang Bugis.
2. Ase Pattaungeng = padi tahunan
3. Ase dare' = padi ladang.
4. Ara jang = Alat-alat Kerajaan.
5. Ase appamulang = padi permulaan, padi yang diketam pertama kali (segenggam) sebagai tanda permulaan akan dimulai mengetam.
6. Dange = semacam kue yang terbuat dari tepung tapioca.
7. Kombongan = musyawarah pemuka-pemuka masyarakat untuk memutuskan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan negeri.
8. Lembang = sama dengan kecamatan atau daerah persekutuan hukum.
9. Lompo' = kumpulan petak-petak sawah atau sebagai pola persawahan.
10. Lao sompe = pergi berlayar, pergi mengembara.
11. Mangrara banua = pentahbisan Tongkonan
12. ma'bongi' = bermalam, pergi ke Desa lain atau rumah lain dan bermalam di tempat itu.
13. minnya bau = minyak harum.
14. maddoja bine = majoga benih, menidurkan benih yang akan disemaikan dan dijaga semalam suntuk.
15. ma'lembakalando = pergi ke negeri lain dan menetap di negeri tujuan tersebut.
16. madok = kepala kampung.
17. ma'saroang = menerima upah, perempuan Toraja pergi menunai di Desa lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.
18. Massarolelang = keluar rumah mengunjungi rumah orang lain yang ada dalam desanya atau desa lain.
19. mallekke dapureng = berhijrah, bermigrasi, berpindah negeri.
20. panre bola = ahli tentang pembuatan rumah bugis atau pandai rumah.

21. pinisi = perahu pinisi, model perahu layar yang digunakan mengangkut barang dan penumpang.
22. rakkeang = bagian atau rumah Bugis, loteng.
23. Rambu solo = upacara kedukaan yang dilangsungkan di sebelah barat Tongkonan. Misalnya upacara kematian.
24. Rambu tuka = upacara suka atau kegembiraan yang diselenggarakan di sebelah timur Tongkonan misalnya upacara perkawinan, panen dan kelahiran.
25. Sanro wanua = dukun negeri.
26. Tongkonan = Rumah keturunan.
27. Tomembali puang = penjelmaan arwah orang mati.
28. Tudang sipulung = duduk bersama bermusyawarah.
29. uragi bola = ahli tentang arsitektur rumah.
30. utti batu = pisang batu.
31. wanua = negeri.

Lampiran**DAFTAR INFORMAN**

No.	N a m a	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Puang randa Rindingallo	65 th	Bertani	Tana Toraja
2.	Kile B.A.	49 th	Ketua Parandangan Ada'	Tana Toraja
3.	L.T. Saranga	50 th	Kasi Kebudayaan Dati II Tato	Tana Toraja
4.	Puang Duma	65 th	Bertani	Tana Toraja
5.	Layuk	47 th	Kep. Desa Batupapan	Tana Toraja (informan kunci)
6.	Miting	60 th	Pengusaha	Tana Toraja
7.	Tallaba B.A.	48 th	Kep. Desa Wage	Wajo (informan kunci).
8.	H. Andi Sawe	60 th	Bertani	Wajo
9.	M. Ali	54 th	Bertani	Wajo
10.	H.M. Ahmad	46 th	Bertani	Wajo
11.	Alwi Muhammad	42 th	Bertani	Wajo

Lampiran.

**Tabel II – 12 DISTRIBUSI PENDUDUK, KAMPUNG/RK,
LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDU-
DUK KECAMATAN SABBANGPARU, WAJO
(Tahun 1979)**

D e s a	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah			Kepa- datan pendu- duk
		Kampung	RK	pendu- duk	
1. Wage	37,57	5	10	6.531	174
2. Sampe	25,23	3	9	6.936	275
3. U g i '	30,80	6	10	8.313	270
4. L i u '	37,77	4	13	8.033	213
Jumlah	131,37	18	44	29.644	226

Sumber: a. Kantor Kecamatan Sabbangparu.
b. Kantor Statistik Dati II Wajo.

Lampiran.

Tabel II – 13 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KE-
LAMIN KECAMATAN SABBANGPARU, KABU-
PATEN WAJO (Tahun 1980) *)

D e s a	Jumlah penduduk		Jumlah	Kepadatan penduduk
	Lk.	Pr.		
1. Wage	3.677	4.230	7.907	210
2. Sompe	4.856	5.631	10.487	416
3. U g i'	4.067	5.363	9.970	324
4. L i u'	4.500	5.195	9.695	257

*) Angka sementara hasil Sensus Penduduk tahun 1980.

Sumber: a. Kantor Kecamatan Sabbangparu.
b. Kantor Sensus dan Statistik Dati II Wajo.

Lampiran.

Tabel II – 14 DISTRIBUSI PENDUDUK TIAP KECAMATAN, JUMLAH DESA/KAMPUNG DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN WAJO (Tahun 1979).

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah		Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
		Desa	Kmp.		
1. Tempe	38,01	5	23	46,583	1.226
2. Tanasitolo	153,94	4	18	32,332	210
3. Maniangpajo	323,44	5	21	20.933	65
4. Balawa	173,25	5	23	37,572	217
5. Sabbangparu	131,37	4	18	29.644	226
6. Pammana	155,22	6	17	39.047	252
7. Majauleng	230,79	5	18	34.363	149
8. Takkalalla	352,76	9	24	45.626	129
9. Sajoanging	320,70	8	21	38.408	120
10. Pitumpanua	542,54	5	24	38.981	72
J u m l a h	2.422,02	56	207	363.489	150

Sumber: a. Kantor Statistik Dati II Wajo
 b. Laporan tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Wajo.
 c. Kantor Kecamatan Sabbangparu.

Lampiran.

**Tabel II – 16 DISTRIBUSI PENDUDUK DESA BATUPAPAN
MENURUT JENIS KELAMIN TIAP RUKUN
KAMPUNG (Tahun 1979).**

Rukun Kampung	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Lk.	Pr.	
1. Tarongko	485	514	999
2. Lapandan	360	425	785
3. Kasimpo	325	350	675
4. Kalolok	341	376	717
5. Rante	430	434	864
6. Mamabo	331	350	681
J u m l a h	2.272	2.449	4.721

Sumber: Diolah dari catatan Kantor Desa Batupapan.

Lampiran.

Tabel II – 20 TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA
BATUPAPAN, KECAMATAN MAKALE
(Tahun 1979)

R.K.	Tingkat pendidikan				Jumlah
	Sudah sekolah	S.D.	S.L.P.	S.L.A.	
1. Tarongko	350	372	160	117	999
2. Lapandan	338	248	130	69	785
3. Kasimpo	199	361	74	41	675
4. Kalolok	211	378	80	48	717
5. Rante	368	363	82	51	864
6. Mamabo	204	372	72	33	681
Jumlah	1.670	2.094	598	359	4.721

Sumber: Diolah dari arsip Kantor Desa Batupapan.

Tabel II-24
DISTRIBUSI PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK
MENURUT KECAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA
(Tahun 1979)

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah penduduk (1979)	Kepadatan penduduk (km ²)
1. Makale	232,48	7	37.110	161
2. Rantepao	31,09	4	24.546	789
3. Bonggakaradeng	366,60	4	21.662	16
4. Mengkendek	328,19	6	33.583	102
5. Saluputti	694,20	10	43.408	63
6. Sangalla	267,62	4	22.194	83
7. Sanggalangi	449,02	9	54.247	121
8. Sesean	319,01	11	42.400	133
9. Rindingallo	545,39	10	42.721	78
Jumlah	4.233,60	65	321.871	76

Sumber: a. Kantor Statistik Dati II Tator.
 b. Kantor Kepala Daerah Tingkat II Tator
 c. Kantor Kecamatan Makale, Tator
 d. Pengolahan data dari Dinas Pertanian Tator.

Lampiran

Tabel II-2
JENIS-JENIS MATA PENCAHARIAN POKOK DAN SAMPINGAN
PENDUDUK DI DESA WAGE DAN BATUPAPAN
(Tahun 1979)

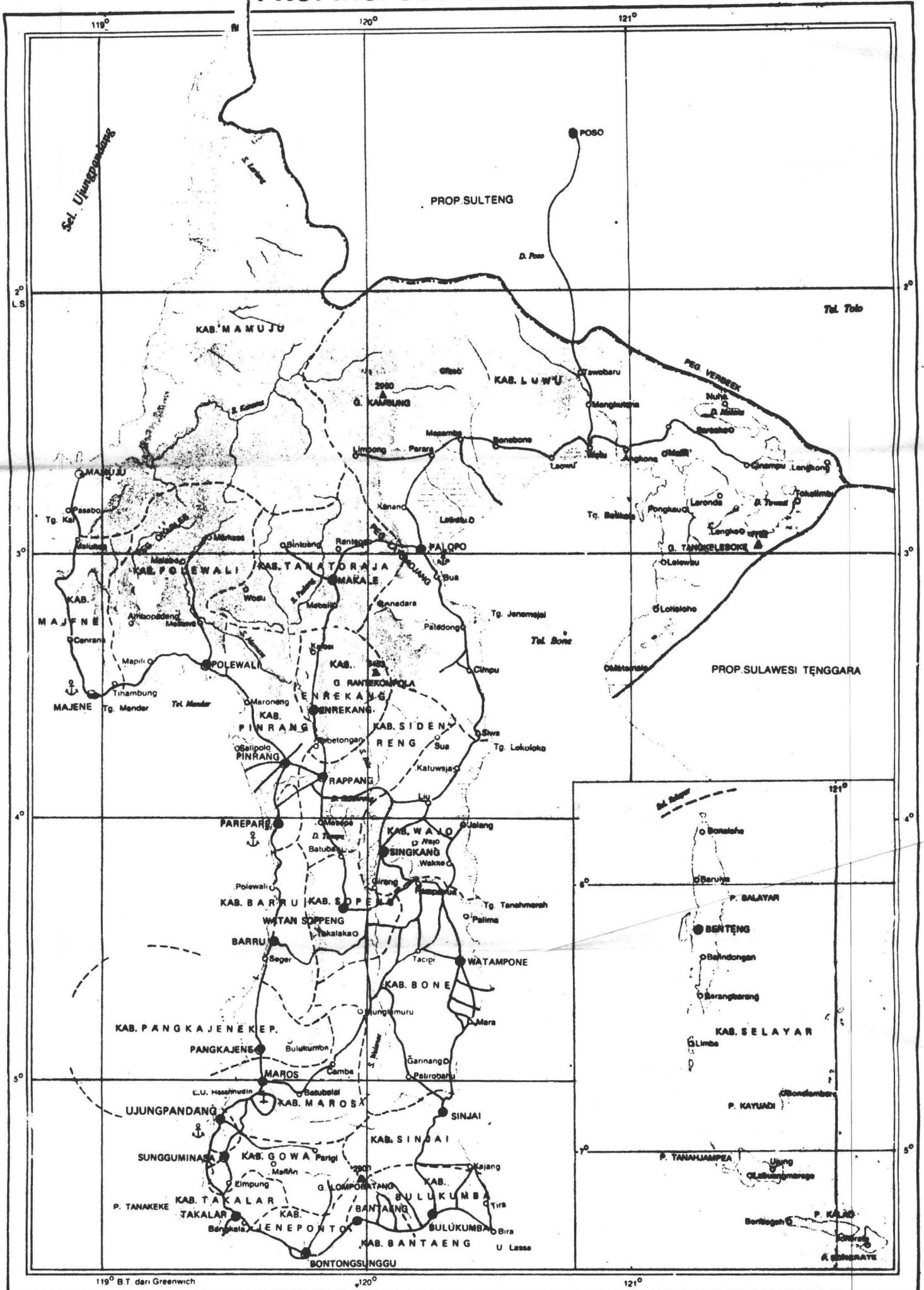
Jenis Mata	Desa Wage			Desa Batupapan		
	Mata Pencaharian			Mata Pencaharian		
	Pokok %	Samping-an I %	Samping-an II %	Pokok %	Samping-an I %	Samping-an II %
1. Petani	85	9	—	85	5	—
2. Peternak hewan	—	5	—	3	10	—
3. Nelayan	6	5	—	—	—	—
4. Pedagang	2	3	—	1	—	—
5. Pegawai	1	1	—	1	1	—
6. Guru	1	1	—	1	1	—
7. Home industri	1	1	—	3	2	—
8. Buruh/tukang	2	—	—	5	3	—
9. Jasa transport	2	—	1	1	—	—
Jumlah	100	25	1	100	21	—

Sumber: a. Data primer
 b. Kantor sensus dan Statistik Kabupaten Wajo dan Tator.
 c. Kantor Kecamatan Makale dan Sabbangparu, hasil Sensus penduduk tahun 1980 (angka sementara)

Nota : Prosentase Mata Pencaharian dari Kepala Keluarga (KK)

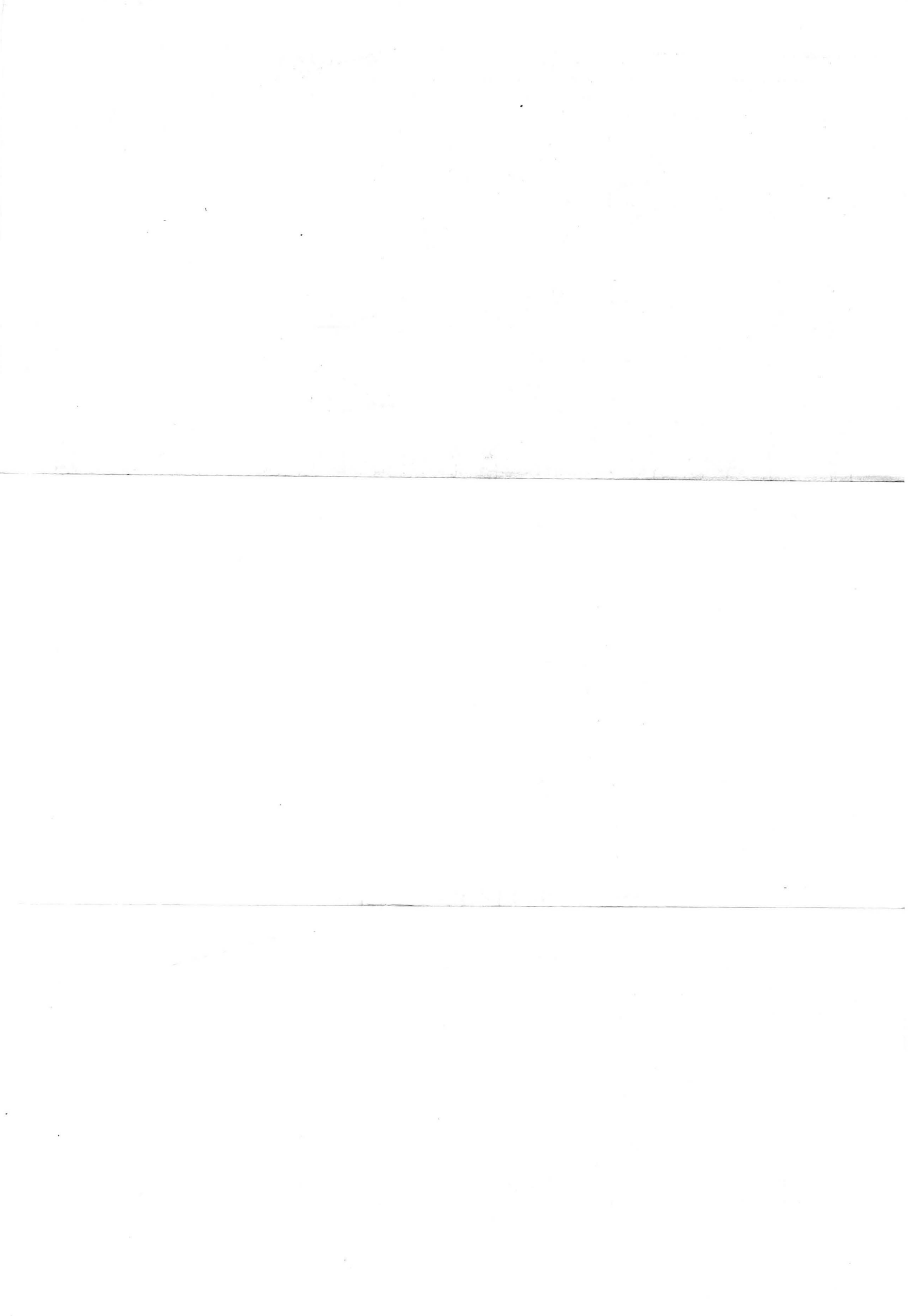


PROPINSI SULAWESI SELATAN



SKALA 1 : 2.000.000

Copyright GHALIA INDONESIA



Tidak diperdagangkan untuk umum